

**PENGEMBANGAN WILAYAH *HINTERLAND* DI KECAMATAN  
KEDUNGKANDANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PELAYANAN PUBLIK  
(Studi Pada Wilayah Buring – Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Di Susun Oleh:  
RISNA FEBRIYANI  
105030100111084**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMNISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

## Motto

*"Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil "*  
(Cukup Allah sebagai penolong  
kami dan Dia adalah sebaik-  
baik Pelindung)  
(QS. Ali Imran: 173)

*"Man thalabal ula sahirul  
layali"*  
(siapa yang ingin mendapatkan  
kemuliaan, bekerjalah sampai  
jauh malam)  
-pepatah arab dikutip dari buku  
trilogi Negeri 5 Menara yaitu  
Rantau Muara-

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Wilayah *Hinterland* di Kecamatan  
Kedungkandang Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik  
(Studi Pada Wilayah Buring-Kota Malang)

Disusun oleh : Risna Febriyani

NIM : 105030100111084

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 10 Maret 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Heru Ribawanto, MS  
NIP. 19520911 197903 01 002

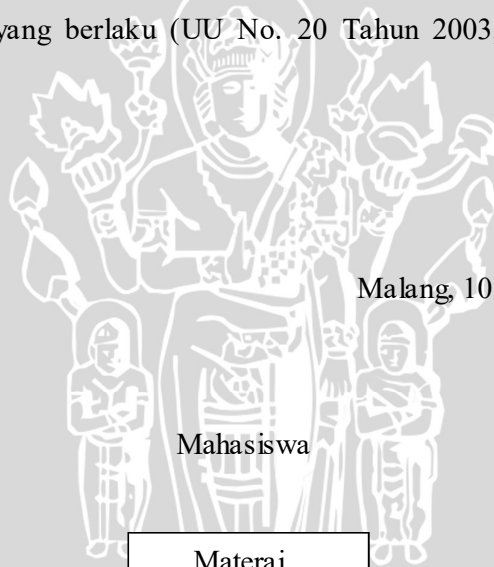
Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP  
NIP. 19611024 198601 1 002



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan penulis, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, penulis bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah penulis peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, 10 Maret 2014

Mahasiswa

Materai  
Rp. 6000,-

TTD

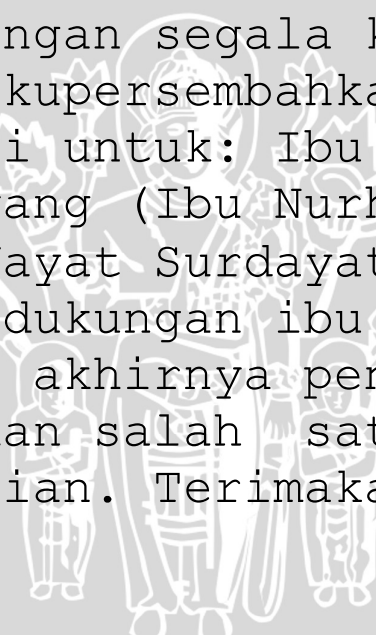
Nama : Risna Febriyani

NIM : 105030100111084

## HALAMAN PERSEMBAHAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk: Ibu dan Bapak tersayang (Ibu Nurhsanah dan Bapak Yayat Surdayat). Dengan doa dan dukungan ibu dan bapak akhirnya penulis bisa mewujudkan salah satu harapan kalian. Terimakasih untuk semuanya.





## RINGKASAN

Risna Febriyani, 2014, Pengembangan Wilayah *Hinterland* di Kecamatan Kedungkandang Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Wilayah Buring-Kota Malang), Drs. Heru Ribawanto, MS sebagai Dosen Pembimbing I, dan Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP sebagai Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya pembangunan di wilayah Kota Malang yang belum merata. Implikasi dari ketidakmerataan tersebut adalah terdapat wilayah yang pembangunan infrastrukturnya rendah, yaitu wilayah Buring. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya. Pengembangan wilayah merupakan bentuk dari pembangunan daerah, dimana merupakan salah satu wujud tugas pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum agar berdaya.

Sebagai upaya pengembangan, maka dibutuhkannya perencanaan, yang mana merupakan langkah awal dari pengembangan wilayah. Dalam perencanaan kita dapat melihat bagaimana keadaan dan karakter wilayah. Selain itu kita nantinya dapat mengetahui layanan publik apa yang cocok untuk dikembangkan di Buring sebagai wilayah *hinterland*. Hal itu tidak terlepas dari proses perencanaan wilayah berupa pengenalan wilayah dan analisis situasi.

Setelah proses perencanaan wilayah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah memaparkan upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Upaya ini didapat setelah pemerintah mengenal wilayah Buring terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar pengembangan infrastruktur pelayanan publik tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Upaya pemerintah Kota Malang meliputi beberapa strategi pembangunan yang dilakukan. Selain strategi pembangunan, perlu diketahui juga mengenai bentuk pelayanan publik yang akan dikembangkan pemerintah Kota Malang agar wilayah Buring semakin diminati masyarakat wilayah Buring, dan masyarakat luar Buring.

Untuk mengetahui pengembangan wilayah *hinterland* di wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode analisis data model Spradley. Penelitian kualitatif menurut Spradley terdapat empat model analisis yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural. Keempat model analisis tersebut saling berhubungan.

Dari hasil penelitian didapat data pengenalan wilayah buring, yaitu: keadaan alam lingkungan dan ciri-ciri fisik wilayah Buring, yang meliputi: letak geografis, iklim dan curah hujan, pegunungan dan sungai, topografi atau peta wilayah. Selain itu diketahui mengenai keadaan sosial ekonomi, yang meliputi: kegiatan-kegiatan ekonomi wilayah Buring, potensi-potensi ekonomi di wilayah Buring, komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh wilayah Buring. Selain ekonomi, terdapat keadaan sosial dan budaya wilayah Buring, meliputi: keadaan administrasi atau kelembagaan, kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah Buring, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Setelah mengenal wilayah Buring maka penelitian selanjutnya didapatkan data mengenai analisis situasi, yang meliputi: penetapan lokasi wilayah konsentrasi pengembangan, penetapan kelompok sasaran, dan penetapan kebutuhan program. Selain analisis wilayah, peneliti juga menetapkan bentuk pelayanan yang akan dikembangkan meliputi: pelayanan transportasi wilayah Buring, pelayanan utilitas wilayah Buring, pelayanan ruang terbuka hijau, dan pelayanan sosial kesehatan dan pendidikan di Wilayah Buring.

Kata Kunci :Pengembangan wilayah, *Hinterland*, Peningkatan Pelayanan Publik

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





## SUMMARY

Risna Febriyani, 2014, Hinterland Regional Development in Sub Kedungkandang For Improving Public Service (Studies in Regional Buring-Malang), Drs . Heru Ribawanto, MS as Lecturer I, and Wima Yudo Prasetyo , S. Sos , M.AP as Lecturer II .

---

This research was conducted on the basis of the presence of development in the city of Malang are not evenly distributed. The implications of these inequalities is that there are areas of low public infrastructure development, namely Buring region. Attempts to overcome these problems is done. The development area is a form of regional development, which is one form of government tasks in order to meet the needs of the general public in order helpless.

As development efforts, the need for planning, which is the first step of the development of the region. In planning we can see how the circumstances and character of the area. In addition we will be able to figure out what the appropriate public services to be developed in Buring as its hinterland. It was not independent of the form of the introduction of regional planning and area analysis of the situation .

After the regional planning process is done, then the next step is to outline the government's efforts in developing regions. These efforts come after the government know beforehand Buring region. This was done so that the development of infrastructure and public services on target in accordance with the social conditions of the local community. Malang Government efforts include several development strategies undertaken. In addition to development strategies, note also the shape of public services that will be developed so that the area of Malang government Burying Burying region more attractive community and the outside community Buring.

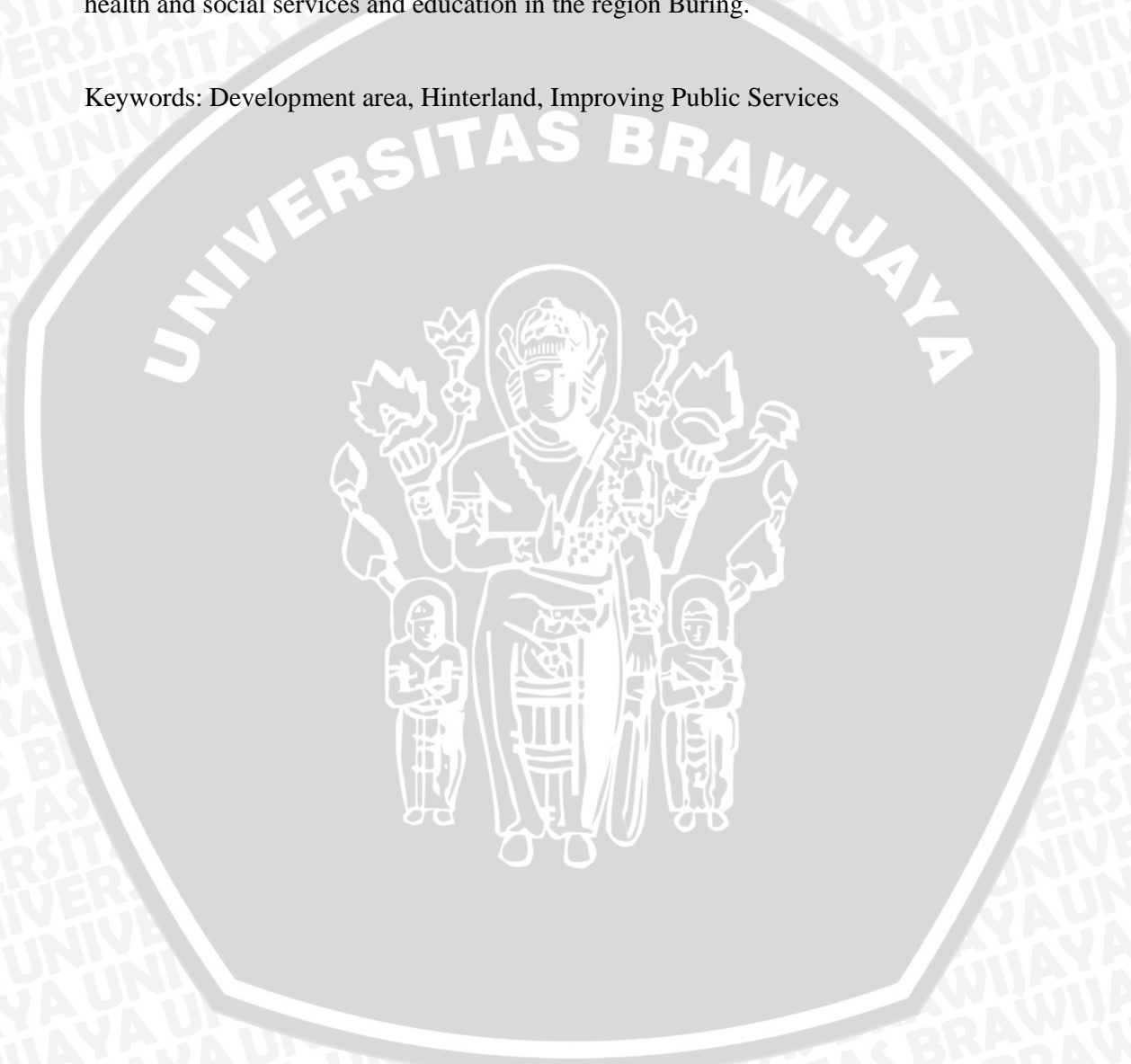
To determine the development of its hinterland in the region Buring as an effort to increase public service, in this study, researchers used a type of qualitative research method with a descriptive approach. The analytical method used is through the method of data analysis models Spradle. Qualitative research by Spreadley there are four models of analysis, domain analysis, taxonomic analysis, komponensial analysis , analysis of cultural themes. The four models are interrelated analyzes.

From the research, the introduction of data obtained buring regions, namely: the natural state of the environment and the physical characteristics of the area Buring, which include: geographical location, climate and rainfall, mountains and rivers, or a topographic map of the area. Also note the socio-economic circumstances, which include: economic activities Buring region, the economic potential in the Buring region, commodities produced by Buring region. In addition to the economic, social and cultural circumstances are Buring region, include: state or institutional administration, regional development policies Buring, and governmental agencies.



After identifying future research areas Buring then obtained data on the situation analysis, which include: determination of the location of the development area of concentration, determination of the target group, and the determination of program needs. In addition to the analysis of regions, the researchers also set the type of services that will be developed include: Burying regional transportation services, utility services Buring area, green space services, health and social services and education in the region Buring.

Keywords: Development area, Hinterland, Improving Public Services



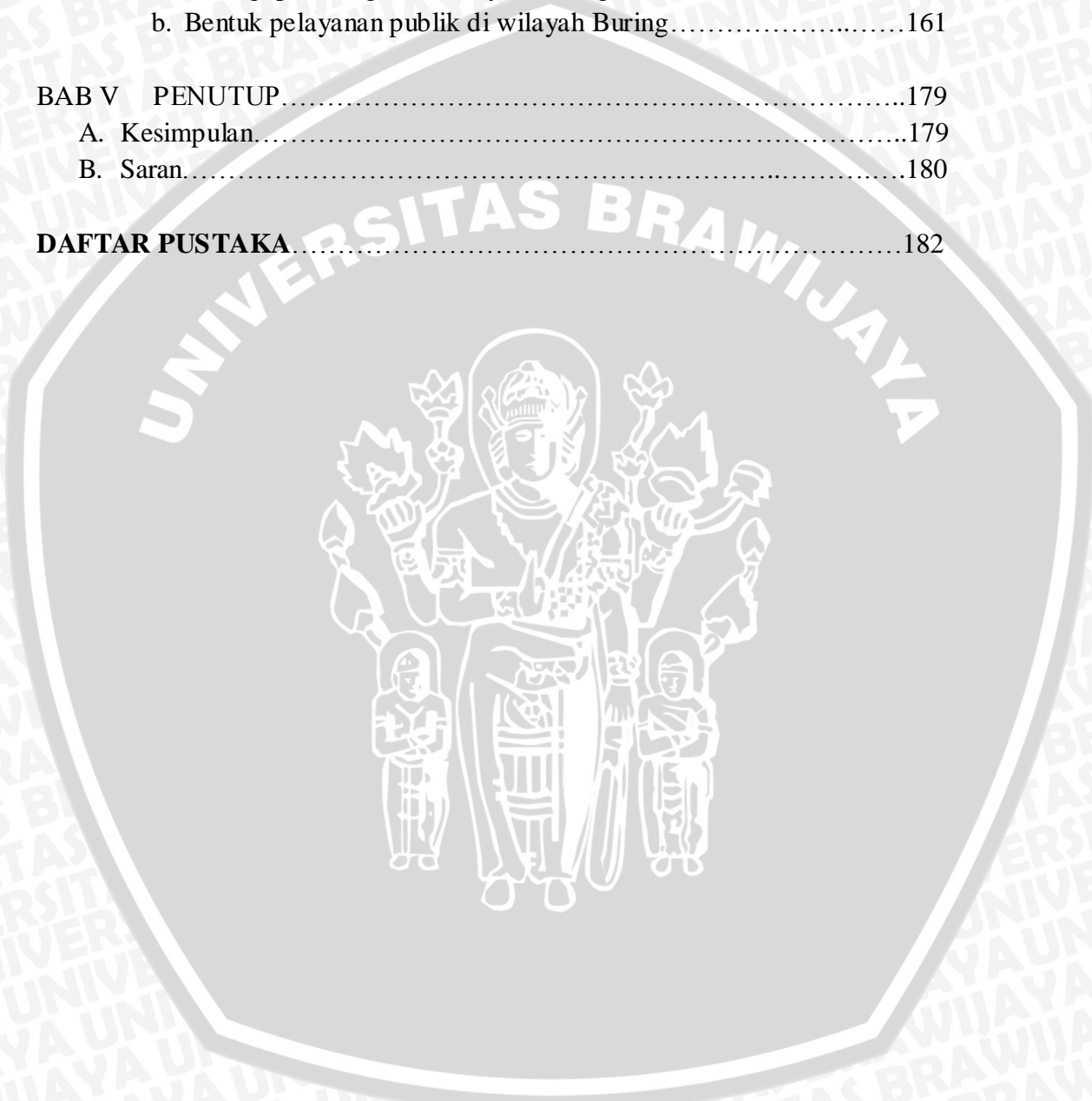
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang.....	14
1. Konsep Pengembangan Wilayah.....	14
2. Klasifikasi wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki.....	18
3. Konsep Penataan Ruang di Indonesia.....	19
4. Wilayah Hinterland.....	25
B. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.....	29
1. Strategi Perencanaan Wilayah.....	32
2. Strategi Pengembangan Wilayah.....	34
a. Paradigma Teknis- Kemasyarakatan (Community Technical Paradigm).....	34
b. Pendekatan Kompleks Wilayah (Regional Complex Approach).....	38
c. Sinergisme Spasial (Spatial Sinergism).....	49
d. Sinergisme Fungsional (Functional Sinergism).....	41
C. Pelayanan Publik.....	42
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	42
2. Barang Publik.....	44

3. Kualitas Pelayanan.....	46
D. Hubungan Pengembangan Wilayah dengan Pelayanan Publik.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Sumber data dan jenis data.....	59
E. Teknik pengumpulan data.....	60
F. Instrumen penelitian.....	62
G. Analisis Penelitian.....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Penyajian Data Umum.....	65
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	65
a. Keadaan Geografis.....	65
b. Visi Misi.....	66
c. Program Pembangunan Kota Malang.....	68
2. Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang.....	71
3. Gambaran Umum Dinas.....	78
a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang.....	78
b. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang.....	79
c. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.....	81
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	83
1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan hinterland.....	83
a. Pengenalan Wilayah Buring.....	83
b. Analisis Situasi.....	109
2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.....	114
a. Strategi pembangunan wilayah Buring.....	114
b. Bentuk pelayanan publik di wilayah Buring.....	118
C. Pembahasan.....	130
1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan hinterland.....	130
a. Pengenalan Wilayah Buring.....	130
b. Analisis Situasi.....	140



2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.....	149
a. Strategi pembangunan wilayah Buring.....	149
b. Bentuk pelayanan publik di wilayah Buring.....	161
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>179</b>
A. Kesimpulan.....	179
B. Saran.....	180
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>182</b>



## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Perbedaan Pengaturan Tata Ruang Antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dengan Peraturan Perundangan Otonomi Daerah pada Awal Masa Reformasi	20
2	Ciri-ciri Paradigma Teknis dan Paradigma Kemasyarakatan	35
3	Pengelompokan Barang Pribadi dan Barang Publik	46
4	Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk (Hasil Sensus Penduduk 2010)	73
5	Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan (Ha)	74
6	Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya	75
7	Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan	76
8	Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan	77
9	Data Program Pembangunan wilayah Buring	90
10	Mata Pencaharian Masyarakat Wilayah Buring	97
11	Data Fasilitas Perekonomian di Wilayah Buring	99
12	Tingkat Pendidikan Masyarakat Wilayah Buring	100
13	Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat	101
14	Jarak Tempuh Angkutan Kota Malang	120
15	Jumlah Angkutan Kota Malang (Mikrolet)	121
16	Jenis RTH	123
17	Data Hutan Kota yang Dikelola Pemerintah Kota Malang	124

18	Fasilitas Kesehatan Wilayah Buring-Kedungkandang	128
19	Fasilitas Pendidikan Buring Kedungkandang	129





## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Penggabungan Paradigma Teknis dan Pengembangan Masyarakat	38
2	Analisis Data Model Spradley	64
3	Pola Ruang Kota Malang Tahun 2030	68
4	Peta Wilayah Buring	85
5	Letak Wilayah Buring dengan Wilayah Lain	86
6	Kepadatan Penduduk Kota Malang 2010 Menurut Kecamatan	114
7	Peta Struktur Ruang Kota Malang	116
8	Rancangan Jembatan Kedungkandang	119
9	Rancangan 1 Pelebaran Jalan Mayjend Sungkono	122
10	Rancangan 2 Pelebaran Jalan Mayjend Sungkono	122
11	Keadaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang	163
12	Kondisi Masyarakat Buring	171
13	Rumah Sakit Bersalin Refa Husada	175
14	Pembangunan RSUD Kota Malang di Kelurahan Bumiayu Wilayah Buring	176

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar dan kaya, yang terdiri dari begitu banyaknya ragam adat istiadat, dan corak wilayah. Disamping itu negara Indonesia terbentuk dari berbagai pulau-pulau yang masing-masing memiliki potensi dan fungsi yang luar biasa. Karena begitu banyaknya potensi yang dimiliki maka pemerintah disiapkan untuk mengembangkan dan menata daerah itu. Tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya masih belum merata. Ada daerah yang sudah mandiri dan maju, tetapi juga banyak daerah yang masih dikatakan kurang berkembang. Implikasi dari ketidak merataan tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan publik yang menangani kebutuhan daerah dan masyarakat, terutama pada daerah-daerah pinggiran.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah salah satu wujud tugas pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum agar berdaya. Menurut Wiroatmodjo (2001:5) tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri dan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,
2. Meningkatkan keadaan sosial daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial secara adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat di daerah,
3. Mengembangkan setiap ragam budaya daerah sehingga menjamin kelestarian budaya daerah diantara budaya-budaya nasional Indonesia lainnya,
4. Meningkatkan dan memelihara keamanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat seutuhnya,
5. Membantu pemerintah pusat mempertahankan, memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Berbicara mengenai pembangunan daerah maka secara khusus lagi ada pembangunan wilayah. "Dalam pembangunan wilayah diperlukannya memerhatikan aspek ruang atau spasial.

Apalagi untuk perencanaan pembangunan wilayah, yang merupakan langkah awal dalam melakukan pengembangan wilayah. Ada beberapa tema penting dalam analisis ruang menurut James J. Heaphey” (Nurmandi, 2006:75), antara lain:

1. Bagaimana sebuah negara harus disatukan secara spasial sembari tetap memberikan peluang untuk melakukan inovasi secara spasial pula,
2. Bagaimana budaya dan ruang dapat dipadukan dalam satu ruang,
3. Bagaimana pembangunan ekonomi mempunyai aspek spasial dan implikasi dalam suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan,
4. Bagaimana ideologi politik dan ruang berkaitan satu sama lain, dan
5. Bagaimana dan apa pengaruh dari strategi spasial yang dilakukan oleh elite politik tertentu

“Dari kelima tema tersebut, dimensi spasial menunjukkan adanya pilihan strategis yang fleksibel dan dinamis sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan” (Nurmandi, 2006:77).

Analisis ruang juga dapat membantu untuk mengetahui potensi dan masalah-masalah sosial yang ada pada suatu wilayah perkotaan tertentu.

Pengembangan wilayah merupakan suatu bentuk dari pembangunan daerah. Selanjutnya, ada perencanaan daerah yang menjadi dasar dalam mengembangkan wilayah, yaitu dengan berpijak pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota. Dalam RTRW. Didalamnya biasanya terdapat beberapa pembagian wilayah perencanaan, yang dalam bagian tersebut sudah ditentukan model dan fungsi utama dari masing-masing wilayah. Disinilah penentuan objek yang akan dikembangkan dapat dianalisis.

Dengan adanya pembangunan wilayah, kota juga termasuk dalam cakupannya. Dalam pembangunan kota terapat masalah yang sama dengan wilayah, yaitu semakin melebarnya kesenjangan yang terjadi antara beberapa wilayah di dalam kota itu, yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan di suatu kota tersebut. Sudah umum diketahui bahwa dalam suatu wilayah ada area dimana kegiatan atau penduduknya terkonsentrasi dan ada pula area yang kegiatan atau penduduknya kurang terkonsentrasi. Tempat konsentrasi kegiatan dan



penduduknya dapat diistilahkan dengan pusat kota, pusat industri, pusat perdagangan, simpul distribusi, pusat pertumbuhan, pusat permukiman. Daerah diluar pusat konsentrasi biasa dinamakan dengan beberapa istilah seperti daerah pedesaan atau daerah pertanian, wilayah belakang (*hinteland*), dan daerah pedalaman.

“Perkembangan kota mencakup kegiatan pembangunan dan perkembangan kota itu sendiri, untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan kondisi pemukiman bagi penduduknya” (Adisasmita, 2005:32). Selain itu berkembangnya suatu kota juga di lihat dari kegiatan pelayanan kawasan ekonomi yang dilayaninya. Jadi dapat dikatakan, perkembangan dan pertumbuhan suatu kota erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan bagi penduduknya. Pengembangan wilayah dilakukan karena adanya kurang pemanfaatan dari suatu wilayah, dimana lahan dan potensi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Dimensi utama dalam pengembangan wilayah adalah memberikan pelayan kepada masyarakat (*public service*), sehingga nantinya kebutuhan masyarakat akan terfasilitasi dengan adanya pembangunan tersebut.

Pengembangan wilayah disini berarti cara atau bentuk nyata yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan umum masyarakat. Dalam membangun daerah, hal yang menjadi perhatian utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, salah satu indikator untuk melihat keberhasilan suatu proses pengembangan wilayah adalah sampai sejauh mana atau seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan adanya pembangunan tersebut, seperti sarana prasarana umum, sarana perhubungan atau transportasi, dan sebagainya.

Pengembangan wilayah merupakan jalan bagi pelayanan publik yang lebih baik, karena dengan dilakukannya pengembangan wilayah maka, yang tadinya pelayanan itu tidak ada, atau pun ada tetapi masih setengah-setengah menjadi ada dan lengkap. Menurut Dewantoro

(2001:188) “Masalah pelayanan masyarakat sangat erat kaitannya dengan eksistensi Pemerintah Daerah (Pemda), karena kapabilitas Pemda akan diukur dari segi kemampuannya memberikan pelayanan yang berkualitas dalam batas-batas *resource* yang tersedia”.

Di bagian wilayah Malang Tenggara dan Malang Timur, pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Malang berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengembangan itu sangat dibutuhkan karena menjadi usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan wilayah dan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan wilayah, nasional dan global. Menurut Wiroatmodjo (2001:2) “Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom”.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Malang Tenggara dan Malang Timur, yaitu pada koridor Jalan Mayjend Sungkono, karena saat ini wilayah di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang untuk dikembangkan. Lebih lanjut lagi, peneliti menghubungkan pengembangan wilayah pada koridor jalan Mayjen Sungkono dengan peningkatan pelayanan publik. Adapun pengkhususan pelayanan publik yang diambil adalah jenis pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 2009-2029. Pada suatu wilayah, pembentukan struktur ruang dilakukan dengan menata hierarki kota yang ada secara efisien dan efektif. Berdasarkan hasil analisa tentang struktur wilayah, pengembangan dapat dilakukan. Dimana dalam suatu daerah terdapat potensi yang dimiliki,



prospek pembangunan yang sesuai dengan wilayah dan didukung dengan RTRW wilayah tersebut.

Kota Malang yang terbagi atas 6 BWP (Bagian Wilayah Perencanaan), dari 6 BWP itu Jalan Mayjen Sungkono terletak pada wilayah Malang Tenggara, disana merupakan yang paling rendah pembangunannya, karena pusat Kota Malang itu sendiri diarahkan di Kawasan alun-alun dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena aktifitas berpusat di kawasan alun-alun dan sekitarnya, seperti; pemerintahan, perekonomian serta fasilitas sosial yang berskala regional. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 fasilitas perkotaan yang akan dikembangkan meliputi fasilitas perdagangan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan fasilitas rekreasi dan olahraga serta perkantoran. Sarana perdagangan yang merupakan tujuan penduduk Kota Malang dan sekitarnya direncanakan dengan meningkatkan kualitasnya dengan arahan pendistribusian fasilitas secara merata terutama di daerah hinterland/pinggiran. Salah satunya dengan rencana komplek perkantoran dan asrama haji, serta pengembangan industri besar di wilayah timur Kota Malang.

BWP Malang Timur mencakup sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu di Kawasan sekitar Perumahan Sawojajar dan sekitarnya. Jalan Mayjend Sungkono termasuk dalam wilayah Malang Tenggara. Disana pembangunan masih dalam tahap rencana, seperti yang diketahui bahwa disana akan dibangun beberapa fasilitas publik, di antaranya, jalan lingkar Timur, peningkatan dua jembatan, Cemorokandang dan Mayjend Sungkono, serta pelebaran beberapa ruas jalan, Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. Sehingga lokus penelitian ini nantinya akan berada pada wilayah Malang Tenggara dan wilayah Malang Timur. Tetapi sebagian besar lokus penelitian akan berada di Malang Tenggara.



Untuk fasilitas perkotaan pada sepanjang wilayah jalan Mayjend Sungkono, pada aspek perdagangan sudah mulai nampak banyaknya usaha rumahan yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, serta di Wilayah Buring terdapat pasar kedungkandang yang manfaatnya cukup dirasakan bagi warga Buring, karena pedagang di pasar tersebut adalah masyarakat setempat. Hal ini penting dalam pengembangan daerah dalam bidang ekonomi masyarakat. Selain itu dalam bidang pendidikan adanya SD internasional, SMP, SMK dan SMA negeri, Politeknik, serta beberapa sekolah swasta.

Dalam bidang transportasi, pada wilayah sepanjang Koridor Jalan Mayjen Sungkono masih mempunyai masalah yang cukup pelik. Dimana banyaknya masyarakat yang keluar masuk kawasan tersebut. Sehingga menyebabkan volume kendaraan melonjak. Hal itu terjadi karena kendaraan pribadi menjamur, dan angkutan umum yang sangat jarang. Kendaraan umum yang melewati Jalan Mayjend Sungkono sangatlah minim, hanya ada dua jalur angkutan kota yang melewati, yaitu TST dan MH. Angkutan umum itu pun tidak terjadwal, ditambah dengan lambatnya kecepatan angkutan umum tersebut. Kemudian masalah lain yang cukup berpengaruh adalah jalan di daerah buring masih tergolong sempit untuk volume kendaraan yang ada, sehingga nantinya akan terjadi dampak berupa kemacetan yang luar biasa. Selain itu faktor pencahayaan atau lampu yang terdapat di jalan raya masih terbilang kurang.

Untuk prasarana di sepanjang wilayah pada koridor Jalan Mayjend Sungkono akses internet masih kurang, dan untuk penyediaan prasarana air bersih, PDAM telah menyediakan, namun beberapa warga Buring masih mandi, mencuci baju, mencuci peralatan rumah di sungai-sungai yang kebersihannya tidak terjamin. Jika dibandingkan dengan wilayah kota malang lainnya, lahan Wilayah Buring masih banyak yang belum termanfaatkan. Mata pencaharian sebagian masyarakatnya adalah petani, buruh, pedagang. Sebenarnya di luar daerah Buring yang

kebetulan wilayahnya dekat dengan Buring, memiliki fasilitas yang cukup bagus, seperti Rumah Sakit Panti Nirmala di daerah kota lama, puskesmas yang cukup berfasilitas lengkap di daerah Lesanpuro, Mall dan alun-alun di jalan Merdeka, sehingga jika melihat potensi wilayah lain sebaiknya daerah Buring memiliki fasilitas sendiri agar wilayahnya lebih terberdayakan. Salah satu fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor. Dengan dibangunnya Wilayah Buring maka akan terjadinya keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kota Malang serta mengurangi ketimpangan wilayah.

Hal yang sudah diketahui bahwa pembangunan di Kota Malang sudah *over development*, sehingga sudah seharusnya arah pembangunan bergeser ke wilayah lain, yaitu wilayah Malang Timur, khususnya Buring. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengurangi kesenjangan antar daerah diperlukan peningkatan efektivitas program-program pengembangan daerah yang didasarkan atas kesesuaian tipologi dengan karakteristik wilayah yang akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Penulis memfokuskan pengembangan wilayah *hinterland* tepatnya pada wilayah sepanjang koridor Jalan Mayjend Sungkono, guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan pembangunan wilayah Kota Malang, dan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat komprehensif dan holistik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan Daerah Buring sebagai wilayah *hinterland*. Maka penulis mengangkat judul **“Pengembangan Wilayah *Hinterland* di**

## **Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Wilayah Buring-Kota Malang)”**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring-Kedungkandang sebagai kawasan hinterland?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring-Kedungkandang sebagai kawasan hinterland.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi Mahasiswa, Fakultas Ilmu Administrasi, Atau pun instansi yang bersangkutan. Adapun kontribusi penelitian ini adalah

:

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan
- b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam meningkatkan kreatifitas dan ketrampilan di dalam lingkungan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.



- c. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya

## 2. Bagi Fakultas Ilmu Administrasi

- a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan program.
- b. Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Jurusan administrasi Publik Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang kepada instansi yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

## 3. Bagi instansi yang bersangkutan

- a. Merupakan sarana penghubung instansi dan lembaga pendidikan tinggi.
- b. Sebagai sarana untuk menentukan pertimbangan dalam menentukan kriteria lulusan yang dibutuhkan oleh instansi bersangkutan, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Tinggi.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian yaitu tentang peran pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerah masih belum merata. Implikasi dari

ketidak merataan tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan publik yang menangani kebutuhan daerah dan masyarakat, terutama pada daerah-daerah pinggir atau *hinterland*. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya pembangunan daerah. Berbicara mengenai pembangunan daerah maka secara khusus lagi ada pengembangan wilayah. Dalam mengembangkan wilayah harus berpijak pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kota Malang RTRW diatur dalam UndangPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang deskripsi teoritis tentang variabel yang diteliti. Landasan teori inilah yang nantinya akan digunakan untuk membantu peneliti dalam proses pengolahan atau analisis data. Dalam bab ini diuraikan tentang teori dan konsep mengenai: Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang, Strategi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Wilayah Hinterland, dan Pelayanan Publik.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membicarakan tentang jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Didalamnya terdapat fokus penelitian mengenai perencanaan wilayah Buring, yaitu pengenalan wilayah dan analisis situasi. Fokus selanjutnya mengenai upaya pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring, meliputi: strategi pembangunan wilayah Buring, dan bentuk pelayanan publik di wilayah Buring. Lokasi penelitian dilakukan di BWP Malang Tenggara dan sedikit di BWP Malang Timur pada Kecamatan Kedung Kandang sebagai wilayah yang akan diteliti. Kecamatan Kedungkandang sendiri dikerucutkan pada wilayah Buring. Sehingga wilayah

konsentrasi pengembangan dalam penelitian ini adalah wilayah Buring yaitu wilayah yang berada pada koridor Jalan Mayjend Sungkono yang disepanjang jalan terdapat sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen dan peristiwa dari pengembangan wilayah Buring, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Kecamatan Kedungkandang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan tertulis serta observasi. Instrumen penelitian yaitu penelitian sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan dan alat pendokumentasian. Dalam penelitian ini digunakan analisa data yang dikemukakan oleh James Spradley.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, pengujian hipotesis serta analisis data yang terdiri dari deskripsi obyek penelitian, deskripsi data, intepretasi hasil penelitian, serta pembahasan penelitian yang dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan pokok-pokok kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dan sarana-sarana yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan sebagai bahan masukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

##### 1. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tentunya sudah dilakukan sejak pemerintahan yang lalu, salah satunya adalah pada era orde baru dengan dibentuknya PELITA I dan II yang dalam mengembangkan wilayah masih berorientasi pada pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, menurut Marbun (1979:116) “Pada PELITA II s/d IV landasan pemikiran pengembangan wilayah ialah pola aliran barang dan jasa, yaitu merupakan tiruan atau pola berpikir pada zaman penjajahan yang memberi fungsi utama kota sebagai Terminal Jasa Distribusi (TJD) atau Pusat Logistik”. Pada pengembangan tersebut dibentuknya beberapa pola pembangunan wilayah. Dimana dalam pembangunan tersebut adanya keterkaitan antara desa dan kota, dimana di desa dilakukannya pembangunan, dan wilayah kota dilakukan pembinaan.

Semakin disadari bahwa sasaran kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh negara yang sedang berkembang dewasa ini bukanlah lagi semata-mata sasaran tradisional pembangunan seperti: pertumbuhan pendapatan nasional yang maksimal, kesempatan kerja penuh, dan stabilitas. Praktek membuktikan pertumbuhan pendapatan nasional tidak dengan sendirinya atau secara otomatis mencipta kesempatan kerja penuh. Pertumbuhan pendapatan nasional belum berarti kemakmuran yang merata. Kesempatan kerja penuh (*full employment*), kemakmuran merata ternyata merupakan sasaran yang berdiri sendiri dan saling berkaitan dengan pembinaan berimbang, struktur ekonomi berimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, antara daerah (wilayah) dengan wilayah lainnya, antara kota dengan desa (Marbun, 1979:117-118).

Konsep pengembangan merupakan penggabungan dari tinjauan teoritis dan praktis yang terus berkembang yang kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan wilayah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. “Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu” (Sulistiono, 2010:14). Pengertian pengembangan wilayah menurut Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil (2003:2) dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Dalam perkembangannya, konsep pengembangan wilayah diwarnai oleh berbagai teori yang mewarnai. “Pertama adalah Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial- ekonomi, dan budaya” (Depkimpraswil, 2003:2). Setelah itu dilanjutkan lagi dengan teori lain milik Hirschmann (era 1950-an). “Pada teori ini memunculkan teori *polarization effect* dan *trickling- down effect* dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced devlopment*)” (Depkimpraswil, 2003:2).

Teori ketiga dan keempat adalah teori milik Myrdal (era 1950-an) dan Friedmann (era 1960-an). Jika Myrdal menjelaskan bahwa adanya hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya (*hinterland*) dan menggambarkan keduanya dengan istilah *backwash and spread effect*. “Lain lagi dengan teori milik Friedmann yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan” (Depkimpraswil, 2003:2). Teori yang kelima adalah teori milik Douglass (era 1970-an) yang menjelaskan mengenai hubungan keterikatan antara desa dan kota (*rural – urban linkages*) dalam pengembangan wilayah.



Dengan lahirnya teori-teori diatas, kemudian putra bangsa memperkaya gagasan-gagasan yang masih terkait dengan pengembangan wilayah, antara lain milik Sutami yang menjelaskan bahwa dalam pengembangan wilayah perlu diadakannya pembangunan infrastruktur yang intensif. Kemudian gagasan milik Poernomosidhi yang memunculkan konsep hierarki kota dan hierarki prasarana jalan. Disusul dengan gagasan dari Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang melahirkan konsep pola dan struktur ruang yang menjadi inspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai *growth center* Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spred effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam melakukan pengembangan wilayah, diharapkan suau wilayah memiliki aspek strategis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, sarana prasarana yang nantinya dapat menjadi potensi wilayah dan dari situ pengembangan wilayah akan dilakukan dan menghasilkan sinergisme yang bisa dan saling berkaitan antar kesemuanya.

Pengembangan wilayah biasanya menuju pada wilayah yang berada di perbatasan dan perlu memperhatikan apakah berkembang meluas secara horizontal atau vertikal (Adisasmita, 2005:79). Pembangunan biasanya berkembang secara horizontal, padahal lahan yang tersedia semakin sedikit. Pada kota yang bersifat horizontal ini biasanya pembangunannya secara mendatar. "Apabila pengembangan wilayah mendatar ini tidak mengikuti pola konsentris, akan



membentuk pusat-pusat kota (yang baru) yang berada di sekitar pusat kota utama. Kota utama dan kota-kota baru tersebut membentuk semacam kerucut kepadatan kegiatan yang tidak sama tingkat intensitasnya satu sama lainnya” (Adisasmita, 2005:79).

Selain bersifat mendatar ada pula yang bersifat menjulang atau vertikal. Wilayah yang pembangunannya banyak yang bersifat vertikal berarti wilayah tersebut mempunyai intensitas dan kepadatan yang tinggi. Pembangunannya sangat padat dan banyak yang bangunannya bertingkat tinggi sebagai dampak bahwa lahan yang ada sangat terbatas.

Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah akan berdampak pada intensitas kegiatan suatu wilayah. Teori lokasi model Vonthunen membuat asumsi bahwa (Tarigan, 2010:93):

1. Wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain.
2. Tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah.
3. Seluruh wilayah model memiliki, iklim, tanah, dan topografi yang seragam.
4. Fasilitas pengangkutan adalah primitif dan relatif seragam.
5. Kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan.

## 2. Klasifikasi wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki

Dalam mengembangkan wilayah sangat penting untuk diketahui apa potensi yang dimiliki dan dapat menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk seperti apa yang akan dikembangkan.

Untuk itu ada beberapa tipe kota yang diusulkan oleh Adisasmita (2005:80-82) yaitu:

### a. Kota Pertanian

Menurut Adisasmita (2005:80-81) kota pertanian atau agropolitan yang dikembangkan oleh Friedmann karena kegagalan teori kutub pertumbuhan (*growth pole*), yang diintroduksi oleh Francois Perroux dalam menyebarkan dampak pertumbuhan ke daerah sekitarnya (yaitu *trickling down effect* yang dikemukakan oleh Hirschman. Kegagalan tersebut mendorong rencana pembangunan mempertimbangkan untuk menerapkan konsep kota pertanian atau agropolitan yang sering diterjemahkan sebagai “kota di ladang”. Ciri-ciri agropolitan yaitu berpenduduk sekitar 20.000 jiwa, berada ditengan hamparan ladang atau sawah yang mempunyai radius terhadap wilayah pengaruhnya sekitar 10 km (atau satu jam perjalanan dengan sepeda). Di agropolitan terdapat kegiatan pelayanan

pemasaran komoditas hasil pertanian (agrobisnis) dan terdapat pula kegiatan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah (agroindustri). Kota pertanian dikenal sebagai pusat pengumpul hasil pertanian yang kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan hasil pertanian. Contohnya adalah kota Kerawang di Jawa Barat.

b. Kota Pariwisata

Kota pariwisata merupakan permukiman yang dibangun terutama untuk rekreasi termasuk kegiatan yang bersifat fisik, sosial, dan budaya, umumnya terdapat fasilitas hotel, motel, rumah makan dan toko cenderamata, dan lainnya. Kota-kota pariwisata dibangun pada tempat-tempat yang berudara sejuk, dan mempunyai pemandangan alam yang indah atau yang memiliki peninggalan sejarah dan budaya. Contohnya adalah Lembanga (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), dan Kaliurang (Yogyakarta).

c. Kota Taman

Kota taman adalah kota yang dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan kota industri yang dirasakan semakin memburuk dimana kota taman merupakan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar itu dikelilingi oleh jalur hijau (daerah pertanian). Kota taman mengandung di dalamnya jalur dan kantong-kantong fasilitas taman umum, pekarangan hijau, selain terdapat fasilitas-fasilitas lengkap untuk kehidupan sosial beserta kemudahan-kemudahan lainnya. Konsep kota taman yang dikembangkan oleh Ebenezer Howard dalam bukunya *"The City of Tomorrow"* (1920), pada dasarnya berpegangan pada tiga prinsip dasar, yaitu: (1) lahan dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah, (2) didesain dengan cermat dan unsur-unsur kotanya lengkap, dan (3) ada jalur lingkaran hijau yang mengelilingi kota ini secara permanen yang antara lain berfungsi untuk membatasi pertumbuhan kota.

### 3. Konsep Penataan Ruang di Indonesia.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Arti kata dikuasai bukan bermakna memiliki, melainkan negara sebagai pengatur kekayaan alam yang nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pengatur disini sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola, menyimpan, dan membagikan sumber alam kepada masyarakat dengan cara yang adil. Tidak ada eksploitasi pihak untuk kepentingan pribadi, tetapi murni untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tadi sebagai induk dalam membuat Undang-Undang mengenai pengaturan tata ruang. Melanjutkan dari pasal diatas dibentuklah Undang-Undang mengenai tata ruang yang teruang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tetapi



didalam Undang-Undang tersebut masih sangat terbatas dan sedikitnya pembahasan mengenai pedoman pelaksanaan tata ruang, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007. Sebelum diperbaharui, perundang-undangan tata ruang masih mengalami masalah dan ketidak sinkronan akibat adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Adanya ketidaksesuaian isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dengan PP Nomor 25 Tahun 2000.

Tabel 1 Perbedaan Pengaturan Tata Ruang Antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dengan Peraturan Perundangan Otonomi Daerah pada Awal Masa Reformasi

No	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992	PP Nomor 25 Tahun 2000
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi daerah tingkat (Dati I) dan wilayah kabupaten/kotamadya (Dati II) (pasal 30 ayat 3 huruf d)	Penetapan Tata Ruang Nasional berdasarkan tata ruang kabupaten/ kota dan provinsi.
2	Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kotamadya Dati II merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Dati I (pasal 22 ayat (1))	Penetapan tata ruang provinsi berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/kota

Sumber: Sadyohutomo (2008:57)

Adanya perbedaan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan lahirnya perundang-undangan tata ruang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007, dan peraturan mengenai otonomi daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimana terdapat pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah



pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Dengan adanya pembagian urusan (antara pemerintah pusat dan daerah), maka kedudukan dan objeknya sudah jelas. Dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 lingkup penataan ruang mencakup: (1) perencanaan tata ruang, yang produknya adalah Rencana Tata Ruang (RTR), (2) pemanfaatan ruang, merupakan pelaksanaan RTR, (3) pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan pengendalian pelaksanaan RTR.

Melanjutkan mengenai perundang-undangan tata ruang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007, peneliti mengambil contoh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Dimana dokumen RTRW tersebut sebagai hasil keluaran kebijakan mengenai perencanaan wujud struktural dan pemanfaatan ruang kota Malang. Dokumen tersebut sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan wilayah di Kota Malang.

Struktur tata ruang merupakan unsur terpenting dalam sebuah pengembangan suatu wilayah. Kedudukan kota menentukan strategi apa yang cocok yang ingin dikembangkan. Segala infrastruktur kota atau wilayah harus sesuai dengan konsep ruang suatu wilayah. Penyediaan sarana prasarana pun harus sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Maka dari itu konsep RTRW merupakan dasar dan acuan bagi perkembangan pembangunan wilayah kedepan.

Dalam RTRW kota Malang terdapat 5 sub-judul dalam mengatur wilayah di kota Malang. Sub judul itu berupa Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kota Malang, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung, Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang, Rencana Struktur Ruang, Penetapan Kawasan Strategis.

Kebijaksanaan sistem pusat pelayanan dibagi dalam tiga kelompok, pertama, Pusat Pelayanan yang Berskala Regional, dimana pelayanannya mencakup wilayah kecamatan dan

daerah yang lebih luas dari kecamatan, yang didalamnya memiliki fasilitas pemerintahan, kesehatan, perdagangan, dan jasa. Kedua, Pusat Pelayanan Berskala Kota, dimana lingkup pelayanannya lebih besar dari skala regional, yaitu mencakup wilayah kota yang bersangkutan. Fasilitasnya meliputi: pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga. Ketiga, Pusat Pelayanan Berskala Lokal dimana fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup bagian wilayah kota. Adapun fasilitasnya mencakup: pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, serta pedagang eceran. Pusat skala lokal ini digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan kawasan baru.

Dalam RTRW Kota Malang, terdapat strategi struktur ruang dimana pusat Kota Malang diarahkan di kawasan alun-alun dan sekitarnya. Disana terdapat pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan infrastruktur sosial berskala regional. Disamping itu Kota Malang dibagi atas 6 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), dimana pembagian itu didasarkan pada kedekatan dan persamaan fungsi kegiatan. Kota Malang memiliki pusat dan sub pusat yang masing-masing tetap terhubung melalui jaringan jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur, agar aksesibilitas antara pusat dan sub pusat tetap terhubung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007, kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun kawasan strategis Kota Malang sebagai berikut: (1) penetapan kawasan militer, di Kota Malang terdapat tempat pelatihan militer Angkatan Darat, asrama dan mess perwira di sekitar lapangan Rampal, selain itu ada juga tempat pelatihan Angkatan Udara di Abdurrahman Saleh, kawasan pertumbuhan ekonomi meliputi perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, pariwisata, dan industri, kemudian kawasan sosial budaya (cagar budaya dan bangunan bersejarah). Adanya



kawasan strategis ini untuk meningkatkan pertumbuhan masing-masing wilayah (khususnya dalam hal ekonomi) dan nantinya akan berdampak pada pendapatan daerah, (2) penetapan kawasan strategis dapat berpengaruh pada tata ruang wilayah di area sekitar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pada kegiatan di bidang yang sejenis.

Selain penetapan kawasan strategis, RTRW Kota Malang juga mengkaji mengenai rencana struktur ruang. Adapun Rencana Struktur Ruang Kota Malang adalah sebagai berikut

([http://www.malangkota.go.id/pdf/Bahan\\_Web\\_rtrw.pdf](http://www.malangkota.go.id/pdf/Bahan_Web_rtrw.pdf)):

1. Pusat Kota Malang tetap berada di Kecamatan Klojen yaitu di Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.
2. Pusat BWP Malang Tengah (Pusat Kota) berada di Kecamatan Klojen yaitu di Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.
3. Pusat BWP Malang Utara berada di Kecamatan Lowokwaru yaitu di Kawasan sekitar Universitas Islam Malang (Unisma), Pasar Dinoyo, dan sekitarnya.
4. Pusat BWP Malang Timur Laut berada di sebagian wilayah Kecamatan Blimbing yaitu di Kawasan sekitar Pasar Blimbing dan sekitarnya.
5. Pusat BWP Malang Timur berada sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu di Kawasan sekitar Perumahan Sawojajar dan sekitarnya.
6. Pusat BWP Malang Tenggara berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu di Kawasan sekitar Pasar Gadang dan sekitarnya.
7. Pusat BWP Malang Barat berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukun yaitu di Kawasan sekitar Universitas Merdeka, Plaza Dieng, dan sekitarnya.

Dalam struktur ruang Kota Malang terdapat beberapa rencana pengembangan, yaitu (1) Rencana Pengembangan Fasilitas Perkotaan, (2) Rencana Sistem Transportasi Kota Malang, (3) Rencana Sistem Prasarana Kota Malang, dan (4) Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Dalam Rencana Pengembangan Fasilitas Perkotaan, yang menjadi sasaran pengembangan adalah di bidang fasilitas perdagangan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan fasilitas rekreasi dan olahraga, serta perkantoran. Pada fasilitas perdagangan, pemerintah Kota (Pemkot) Malang berupaya dalam meratanya fasilitas pendistribusian pada wilayah *hinterland* dengan diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Sekarang di wilayah Malang Timur sedang



direncanakan dibangunnya kompleks asrama haji, dan industri dengan skala yang cukup besar. Pada bidang pendidikan Pemkot Malang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan Kota Malang dan mendirikan sekolah-sekolah di wilayah malang timur (SD Internasional, Poltekcom, SMK Negeri).

Untuk sistem transportasi, Pemkot memang merencanakan adanya pembangunan *fly over* dan pelebaran jalan (lihat gambar 9 dan 10) di wilayah malang timur. Selain itu juga meningkatkan efektifitas stasiun dan terminal, merencanakan angkutan umum semi *busway* untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat dalam kebutuhan bertransportasi, dan rencana pembangunan jalur kereta api *double track* untuk lintasan Malang-Surabaya serta pengadaan kereta api dan kereta api komuter beserta prasarana pelengkapanya (stasiun/shelter).

Dalam rencana pengembangan prasarana kota Malang, Pemkot menginginkan adanya peningkatan kualitas akses internet terutama di daerah dengan guna lahan seperti perkantoran, pendidikan, perdagangan jasa, pariwisata, dan kesehatan. Selain akses internet, adanya rencana pengembangan air bersih, penambahan lokasi TPS, dan pembangunan sistem *drainase*. Terakhir, rencana pengembangan RTH, pemerintah sudah merencanakan lokasi, sarana, pemeliharaan, pelestarian, pengembangan taman dan penyediaan jalur hijau yang salah satunya diarahkan di Kecamatan Buring dan Kecamatan Kedungkandang, dan Pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada kawasan Malang Timur (Kecamatan Kedungkandang) yang relatif masih banyak lahan belum terbangun agar di Kota Malang menjadi kota yang ramah lingkungan dan tetap berpedoman pada *sustainable city*.

Jika dilihat dari rencana pengembangan, memang akan ada banyak pengembangan wilayah yang akan dilakukan Pemkot khususnya di wilayah Malang Timur, sebagai upaya pemerataan

pembangunan. Agar pemangunan tidak hanya dilakukan di pusat kota saja, melainkan di seluruh wilayah Kota Malang.

#### 4. Wilayah *Hinterland*

Wilayah *hinterland* biasanya disebut dengan istilah lain, yaitu: kota satelit. Pada dasarnya dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di wilayah *hinterland* tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota. Secara ekonomi wilayah *hinterland* bisa menjalankan perekonomian secara mandiri, walaupun ada beberapa barang dan jasa yang dalam pendistribusiannya masih tergantung pada kota besar, tetapi secara garis besar kawasan *hinterland* atau kota satelit dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya atau penduduk sub-urban. Dengan kata lain, dapat diungkapkan bahwa wilayah *hinterland* juga berfungsi sebagai penerima tenaga kerja karena didalamnya telah berkembang fungsi-fungsi sosio ekonomi kekotaan, namun juga berperan sebagai pemasok komoditas ketempat lain (Yunus,2005:285).

Wilayah *hinterland* biasanya sebagai pemasok kebutuhan, dan menjadi daya dukung kebutuhan di kota besar. Menurut F.Schnore wilayah *hinterland* merupakan wilayah kecil di pusat kota yang kegiatan didalamnya adalah kegiatan industri sebagai fungsi produksi. Terdapatnya fungsi produksi inilah yang menyebabkan wilayah *hinterland* dapat menyerap tenaga kerja dari wilayah lain, yang tadinya ingin bekerja di kota besar, dapat dialihkan perhatiannya ke wilayah *hinterland*.

Dalam istilah, biasanya arti wilayah *hinterland* dicampur adukkan dengan istilah *suburban area*, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda, hanya saja dalam beberapa hal keduanya



dapat melakukan kegiatan yang sama dan bersinergi sehingga kerap diartikan sama. Jika arti *hinterland* telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa tipe kotanya hampir sama dengan kota besar hanya saja dalam skala yang lebih kecil, sedangkan *suburban area* adalah wilayah dimana masyarakatnya kebanyakan bekerja di wilayah pusat kota atau di wilayah *hinterland*, sedangkan tempat tinggalnya hanya dijadikan untuk tempat tinggal masyarakat semata, karena keesokannya mereka harus bekerja. Memang, masyarakat di *suburban area* merupakan bagian dari wilayah pusat (pusat kota) dan wilayah *hinterland*. Menurut Yunus (2005:286) mengutip dari Murphy (1974) berpendapat bahwa secara *de facto* dan *de jure* penduduk kota *sub-urban* adalah penduduk wilayah tertentu, namun secara ekonomi mereka menjadi penduduk kota lain karena bekerja untuk kepentingan kota yang dimaksud.

Wilayah *hinterland* apabila terus dikembangkan memungkinkan terjadinya kota baru, karena didalamnya telah tersedia berbagai fasilitas seperti kota besar. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kota-kota kecil disekitar kota diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, baik dari kota itu sendiri maupun dari luar kota (Yunus, 2005:287).

*Hinterland* atau kota satelit sama seperti istilah kota baru. Dimana apabila dipusat kota atau bagian wilayah tertentu pada suatu kota telah padat, maka ada suatu kebutuhan akan wilayah kawasan baru. Kawasan baru itu diciptakan untuk mengurangi kepadatan transportasi, kepadatan perumahan, kepadatan kegiatan ekonomi, atau yang lainnya. Secara terminologis pengertian kota baru telah berkembang di berbagai negara sesuai dengan ciri khas dan tipikalnya. Istilah asing untuk kota baru adalah *new town, neustadt, niewestad, villeneuve, novgorod* natau *novigrad*. Unsur-unsur dapat dikatakannya kota baru menurut (Hariyono, 2010:130) adalah sebagai berikut:

1. Masa atau kurun waktu pembangunan dan pendiriannya.
2. Segi letak geografisnya.



3. Fungsi dan jangkauan pelayanannya.
4. Sifat kemampuan peranannya secara internal maupun eksternal.

Menurut Lloyd Rodwin (Hariyono, 2010:130 mengutip dari Jayadinata, 1992) kota baru merupakan kota yang direncanakan, didirikan, dan kemudian dikembangkan secara lengkap setelah ada kota atau kota-kota lainnya yang telah tumbuh dan berkembang terlebih dahulu (Hariyono, 2010:130). Menurut Hariyono (2010:130-131), *Advisory Commision on Intergovernmental Relation* memberikan kriteriaan bagi kota baru sebagai berikut:

1. Dimungkinkan untuk menunjang kebutuhan berbagai jenis rumah tinggal dan kegiatan ekonomi sebagai lapangan kerja bagi penduduk di dalam permukiman itu sendiri.
2. Dikelilingi oleh jalur hijau yang menghubungkan secara langsung dengan wilayah pertanian di sekitarnya dan juga sebagai pembatas perkembangan kota dari segi jumlah penduduk dan luas wilayahnya.
3. Dengan mempertimbangkan kendala dan limitasi yang ada dapat menentukan proporsi peruntukan lahan yang sesuai untuk kegiatan industri, perdagangan, perumahan, fasilitas, utilitas umum serta ruang terbuka, pada proses perencanaannya.
4. Dengan mempertimbangkan fungsi kota serta lahan yang tersedia dapat ditentukan pola kepadatan penduduk yang srası.

Dalam pemahaman yang lain, kota baru itu berdiri tidak harus di lahan yang perawan, tetapi dapat dari suatu desa, kota kecil, atau wilayah yang ingin dikembangkan dan diperbaharui sehingga menjadikannya wilayah atau kota mandiri dan lengkap. Kota baru juga dapat dibangun untuk mengurangi permasalahan dan kekurangan yang berada di pusat kota atau kota yang telah padat. Kota baru secara fungsional masih tergantung pada kota induknya, dan secara lokasi berdekatan dengan pusat kota, dan biasanya disebut kota satelit.

## **B. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

Strategi adalah keseluruhan langkah (kebijakan-kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan. Dalam pernyataan yang lebih tegas lagi yang berkaitan dengan teknik, mereka mengungkapkan bahwa strategi merupakan “perhitungan” mengenai rangkaian kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan. Tentu untuk

keseluruhannya ada metode dan tekniknya. Apabila strategi diartikan sebagai suatu rangkaian kebijakan, menjadi penting untuk mengetahui cara atau teknik tentang perumusan kebijakan.

Pendapat lain mengenai strategi menurut Suryono (2004:80) pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijaksanaan Pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu: tujuan (*ends*), sarana (*means*) dan cara (*ways*). Untuk menetapkan sasaran strategis digunakan metode SMART (sebagai singkatan dari *spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timed*). Oleh karena itu strategi perlu didukung oleh suatu kemampuan (*capability*) untuk mengantisipasi kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang ada.

### **1. Strategi Perencanaan Wilayah**

Dalam melakukan pembangunan daerah dibutuhkannya suatu perencanaan yang matang, dalam proses perencanaan ini terdapat beberapa strategi yang dibutuhkan. Perencanaan ini dibutuhkan untuk menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah. Berikut ini, terdapat dua paradigma pembangunan, yaitu *Urban Oriented paradigm* (UOP) dan *Rurban Oriented Development Paradigm* (ROP). Dari kedua paradigma tersebut, perencanaan daerah akan mengarahkan wilayah pada kedua model diatas. Strategi dalam melakukan perencanaan daerah terdiri dari beberapa tahap, tahap pertama untuk melakukan pembangunan daerah dibutuhkannya pengenalan wilayah perencanaan, setelah mengenali wilayah yang akan dibangun maka tahap kedua adalah menganalisis situasi wilayah, dan tahap berikutnya adalah tahap zonasi lahan.

Dalam pengenalan wilayah diharapkan mampu mengetahui tentang potensi dan masalah di suatu wilayah, mengetahui profil wilayah yang ada di wilayah setempat, memahami model dan arah pembangunan wilayah, dan sampai sejauh mana proses pembangunan oleh pemerintah



daerah dilakukan, dari kesemua aspek diatas sangat penting untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik dan cocok untuk masyarakat sekitar.

Dalam pengenalan wilayah terdiri dari beberapa cara, yaitu: Pemahaman Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal/ RDA*), Identifikasi Kebijakan Pembangunan, Profil Wilayah dan Sumber-Keuangan.

Pemahaman wilayah secara cepat atau *Rapid District Appraisal (RDA)* menurut Riyadi (2003:31) dikutip dari Chambers (1981) memiliki prinsip dasar yang yaitu:

a. *Optimal ignorance* (Ketidakpedulian Optimal)

Prinsip ini merujuk pada pentingnya mengetahui apa yang tidak perlu diketahui. Disamping itu diperlukannya juga kualitas perencana yang baik meliputi informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan agar dapat melakukan penilaian secara tepat. Hal dimaksudkan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi di lapangan sehingga dari segi waktu dan biaya dapat dihemat, dan informasi yang relevan dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

b. *Propotionate accuracy* (Ketepatan Proposional)

Prinsip ini merujuk pada tingkat ketepatan yang benar-benar diperlukan. Pencarian data dan informasi dalam metoda *rapid appraisal* ini lebih difokuskan pada variabel-variabel inti yang dinilai, sehingga dari segi waktu dan biaya akan lebih efektif. Teknik penelitian yang dilakukan dalam *rapid appraisal* ini bersifat dialog interaktif dan partisipatif yang dilakukan dengan berbagai unsur dikalangan masyarakat daerah perencanaan. Dalam melaksanakan *rapid appraisal*, melakukan dialog dengan masyarakat merupakan strategi yang sangat dianjurkan.

Dalam melakukan RDA terdapat beberapa alat yang harus digunakan yaitu peta wilayah, perjalanan eksprolatif, dan kalender musim. Selain ketiga alat tersebut ada juga alat tambahan yang diperlukan yaitu: data potensi wilayah atau desa, laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan disuatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu, dan data-data tentang sumber pendapatan daerah, dan sebagainya. Untuk melakukan RDA diperlukannya sumber-sumber data sekunder (dokumen resmi) dan data primer (hasil kunjungan lapangan), dari gabungan antara kedua sumber data tersebut dapat dirumuskan suatu hasil RDA yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (Riyadi, 2003:34):

1) *Service Centers* (Pusat-Pusat Pelayanan)



Berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan yang ada disuatu wilayah, dapat dikemukakan data-data penting yang diperlukan sebagai bahan untuk merumuskan perencanaan pembangunan wilayah. adapun data tersebut dapat berupa gambaran tentang lokasi pusat-pusat pelayanan, baik yang bersifat *publik sector*, seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan sebagainya. Kemudian juga dapat digambarkan ratio pusat-pusat pelayanan dengan jumlah penduduk, sehingga dapat diperkirakan tingkat aksesibilitasnya. Gambaran potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu wilayah juga dapat menjadi bahan yang diperlukan dalam rangka merumuskan PPD dan sebagainya.

2) *Market Town* (Pusat-Pusat Pasar)

Dalam konteks ini, akan diketahui sistem perekonomian penduduk dengan berbagi aktivitas perekonomiannya, tingkat aksesibilitas pusat-pusat perekonomian penduduk suatu wilayah atau sebaliknya. Sarana pasarana penunjang aktivitas perekonomian, seperti transportasi, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern dapat juga digambarkan disini.

3) *Regional Centers*

Dalam hal ini dikemukakan tentang data-data dan informasi yang menyangkut hubungan suatu daerah dengan daerah lainnya, yang dimungkinkan dengan pemanfaatan sarana prasarana yang menunjang hubungan perdagangan yang lebih luas, dan sebagainya. Pusat-pusat pelayanan yang ada didaerah-daerah lain dan memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi dan aktivitas masyarakat perlu diperhitungkan. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki data-data dari wilayah-wilayah disekitarnya.

Selain RDA ada juga metode lain yang ruang lingkupnya lebih sempit yaitu *Rapid Rural Appraisal/ RRA* dan *Rapid Settlement Analysis/ RSA*. Dua metode itu tidak jauh berbeda dengan konsep RDA. RRA merupakan metode yang digunakan untuk mengenal ruang, situasi dan kondisi, sosio-ekonomi, karakteristik dan sebagainya di wilayah pedesaan. Sedangkan RSA menurut Riyadi (2003:32) adalah

RSA merupakan suatu metoda yang secara spesifik memusatkan kegiatannya pada analisis suatu sistem pemukiman yang dikembangkan didalam suatu wilayah perencanaan, mulai dari tingkat terendah (desa) sampai pada tingkat tertinggi (kab/kota) dikaitkan dengan pola penataan fungsi-fungsi pelayanan di daerah tersebut. Melalui RSA ini kita akan mengetahu sistem dan pola pemukiman yang ada di suatu wilayah, baik yang menyangkut distribusinya, struktur dan fungsinya, maupun kontribusinya terhadap pembangunan dan penataan suatu wilayah.

Setelah mengenali wilayah pembangunan, maka strategi kedua adalah dengan menganalisis situasi. Dengan adanya analisis situasi wilayah perencanaan diharapkan mampu menganalisis masalah dan potensi yang nantinya akan tergambarkan dalam "*frame condition*" (gambaran mengenai kondisi wilayah). Dalam *frame condition* terdapat gambaran wilayah mengenai

masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi alasan wilayah tersebut harus dikembangkan, potensi yang ada sesuai dengan keadaan wilayahnya, gambaran penduduk yang nantinya merupakan sasaran dari proses pembangunan wilayah, dan yang terakhir adalah target yang ingin dicapai dari proses pembangun tersebut.

Dalam melakukan analisis wilayah terdapat beberapa tahapan atau cara yang harus dilakukan, yaitu (Riyadi, 2003:35):

- a. Penetapan lokasi wilayah konsentrasi pengembangan  
Wilayah konsentrasi pengembangan adalah suatu wilayah tertentu yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Bappeda sebagai lokasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) untuk jangka waktu tertentu dimana berbagai proyek kegiatan dari berbagai sumber dana akan dikerahkan dan dilaksanakan secara terpadu di lokasi tersebut. Penetapan wilayah konsentrasi pengembangan ini harus dilakukan melalui proses analisis situasi wilayah yang mendalam.
- b. Penetapan Kelompok Sasaran  
Setelah lokasi PPWT diterapkan, selanjutnya ditentukan kelompok-kelompok sasaran (*target group*) yang akan menerima manfaat langsung hasil-hasil pembangunan.
- c. Penetapan Kebutuhan Program  
Untuk memecahkan masalah dan menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, ditetapkanlah kebutuhan program/ proyek. Kebutuhan program/ proyek ini bersifat menyeluruh yang didasarkan pada hasil analisis yang mendalam, sehingga program-program yang akan diimplementasikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai *target group* dari program-program tersebut.

Strategi terakhir dalam perencanaan wilayah adalah tahap zonasi lahan, dimana dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang penggunaan utama lahannya yang diperbolehkan adalah penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan untuk mendukung maksud-maksud penggunaannya secara berkelanjutan dan sejalan dengan praktek pengelolaan lahan yang benar serta sesuai dengan rumusan kebijakan penggunaannya, untuk memenuhi pembangunan dan pelestariannya (Riyadi, 2003:36). Adapun tujuan dari zonasi lahan adalah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan karakter yang dimiliki oleh suatu wilayah. Sehingga tidak adanya pemaksaan pembangunan yang terjadi. Karena dalam RTRW sudah ditentukan model pembangunan sesuai dengan fungsi lahan wilayahnya. Selain itu, dengan adanya zonasi lahan



diharapkan lahan yang digunakan dapat terus terkendali dan terjamin kelestariannya. Sehingga zonasi lahan bertujuan untuk mengelompokkan lahan yang mempunyai kemampuan yang sama (kesamaan dalam persyaratan pengelolaannya) dalam rangka menyusun pedoman penggunaan lahan tersebut (Riyadi, 2003:38).

## 2. Strategi Pengembangan Wilayah

### a. Paradigma Teknis- Kemasyarakatan (Community Technical Paradigm)

Menurut Yunus (2005:209) didalam pembangunan pada umumnya dikenal ada dua macam paradigma pembangunan yang kebanyakan dianut, yaitu: (1) paradigma keteknikan (*technical paradigm*) dan (2) paradigma kemasyaraatan (*community paradigm*). Paradigma keteknikan mengambil penekanan pada metode ilmiah sebagai cara yang paling objektif dan rasional untuk menampilkan informasi bagi para pemegang keputusan dalam upaya pengembangan wilayah dimana harus ada parameter yang jelas dan terukur. Informasi yang dijadikan dasar dalam pengembangan haruslah bersifat ilmiah, dan kuantitatif, dan bersifat bebas nilai.

Sedangkan dalam paradigma kemasyarakatan (*community paradigm*) menekankan pada kondisi masyarakat yang diantaranta termasuk keinginan, kebutuhan, nilai-nilai yang ada, dan kebiasaan masyarakat yang nantinya akan berpotensi mengalami dampak dari hasil pengembangan wilayah itu sendiri. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kegiatan dan proses pengembangan. Peran masyarakat disini sebagai perencana yang menentukan arah pengembangan wilayah, implementasi dari perencanaan itu, dan sebagai pengawas pengembangan yang dilakukan. Sehingga pengembangan itu akan terkonsep sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemampuan untuk memahami nilai-nilai sosial pada masyarakat sangat penting agar dalam melakukan pengembangan tidak terjadi masalah sosial,



budaya, agama, dan psikologis. Tujuan pengembangan itu sendiri dilakukan agar menciptakan kemudahan bagi para warga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan paradigma diatas (paradigma keteknikan dan paradigma kemasyarakatan) pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka dari itu berikut akan memaparkan sifat-sifat khusus dari dua paradigma itu:

Tabel 2 Ciri-ciri Paradigma Teknis dan Paradigma Kemasyarakatan

Pembeda	Paradigma Teknis	Paradigma Kemasyarakatan
Penekanan analisis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economic oriented</li> <li>2. Product oriented</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Community oriented</li> <li>2. Proses dan pengembangan masyarakat</li> </ol>
Landasan teori yang digunakan	Positivism (serba terukur dan eksak)	Teori kritis (menyesuaikan pada nilai sosio-kultural yang berkembang di masyarakat)
Proses pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggap sebagai proses yang obyektif</li> <li>2. Masyarakat dianggap sebagai obyek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dianggap sebagai proses yang subyektif dan pencerminan nilai yang ada dalam masyarakat</li> <li>4. 2. Masyarakat dianggap sebagai subyek</li> </ol>
Faktor determinan	Bukti-bukti, ilmiah, terukur,	Nilai-nilai dan norma

	eksak, dan obyektif	kualitatif yang mempunyai rentangan nilai yang tidak menentu
Dominasi penentuan orientasi pembangunan	Para pakar berperan dominan dan masyarakat berperan sedikit	Para pakar berperan sedikit namun mensintesis nilai dan norma hasil penelitian dan masyarakat berperan dominan
Pendekatan pembangunan	Teknologi sebagai cara utama menanggulangi masalah lingkungan	Pendekatan masyarakat dan teknologi tepat guna sbagai cara penanggulangan masalah lingkungan
Isu pembangunan	Dipandang sebagai masalah teknis yang tidak fleksibel	Dipandang sebagai masalah strategi sosial dan perancangan alternatif yang fleksibel
Landasan berfikir	Metode yang standar ( <i>standardizedmethode</i> )	Konteks budaya sosial dan sejarah ( <i>temporal and historical dimension</i> )

Sumber: Yunus, 2005:211

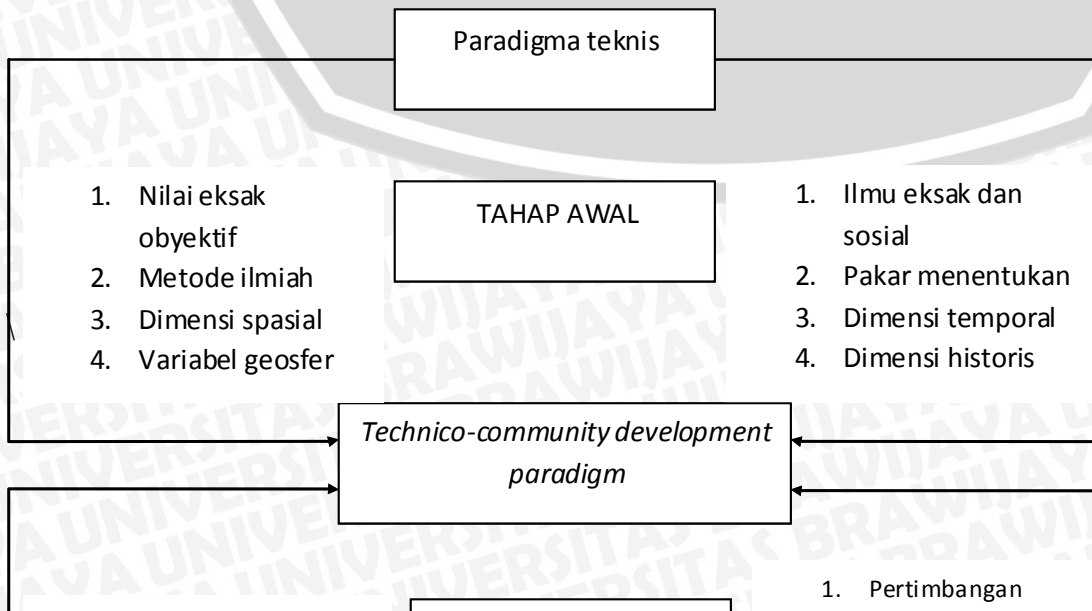
Dalam tabel tersebut telah terlihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, pengambilan satu paradigma saja dapat memberikan dampak negatif, untuk itu dilakukannya penggabungan menjadi *technico-community development paradigm*, yang berarti penggabungan paradigma

pengembangan wilayah menjadi satu antara paradigma teknis dan paradigma pengembangan masyarakat. Dalam pelaksanaannya bisa saja pengembangan teknis dilakukan diawal pengembangan dan paradigma pengembangan masyarakat dilakukan diakhir pengembangan.

Dalam mengatasi kelemahan dari masing-masing paradigma dibutuhkannya pengakomodasian antara kedua paradigma tersebut yang nantinya akan mlahirkan paraigma pengembangan wilayah baru yang cocok dengan kondisi sosio-kutural wilayah yang akan dikembangkan. Gambar berikut akan menerangkan penggabungan pada tahan analisis yang didalamnya terdapat nilai-nilai masyarakat tetapi dibungkus secara ilmiah dan apat dipertanggung jawabkan.

Gambar dibawah akan menjelaskan mengenai penggabungan paradigma teknis dan pengembangan masyarakat. Dimana paradigma teknis merupakan tahap awal dimana terdiri dari: nilai eksak obyektif, metode ilmiah, dimensi spasial, variabel geosfer, ilmu eksak dan sosial, pakar menentukan, dimensi temporal, dan dimensi historis. Sedangkan paradigma pengembangan masyarakat merupakan tahap analisis, terdiri dari: masyarakat sebagai obyek, teknologi tepat guna, pertimbangan sosial kemasyarakatan, nilai sosio kultural, norma sosio kultural. Jika digabungkan kedua paradigma itu menjadi paradigma baru, yaitu: *Technico-community development paradigm*.

Gambar 1 Penggabungan Paradigma Teknis dan Pengembangan masyarakat





Sumber: Yunus (2005:213)

### **b. Pendekatan Kompleks Wilayah (*Regional Complex Approach*)**

Pendekatan ini dikembangkan melalui kajian Geografi, pendekatan ini tergabung dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan spasial (*spatial approach*) dan pendekatan ekologis (*ecology approach*). Pendekatan spasial adalah suatu pendekatan yang menerangkan mengenai fenomena geosfer melalui ruang sebagai media untuk dianalisis. Nama lain pendekatan ini adalah pendekatan horisontal, karena pendekatan ini berisi mengenai atau menekankan pada sebaran, pola, struktur, organisasi, proses tendensi, asosiasi, interaksi elemen-elemen geosfer di permukaan bumi.

Selain pendekatan spasial, pendekatan lain yang harus dikaji dalam pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan ekologi. Tentu sekarang banyak isu-isu mengenai ekologi, dimana banyak pembangunan yang tidak begitu memperhatikan aspek ekologi. Perbedaan antara pendekatan spasial dan pendekatan ekologi menurut (Yunus, 2005:215) adalah sebagai berikut:

Kalau dalam pendekatan spasial, penekanan analisis adalah perbandingan kekhasan lokasional ruang, maka dalam pendekatan ekologis pendekatan utamanya adalah mengelaborasi secara lebih intens tentang keterkaitan elemen-elemen lingkungan dengan makhluk hidup atau aspek-aspek kehidupan. Oleh karena dalam hal ini, manusia menjadi *focus of analysis* maka analisisnya lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk berbudaya dan berbagai aspek kehidupannya.

Mempelajari manusia tidak hanya terbatas dalam memahami mengenai kondisi fisiknya saja tetapi juga memahami bagaimana manusia sebagai sosok yang memiliki sentuhan daya cipta, daya rasa, daya karsa yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Setiap perbuatan tidak hanya mengandalkan naluri dan insting saja tetapi juga terdapat *intellectual intelligence*, *emosional intelligence*, dan *spiritual intelligence*. Pendekatan kompleks wilayah didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai keberadaan suatu wilayah sebagai suatu sistem, dimana didalamnya terdapat banyak sekali sub sistem dan didalamnya terdapat banyak sekali elemen-elemen wilayah yang saling berkaitan (Yunus, 2005:216).

### c. Sinergisme Spasial (*Spatial Sinergism*)

Konsep ini bukan merupakan konsep baru dalam pengembangan wilayah, konsep ini sudah banyak dikenal dan dipakai. Ide dalam konsep ini adalah melihat potensi yang di miliki oleh suatu wilayah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kemudahan fasilitas bagi masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah banyak terjadi kesalah pahaman, dimana dalam otoda penda berwenang mengatur daerahnya, maka mereka memproses potensi wilayahnya sendiri, hal ini merupakan kerugian, karena dimasa globalisasi sekarang, suatu wilayah tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa tergantung wilayah lain. Sehingga dari sini, dalam mengembangkan wilayah diperlukannya kerjasama antar daerah. Kerjasama saling menguntungkan yang dibangun dapat meliputi dua, tiga, atau lebih wilayah tergantung daripada konsesus yang disepakati antar wilayah. Masing-masing wilayah mempunyai pertimbangannya sendiri-sendiri. Skala wilayah yang diciptakan dapat meliputi: skala wilayah lokal, regional, maupun nasional (Yunus, 2005:218). Kekurang dalam konsep ini menurut Yunus (2005:219) adalah sebagai berikut:

.....Namun sayangnya konsep sinergisme spasial tersebut tidak banyak menimbulkan dampak positif dibidang ekonomi atau bahkan tidak nampak sama sekali. Penyebab utamanya adalah tidak adanya konsep yang jelas mengenai visi yang harus dicapai dan



misi yang harus dilaksanakan oleh beberapa wilayah yang bergabung dalam konsep sinergisme spasial tersebut dan kebanyakan penciptaan istilah hanyalah latah saja.

Sinergisme spasial diharapkan mampu menciptakan sinergitas yang baik di antara beberapa wilayah yang saling bekerjasama, sehingga dapat menciptakan hasil yang baik dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing. Diharapkan dalam kerjasama itu tidak terjadi *conflict interest* yang dapat merugikan wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu tujuan akhir dari manajemen spasial adalah tatanan ruang yang tidak bertentangan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, maka masing-masing daerah dalam segala level harus memahami visi tersebut, sehingga pelaksanaan manajemen spasial dapat terlaksana dengan baik (Yunus, 2005:221).

Sinergisme spasial dapat dilaksanakan dalam jenjang horizontal maupun vertikal. Sinergisme horizontal terjadi antara wilayah yang memiliki jenjang yang sama dalam suatu daerah, bisa antar kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi yang memiliki ranking yang sama. Sedangkan sinergisme spasial yang bersifat vertikal dilakukan antar daerah atau wilayah yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam jenjang kewilayahannya.

#### **d. Sinergisme Fungsional (*Functional Sinergism*)**

Seperti halnya dengan sinergisme spasial, sinergisme fungsional mempunyai tujuan yang optimal dalam mengembangkan wilayah apabila bekerjasama dengan wilayah lain, dibandingkan dengan mengolah sendiri potensi wilayahnya. Berikut akan dipaparkan perbedaan antara sinergisme spasial dan fungsional menurut (Yunus, 2005:222)

Kalau dalam sinergisme spasial penekanan penggabungan adalah ruang/ wilayah/ daerah, maka dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya. Pada sinergisme spasial melibatkan berbagai ruang yang berbeda-beda, maka dalam sinergisme fungsional dapat melibatkan berbagai ruang yang berbeda maupun ruang yang sama namun berbagai fungsi atau kegiatan yang bervariasi.



Sinergisme dalam ruang yang sama harus ditekankan pada pembagian tugas dan wewenang agar pengembangan wilayah yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, tanpa ada permasalahan dan tugas yang tumpang tindih antara para *stakeholder*. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada halangan yang berupa keterbatasan dana, waktu, dan sumber daya, tapi apabila *job descriptions* telah dibagi secara jelas, maka tujuan yang akan didapatkan akan sama.

Sinergisme fungsional dapat dilakukan dengan wilayah yang sama. Satu hal yang perlu dapat mendapat perhatian yang lebih adalah saat formulasi sinergisme yang akan dilaksanakan. Kebanyakan apabila terdapat kerjasama antar sektor wilayah, biasanya mendapatkan ketidakjelasan dalam perumusan visi dan pelaksanaan visi antar badan yang bersangkutan, sehingga tidak didaptnkannya keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pengembangan wilayah. Perlu diingat dari dua sinergi, yaitu sinergi spasial dan fungsional adalah bukan merupakan kerjasama yang biasa, tetapi suatu kerjasama yang akan menghasilkan nilai yang lebih besar dan lebih berguna dibandingkan dengan hasil yang dicapai apabila dikelola sendiri.

## **C. Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang menjadi fokus dan tujuan dari Administrasi Publik tampaknya masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Harus diakui, bahwa pelayanan yang ada sekarang ini terus mengalami perubahan dan pembaharuan, baik dari segi format dan paradigma yang muncul. Meskipun pelayanan publik terus berkembang tapi tetap saja dirasa belum maksimal dan menyeluruh. Apalagi dengan

tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah agar dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Arti pelayanan publik secara konseptual menurut Kotler dalam Lukman (2000:8) adalah pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Kurniawan (2005:4) pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pelayanan publik, menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Kedua, Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Ketiga, Mutu, proses, dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dengan demikian pelayanan publik berarti segala sesuatu bentuk pemenuhan keinginan masyarakat yang bersifat umum yang diselenggarakan oleh negara. Negara berdiri dan diakui tentu saja karena keberadaan masyarakat, sehingga masyarakat menginginkan pelayanan yang berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya, biasanya dalam bentuk barang dan jasa. Kebutuhan disini tidak hanya kebutuhan yang bersifat pribadi, walaupun memang hal itu juga diperlukan, tetapi lebih pada kebutuhan yang bersifat umum dan untuk masyarakat luas (kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

## 2. Barang Publik

Penyediaan *service* dan barang publik merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah. Menurut Sadyohutomo (2008:10-11) karakteristik barang publik adalah sebagai berikut:

1. *Nonexcludable*, yaitu manfaat dari barang publik tidak khusus untuk seseorang atau kelompok masyarakat yang terbatas, tetapi untuk masyarakat secara luas. Seseorang atau kelompok orang akan sulit untuk menghalangi orang lain mengakses barang publik, kecuali dengan biaya yang sangat mahal atau dengan cara yang tidak rasional. Contohnya, secara pribadi tidak bisa melarang orang masuk ke ruang publik (taman, jalan umum, dan sebagainya), kecuali dengan cara-cara ilegal
2. *Nonrivalrous*, yang pada batas tertentu tingkat konsumsi dari seseorang terhadap barang publik tidak mempengaruhi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang publik yang sama. Dalam menggunakan barang publik disini tidak atau belum terjadi persaingan. Hal ini disebabkan karena jumlah barang publik tersedia melimpah, dimana jumlah yang dikonsumsi pihak lain tidak mempengaruhi biaya yang telah diperlukan untuk memproduksi atau membuat barang tersebut. Dengan kata lain, sekali barang publik dibuat maka tambahan biaya untuk setiap penambahan orang yang menggunakannya adalah nol (*marginal production cost=0*). Contoh: jalan raya yang dibangun dengan dana 1 milyar rupiah dilewati mobil satu, dua, tiga, atau berapapun sampai batas tertentu, biayanya tidak bertambah, yaitu tetap 1 milyar rupiah.

Jika barang publik mempunyai sifat atau karakter seperti dua point diatas, maka dapat dikatakan barang tersebut merupakan barang publik murni. Tetapi, tidak semua barang publik



sama dengan barang publik murni. Seperti jika barang *nonexcludable* pada pemakaiannya terjadi persaingan atau diperebutkan dengan individu lain maka dapat digolongkan menjadi barang publik dengan biaya tambahan. Sedangkan jika barang publik yang mempunyai sifat *nonrivalrous*, tetapi dalam pemakaiannya menjadi *excludable*, maka dikatakan sebagai barang *excludable*. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3 Pengelompokan Barang Pribadi dan Barang Publik

	<i>Excludable</i>	<i>Nonexcludable</i>
<i>Rivalrous</i>	Barang pribadi	Barang publik dengan tambahan biaya, misalnya jalan raya padat kendaraan, udara pada daerah padat aktivitas.
<i>Nonrivalrous</i>	Barang publik <i>excludable</i> , misalnya TV kabel, jaringan telepon, dan jaringan listrik dengan kapasitas yang tersedia masih besar.	Barang publik murni, misalnya siaran TV, siaran radio, jalan raya dengan kepadatan rendah, dan udara pada daerah aktivitas rendah.

Sumber: Sayohutomo (2008:11)

### 3. Kualitas Pelayanan

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas servis yang diberikan pemerintah. Menurut Poltak Sinambela (2011:6) untuk mencapai tujuan itu dibutuhkannya kualitas pelayanan prima yang bercirikan:

- Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti,
- Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas,
- Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat,

- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya, suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain,
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Sebagaimana dikemukakan Lovelock (dalam Widodo, 2001:272), bahwa lima prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai meliputi: Pertama, *Tangible (terjamah)*, seperti kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunikasi material. Kedua, *Reliable (handal)*, kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan. Ketiga, *Responsiveness (pertanggungjawaban)*, yakni rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. Keempat, *Assurance (jaminan)*, yakni pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. Kelima, *Empathy (empati)*, yakni perhatian perorangan pada pelanggan.

Kata kualitas dapat bermakna macam-macam dan bervariasi, biasanya digolongkan dengan definisi yang konvensional dan definisi strategis. Definisi konvensional menurut Poltak Sinambela (2011:6) biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*ease of use*), estetika (*esthetic*), dsb. Sedangkan dalam definisi strategis peneliti menggambarkan bahwa kualitas itu berarti segala aspek yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya kualitas itu sendiri mengacu pada beberapa pengertian pokok seperti: kualitas terdiri dari keistimewaan layanan yang diberikan baik itu langsung maupun atraktif, sehingga masyarakat terkesan atas keistimewaan yang diberikan. Selanjutnya kualitas terdiri dari terbebasnya segala sesuatu yang mengurangi nilai dari pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat sangat terpuaskan sekali dengan pelayanan itu.



#### **D. Hubungan Pengembangan Wilayah dengan Pelayanan Publik**

Seperti yang diketahui bahwa pengembangan wilayah dan pelayanan publik adalah salah satu tugas penting dari pemerintah. Mengapa kedua hal tersebut patut dihubungkan? Jika melihat daerah yang kurang maju, maka akan berfikir bahwa wilayah itu memiliki akses yang sulit, potensi wilayahnya kurang diasah, bisa juga karena wilayah itu tidak memiliki kemudahan dalam penyediaan fasilitas sehari-hari, fasilitas yang bersifat pokok. Misalnya saja dalam penyediaan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Maka agar hal tersebut tidak terjadi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan resmi perlu mencari solusi. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat tanpa terkecuali. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan kemudahan fasilitas yang sama, untuk itu perlu diadakan pengembangan wilayah. Pelayanan itu tidak maksimal karena adanya ketimpangan pembangunan wilayah. Salah satu contoh apabila kota A lebih maju dari kota B. Maka pembangunan yang dilakukan secara maksimal terjadi di Kota A. Kota B memang tidak dapat disebut sebagai wilayah yang terbelakang, tapi akses dan fasilitas yang diberikan untuk kemudahan masyarakat setempat kurang. Untuk itu agar pembangunan dapat berjalan dengan merata perlu dilakukannya pengembangan wilayah, agar wilayah yang tadinya kurang maju, dapat menyaingi wilayah yang sudah maju, minimal pelayanan yang ada sudah lebih lengkap.

Pemahaman terhadap pola wilayah juga dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan keputusan-keputusan pembangunan melalui proses pengembangan wilayah *hinterland* yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan mempertimbangkan tingkat distribusi dan kontribusi penduduk dalam suatu wilayah, khususnya yang terkait dengan masalah fungsi-fungsi pelayanan (fasilitas perkotaan, sistem transportasi, sistem prasarana, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau)

Dalam membicarakan pengembangan wilayah, perlunya dilibatkannya peran dari sebuah kota, karena wilayah itu sendiri merupakan bagian dari suatu kota. Disini, kota memiliki peran dan fungsi terhadap wilayahnya. Kota pada dasarnya merupakan pusat berbagai kegiatan masyarakat pada ruang lingkup wilayah yang lebih besar. Telah banyak diterangkan oleh beberapa literatur yang ada, bahwa peranan kota yang utama adalah sebagai pusat industri manufaktur atau pusat kegiatan pelayanan publik.

Dalam kedua peranan utama dari kota tersebut Kustiwan (2009:139) mengutip dari B.Tjahjati S. Soegijoko (2005) menggambarkan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami kota sebagai pusat industri manufaktur, perlu diketahui bahwa industri manufaktur dapat menghasilkan *durable goods* seperti mesin-mesin, peralatan listrik, produk-produk metal, kendaraan bermotor, produk-produk kayu, batu, gelas, dan sebagainya. Juga menghasilkan bahan-bahan *non-durable goods* seperti bahan-bahan kimia, makanan- minuman, persetakan, kertas, tekstil, bahan pakaian, tembakau, dan sebagainya. Jenis yang pertama mempunyai waktu pemanfaatan yang lebih lama, sedangkan jenis yang kedua masa pemanfaatannya lebih singkat. Masing-masing jenis industri manufaktur mempunyai pola lokasi tertentu dalam sistem perkotaan karena memiliki persyaratan-persyaratan lokasi yang berbeda, walaupun keduanya menganut teori *least cost* dalam memilih lokasinya, yaitu untuk transportasi atau produksi dan pemasarannya.. keterkaitan untuk kota-kota sebagai pusat manufaktur adalah dengan kota-kota atau kawasan yang mendukung proses produksi dari bahan baku sampai barang jadi dan pemasarannya. Transportasi atau jaringan perhubungan merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem kota dengan pusat industri manufaktur sebagai simpul-simpul utamanya.
2. Kota dapat pula berfungsi sebagai pusat kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan ini biasanya memberikan kontribusi terbesar dan meningkat pada GNP. Aktivitas pelayanan ini (*tertiaryactivities*) dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yakni:
  - a) Pelayanan konsumen yang meliputi kegiatan distribusi seperti perdagangan grosir, eceran, hiburan, dan rekreasi (hotel dan restoran), serta pelayanan pribadi (salon, spa, dan sebagainya).
  - b) Pelayanan produksi yang menyediakan input atau terkait dengan aktivitas ekonomi lain seagai bagian dari suatu proses produksi. Contohnya: transportasi, komunikasi, utilitas (listrik, air, gas), jasa keuangan (advertensi, penyediaan tenaga kerja, jasa-jasa konsultan, dan sebagainya).
  - c) Pelayanan publik dan pemerintahan yang sebagian besar disediakan oleh dana-dana publik. Contohnya administrasi publik, yaitu upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan pembangunan, penanggulangan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya.



Dari uraian diatas, mengetahui peran penting dari suatu kota, salah satunya menyediakan pelayanan publik. Walaupun kota memiliki peran untuk menyediakan industri manufaktur, tetapi hal tersebut juga tidak terlepas dari elemen pelayanan publik. Jika melihat pelayanan publik dalam suatu wilayah, maka mencakup sarana prasarana pada daerah perkotaan. Sudah diketahui bahwa daya tarik dari suatu kota sangatlah tinggi karena didalamnya menyediakan kesempatan kerja yang luas, pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan, dan menyajikan kemudahan aktifitas yang beragam. Untuk itu dalam buku Adisasmita (2005:110) menyatakan sebagai berikut:

Prasarana perkotaan meliputi jalan/jembatan, air bersih, persampahan, sanitasi, ruang parkir, taman kota, dan sebagainya. Yang termasuk sarana perkotaan adalah terminal, pasar, pemadam kebakaran dan sebagainya. Sedangkan fasilitas pelayanan ekonomi terdiri dari bank, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Dan fasilitas pelayanan sosial misalnya meliputi perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, olah raga, rekreasi, dan sebagainya.

Bila menilik dari gagasan Sutami (era 1970-an) pengembangan wilayah akan terjadi apabila dilakukannya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memanfaatkan potensi wilayah, secara tidak langsung penyediaan pelayanan publik sangat penting dalam mengembangkan wilayah. Demikian juga sebaliknya, adanya pengembangan wilayah itu dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Sehingga kedua elemen itu (pengembangan wilayah dan pelayanan publik) terus saling melengkapi dan membutuhkan.

Pengembangan wilayah merupakan suatu bentuk dari pembangunan daerah, yang secara area lebih luas. Selanjutnya, ada perencanaan daerah yang menjadi dasar dalam mengembangkan wilayah, yaitu dengan berpijak pada RTRW Kota. Dalam RTRW, biasanya terdapat beberapa pembagian wilayah kota, yang dalam bagian tersebut sudah ditentukan model dan fungsi utama dari masing-masing wilayah. Disinilah penentuan objek yang akan dikembangkan dapat dianalisis.



Melanjutkan hal diatas, dalam mengembangkan wilayah berarti terdapat campur tangan pemerintah. Tugas dari pemerintah adalah *me-manage* kota dan wilayah itu sendiri. Menurut Cadwallader (1985) yang dikutip oleh Sadyohutomo (2008:17) peran pemerintah dalam mengelola kota dan mengembangkan wilayah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan *service* dan barang publik (*supplier of public goods and service*).
2. Mengatur dan memfasilitasi (*regulating and facilitating*) berjalannya ekonomi pasar agar terciptanya alokasi sumber daya sebaik-baiknya. Misalnya, menghindari distorsi pasar dengan membuat Undang-Undang *antritrust* atau antimonopoli.
3. Sebagai *social engineering* dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan bangsa dan negara. Alokasi sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi pemerintah berkewajiban mengoreksi ketidakseimbangan sosial ekonomi dan melindungi golongan yang lemah dan minoritas.
4. Sebagai arbiter dalam konflik antar kelompok masyarakat.

Sedangkan tujuan dan sasaran pemerintah dalam melakukan campur tangan pengelolaan kota dan pengembangan wilayah menurut Sadyohutomo (2008:18) adalah sebagai berikut:

1. Penyedia barang publik dan pelayanan publik.
2. Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
3. Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah (khususnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik).
4. Kelestarian lingkungan
5. Menjaga keutuhan bangsa dan negara

Dari peran dan tujuan diatas, faktor pelayanan publik selalu termuat, dan hal itu berarti antara keduanya tidak dapat dipisahkan, atau bisa disimpulkan adanya keterkaitan hubungan antara pelayanan publik dengan manajemen wilayah dan kota. Untuk lebih menguatkan lagi bentuk campur tangan dari pemerintah adalah pembuatan dokumen kebijakan berupa RTRW, yang didalamnya tertuang pengaturan mengenai pemanfaatan ruang, yang terdiri dari: perumahan, industri, jasa, wilayah konservasi dan lindung, pertanian, prasarana umum, selanjutnya terkait dengan penyediaan pelayanan publik (ketertiban dan keamanan, penyediaan prasarana umum, penyediaan utilitas seperti listrik, air, telekomunikasi, dll, dan pelayanan administrasi pemerintahan), dan yang terakhir adalah redistribusi sumber daya.

Setelah diuraikan mengenai bentuk intervensi pemerintah, maka hasil akhir dari semua itu bisa menimbulkan dua dampak, yang pertama adalah, apabila pemerintah berhasil menata ruang kota dan wilayah dengan baik dengan mengikuti peran, tujuan, dan bentuk campur tangan yang telah dijelaskan diparagraf sebelumnya, maka hasil yang didapatkan adalah rasa nyaman bagi masyarakat sekitar, dan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan wilayah. Dampak yang kedua adalah, apabila pemerintah tidak berhasil menata kota dan wilayah tersebut maka efek buruk bagi masyarakat dan daerah sekitarnya akan timbul.

Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam mengelola kota dan pengembangan wilayah selain intervensi pemerintah adalah faktor pengaruh terhadap variasi spasial sentrifugal yang didalamnya terdapatnya enam faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah secara sentrifugal. Faktor-faktor tersebut menurut Yunus (2005:60) mengutip dari (Lee,1979) adalah:

...(a) faktor aksesibilitas (*accessibility*), (b) faktor pelayanan umum (*public service*), (c) karakteristik lahan (*land characteristics*), (d) karakteristik pemilik lahan (*land owners characteristics*), (e) keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur tata guna lahan (*regulatory measures*), dan (f) prakarsa pengembang (*developers initiatives*).

Dari keenam faktor tersebut peneliti menjelaskan dua faktor saja, yaitu faktor aksesibilitas, dan faktor pelayanan umum. “Faktor aksesibilitas disini adalah aksesibilitas fiskal. Aksesibilitas fiskal tidak lain merupakan tingkat kemudahan suatu lokasi dapat dijangkau oleh berbagai lokasi yang lain” (Yunus, 2005:61). Tingkat keberhasilan untuk mengukur faktor aksesibilitas fiskal adalah dengan menilai sarana transportasi di suatu kota atau wilayah, yang nantinya akan berdampak pada kemudahan akses untuk menuju wilayah tersebut. Sarana transportasi disini termasuk merupakan jenis barang publik karena memiliki karakteristik bersifat *nonexcludable* dan *nonrivalrous*. Apabila suatu wilayah mempunyai aksesibilitas fiskal yang tinggi, maka kota dan wilayahnya akan lebih mempunyai daya tarik lebih dibandingkan dengan kota dan wilayah



yang memiliki aksesibilitas fiskal rendah. “Akibatnya adalah bahwa daerah yang mempunyai nilai aksesibilitas fiskal yang tinggi akan mengalami perkembangan fiskal yang lebih intens bila dibandingkan dengan daerah yang mempunyai nilai aksesibilitas fiskal yang rendah” (Yunus, 2005:62).

Selanjutnya adalah faktor pelayanan umum, yang merupakan faktor kunci dari berkembangnya suatu wilayah. Karena dengan makin banyaknya pelayanan umum disuatu kota dan wilayah maka akan tingginya daya tarik penduduk terhadap kota dan wilayah itu. Pelayanan umum disini berarti bermacam-macam dari pendidikan yang nantinya akan membuka usaha baru yaitu jasa pengetikan, internet, rental komputer, perlengkapan bagi yang sekolah, dan masih banyak lagi, dilanjutkan dengan adanya pelayanan di bidang kesehatan, industri, pusat perbelanjaan, stasiun, tempat rekreasi dan olahraga, dan sebagainya. Bayangkan saja apabila semua pelayanan tersebut sudah dimiliki maka akan membuka lebar kemajuan ekonomi, sosial, budaya di suatu kota dan wilayah tersebut.

Dari kedua faktor diatas, pengembangan wilayah akan semakin terasa menjanjikan untuk kemajuan wilayah dan masyarakat sekitar. Pengembangan wilayah dengan didukung pelayanan publik akan menimbulkan *delivering goods and service* yang baik untuk masyarakat. Tetapi tetap tidak melupakan RTRW kota dalam menentukan jenis pembangunan apa yang akan dibangun, karena setiap wilayah sudah ditentukan fungsi dan modelnya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Sugiyono (1997:6) bahwa, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3) bahwa, “Penelitian kualitatif di gunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Dengan kata lain pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Sejalan dengan definisi diatas, Kirk dan Miller dalam (Moelong, 2002) mendefinisikan bahwa: penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada didalamnya.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena pada penelitian kualitatif ini, peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama responden. Walaupun demikian, peneliti tetap menjaga diri bahwa dirinya sedang melakukan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti tetap harus dituntut

untuk cermat, teliti, formal, dan konsisten dengan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan dalam penelitiannya, untuk itulah tingkat objektivitas bagi peneliti harus tetap selalu terjaga dengan cara mencatat data atau fakta (Sudjarwo, 2005).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan tersebut (Ruslan, 2003).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden, yang kemudian dicarikan rujukan teorinya S. Nasion dalam (Sudjarwo, 2001). Pada prinsipnya pendekatan kualitatif ini peneliti harus terjun langsung menjadi partisipan aktif dalam bersama responden. Maka dari itu, penelitian kualitatif ini bertumpu pada suatu fokus yang berperan membatasi studi. Dengan adanya fokus penelitian, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang tidak perlu digunakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk lebih memfokuskan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan hinterland, meliputi:
  - a. Pengenalan wilayah Buring:
    1. Pemahaman Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal/ RDA*)

2. Profil Wilayah
  3. Identifikasi Kebijakan Pembangunan
- b. Analisis Situasi
1. Penetapan lokasi wilayah konsentrasi pengembangan
  2. Penetapan kelompok sasaran
  3. Penetapan kebutuhan program
2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik
- a. Strategi pembangunan wilayah Buring
1. Pendekatan Kompleks Wilayah (Regional Complex Approach)
  2. Sinergisme Fungsional (Functional Sinergism)
- b. Bentuk pelayanan publik di wilayah Buring
1. Pelayanan Transportasi wilayah Buring
  2. Pelayanan utilitas wilayah Buring
  3. Pelayanan ruang terbuka hijau
  4. Pelayanan Sosial Kesehatan dan Pendidikan di Wilayah Buring

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi wilayah Buring sebagai daerah obyek penelitian. wilayah Buring termasuk kedalam Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Buring termasuk dalam wilayah Kota Malang di bagian tenggara dan sedikit di bagian timur. Menurut RTRW Kota Malang kawasan ini mempunyai fungsi utama yaitu perkantoran, terminal, industri dan sarana olahraga. Terdapat perkantoran di daerah Buring, yaitu *Block Office* yang didalamnya terdapat beberapa dinas. Disana juga terdapat arena olahraga, yaitu Gelanggang Olah Raga Ken Arok yang cukup berfasilitas dan terawat. Selain itu ada terminal Hamid Rusdi, dimana angkutan



umum kota seharusnya berkumpul disitu. Di kawasan Malang timur akan banyak terbangun bangunan-bangunan besar yang menjadi sarana publik. Masyarakat Kecamatan Kedungkandang khususnya wilayah Buring, juga tidak bermimpi kawasan yang berada di wilayah Malang timur akan menjadi pusat perhatian pengembangan pembangunan Kota Malang.

Situs yang akan peneliti teliti adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PU, Kecamatan Kedungkandang, dan Dinas Perhubungan.

#### **D. Sumber data dan jenis data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moeloeng, 2002) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan sebagainya. Yang mana nantinya jenis datanya dibagi-bagi lagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Menurut (Marzuki, 2005), data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Penelitian dengan data primer dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan dapat dikurangi (Indriantoro dan Supomo, 1999. Hal.146). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya, yaitu dinas-

dinas yang terkait langsung dari sumbernya, yaitu dinas-dinas yang terkait langsung dengan pengembangan wilayah Hinterland di Malang Timur (Buring).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999. Hal.147). dalam penelitian ini data diperoleh dari arsip-arsip serta laporan-laporan.

### E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan tercapainya pemecahan masalah secara valid dan *reliable*, yang pada gilirannya akan memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan narasumber.

Wawancara digunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, dan perasaan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, serta dapat dilakukan melalui angket atau via telepon (Nawawi, 2005:110-111)

#### 2. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis dengan penelitian, baik dari sumber dokumen, maupun buku-buku, koran, dan majalah.

### 3. Observasi atau pengamatan

Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang sedang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap strategi pengembangan wilayah *hinterland* sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

## F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang penting dalam sebuah penelitian. Instrumen merupakan alat fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lengkap, cermat, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan dengan tujuan agar kegiatan dapat terarah dan sistematis. Yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah:

- a. Peneliti itu sendiri, dimana peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti.
- b. Daftar pertanyaan, dilakukan untuk melakukan wawancara terhadap para nara sumber.
- c. Dokumentasi, dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini

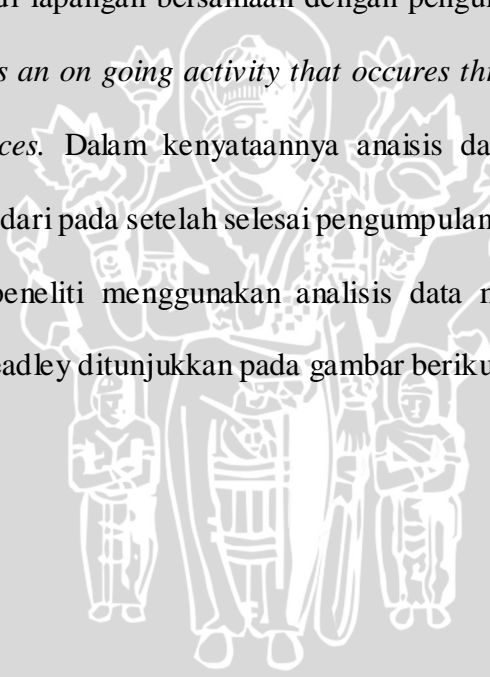


penulis menggunakan lat tulis menulis dan *foto copy* dokumentasi untuk mendapatkan data.

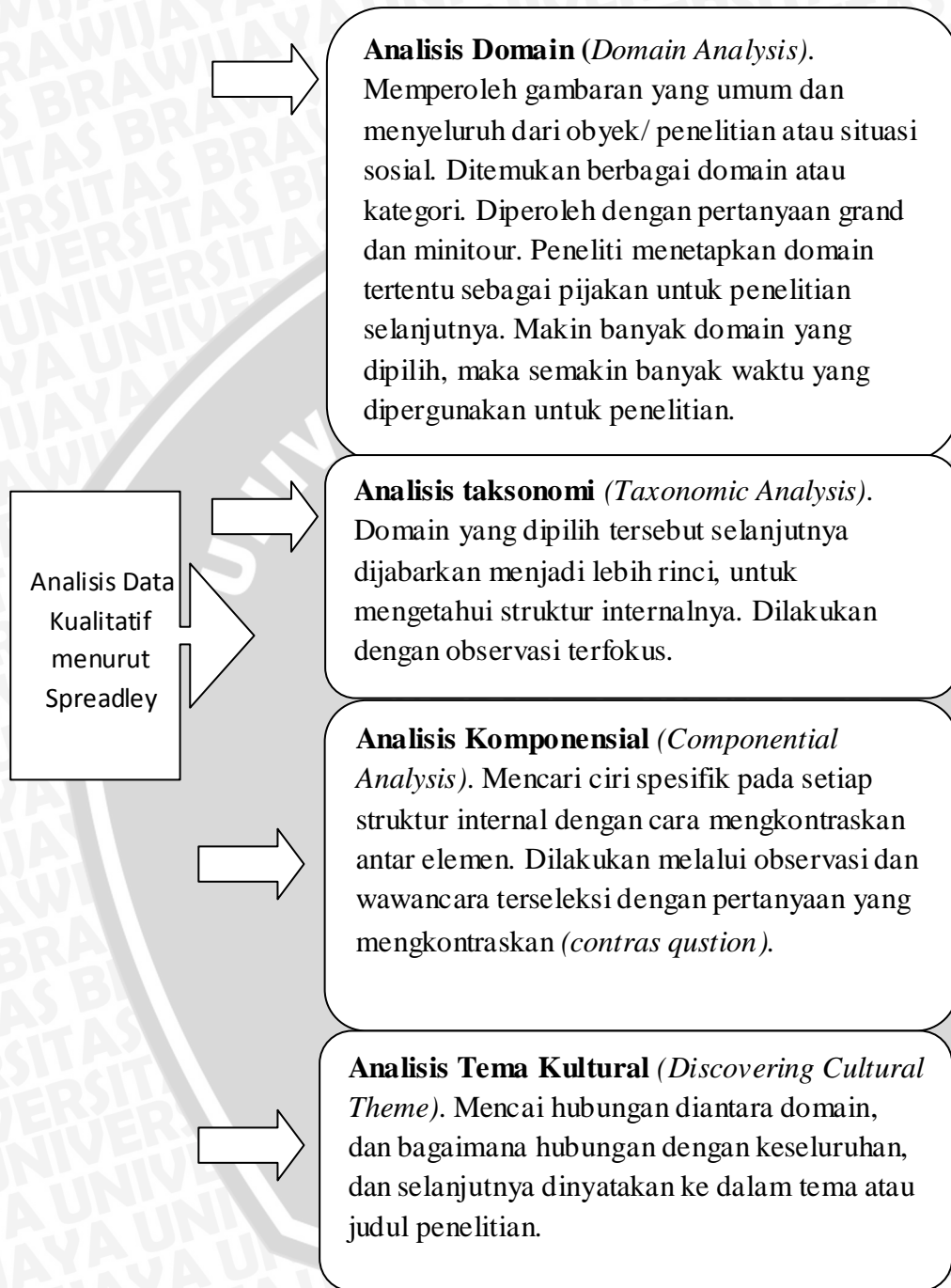
### G. Analisis Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini menyatakan analisis telah mulai sejak meumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact data analysis in qualitative research is an on going activity that occures throughout the investigative procces rather than after procces*. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Spradley. Analisis penelitian kualitatif menurut Spreadley ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2 Analisis Data Model Spradley



Sumber: Sugiyono (2009:255)

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data Umum

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Keadaan Geografis

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Pada Undang-Undang No 4 Tahun 2011 Pasal 19 kategori Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Orde IIA Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri.

Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja. Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan (Web Dinas Ciptakarya-PU, 2014).



Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut (Web Dinas Ciptakarya-PU, 2014):

1. Batas Utara : Kabupaten Malang
2. Batas Selatan : Kabupaten Malang
3. Batas Timur : Kabupaten Malang
4. Batas Barat : Kabupaten Malang

#### b. Visi Misi

Perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud, visi Kota Malang adalah sebagai berikut (Malang Kota, 2014):

#### **"MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT"**

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BER**sih, **Mak**mur, **Adil**, **Religius**-toleran, **Terkemuka**, **Aman**, **Berbudaya**, **Asri**, dan **Terdidik**.

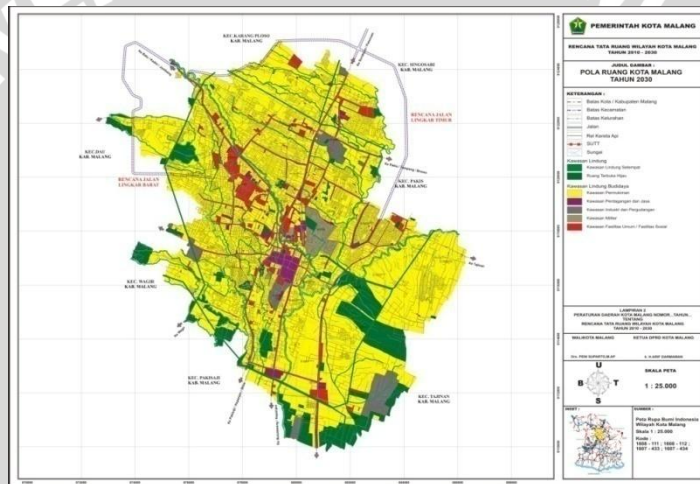
Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut (Malang Kota, 2014):

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran, dan setara. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil. (Visi: adil, berbudaya, bersih)
3. Mengembangkan potensi daerah yang berwaawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. (Visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik)
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global. (Visi: terkemuka, terdidik)
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. (Visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)
6. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya. (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)
7. Mendorong pelaku sektor ekonomi informal agar lebih produktif dan kompetitif. (Visi: adil, terkemuka, makmur)
8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)
9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka)

### c. Program Pembangunan Kota Malang

Pada website Kota Malang (2014) RPJMD Kota Malang disusun sebagai penjabaran dari VISI, MISI Kota Malang, serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Adapun pola ruang kota malang yang nanti pembangunan di Kota Malang akan menjadi seperti pada gambar dibawah:

Gambar 3 Pola Ruang Kota Malang Tahun 2030



Sumber: Bappeda, 2013

Dari gambar diatas, warna hijau diidentifikasi sebagai kawasan lindung dan ruang terbuka hijau. Warna kuning pembangunan akan diarahkan kepada kawasan permukiman (lihat gambar 3). Untuk warna ungu diperuntukkan bagi kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan warna abu-abu tua untuk kawasan industri dan pergudangan. Selanjutnya untuk warna abu-abu muda diperuntukkan bagi kawasan militer, dan yang terakhir pada warna merah dipergunakan sebagai kawasan fsilitas umum atau fasilitas sosial.



Mengacu pada MISI Kota Malang 2009-2013 dapat dijabarkan Program Pembangunan Kota Malang 2009 - 2013 sebagai berikut :

**1. Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan Berkualitas.**

- Peningkatan mutu tenaga kependidikan;
- Peningkatan mutu manajemen pendidikan;
- Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan;
- Pemerataan fasilitas pendidikan;
- Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS);
- Peningkatan akses masyarakat ke perpustakaan;
- Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah.

**2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat**

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana / prasarana kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis;
- Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan;
- Peningkatan perilaku hidup sehat;
- Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

**3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang ramah Lingkungan**

- Peningkatan perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang;
- Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK;
- Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat;
- Peningkatan kualitas air, tanah dan udara;

#### **4. Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya**

- Peningkatan investasi;
- Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya;
- Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM);

#### **5. Misi 5: Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya**

- Peningkatan dan mengembangkan obyek wisata;
- Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah;
- Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya;
- Peningkatan seni budaya Malangan.

#### **6. Misi 6 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima**

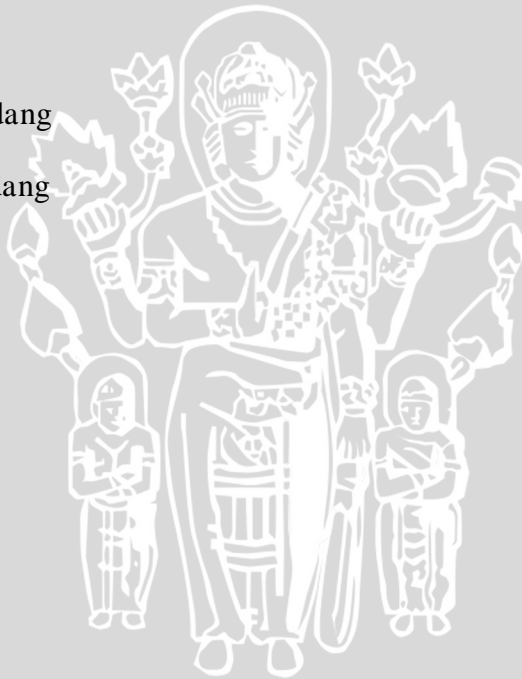
- Peningkatan pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota;
- Penyediaan air bersih;
- Peningkatan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA;
- Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi sesuai tataran transportasi kota;
- Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang;
- Dll

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang

Dalam website resmi Kecamatan Kedungkandang (<http://kedungkandang.Malangkota.go.id>) Kedungkandang adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Merupakan salahsatu wilayah kecamatan tertua di Kota Malang sebelum pemekaran wilayah Kota Malang pada dekade 80-an. Kecamatan Kedungkandang tebagi menjadi 12 kelurahan, antara lain :

1. Kel. Arjowinangun
2. Kel. Bumiayu
3. Kel. Buring
4. Kel. Cemorokandang
5. Kel. Kedungkandang
6. Kel. Kotalama
7. Kel. Lesanpuro
8. Kel. Madyopuro
9. Kel. Mergosono
10. Kel. Sawojajar
11. Kel. Tlogowaru
12. Kel. Wonokoyo

- **Visi:** Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Publik





- **Misi:** Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan Sistem Administrasi Publik dan Sistem Administrasi Kebijakan Publik yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
  1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
  2. Mewujudkan budaya tertib hukum dan tertib lingkungan dalam masyarakat;
  3. Mewujudkan usaha-usaha guna mendukung penerimaan pendapatan daerah yang optimal;
  4. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Mengenai kepadatan penduduk, wilayah Buring memiliki prosentase terendah dibandingkan Kecamatan lain di Kota Malang. Hal itu dikarenakan luas wilayah tidak dibarengi dengan tingginya populasi dan pertumbuhan penduduk. Luas wilayahnya sebesar 39,89 km<sup>2</sup> dengan populasi 150,262 pada tahun 2000 dan 1174,477 pada tahun 2010. Sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 2,72 penduduk per tahun, laju itu merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Tetapi walaupun begitu kepadatan penduduk di Kecamatan Kedungkandang sebesar 4,374 penduduk/km<sup>2</sup>.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk (Hasil Sensus Penduduk 2010)

Kecamatan <i>Districts</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (Km <sup>2</sup> )	Penduduk		Laju Pertumbuhan Pendd/Thn <i>Population</i> <i>Rate</i>	Kepadatan Pendd/Km <sup>2</sup> 2010 <i>Population</i> <i>Density</i>
		<i>Population of Cencus</i>			
		Sensus Pendd 2000 <i>Cencus 1990</i>	Sensus Pendd 2010 <i>Cencus 2000</i>		
		(3)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
010. Kedungkandang	39.89	150,262	174,477	2.72	4,374
020. Sukun	20.97	162,094	181,513	0.67	8,656
030. Klojen	8.83	117,500	105,907	-1.96	11,994
040. Blimbing	17.77	158,556	172,333	0.76	9,698
050. Lowokwaru	22.60	168,570	186,013	1.98	8,231
<b>Jumlah/Total</b>	<b>110.06</b>	<b>756,982</b>	<b>820,243</b>	<b>0.86</b>	<b>7,453</b>

Sumber: BPS, 2011

Kecamatan Kedungkandang memiliki komoditas unggulan yang akan digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan (Ha)

Kecamatan <i>Districts</i>	Lahan Sawah <i>Rice Field Area</i>	Bukan Lahan Sawah <i>Un-Rice Field Areas</i>		Jumlah <i>Total</i>
		Lahan Kering <i>Dry Land</i>	Lainnya <i>Others</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Kedungkandang	619	1284,31	21	1924,31
020. Sukun	322	396,8	0	718,8
030. Klojen	0	0	0	0
040. Blimbing	142	7	0	149
050. Lowokwaru	311,62	102,44	0	414,06
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1394,62</b>	<b>1790,55</b>	<b>21</b>	<b>3206,17</b>

Sumber: BPS, 2011

Selanjutnya pada tabel 6 menjelaskan mengenai luas lahan bukan sawah. Lahan Kecamatan Kedungkandang merupakan yang terluas. Menurut BPS (2011) luas bangunan atau pekarangan sebesar 1874,73 ha sedangkan luas tegal, kebun ladang sebesar 1118,38 ha. Lahan berupa tegal atau kebun ladang biasanya ditanami palawija (jagung dan ubi), kelapa, cengkeh, dan kopi.



Tabel 6 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya

Kecamatan <i>Districts</i>	Bangunan/ Pekarangan <i>House and Building</i>	Tegal, Kebun Ladang, Huma <i>Bareland, G.Bareland, G.Shifing, Cultivation</i>	Padang Rumput/ Hutan Rakyat <i>Meadows/ Forest</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Kedungkandang	1874,73	1118,38	-
020. Sukun	1282,86	396,30	-
030. Klojen	754,25	-	-
040. Blimbing	1505,00	5,00	-
050. Lowokwaru	1642,00	82,30	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>7058,84</b>	<b>1601,98</b>	<b>0</b>

Sumber: BPS, 2011

Pada tabel diatas Kecamatan Kedungkandang memiliki luas lahan bukan sawah terbesar di Kota Malang. Luas bangunan atau pekarangan sebesar 1874,73 ha. Sedangkan luas tegal, kebun, ladang, dan huma jika ditotal sebesar 1118,38 ha.

Pada tabel 7 mengenai luas panen dan produksi palawija, Kecamatan Kedungkandang masih yang terunggul dari kecamatan lainnya. Untuk tanaman jagung luas lahan panennya sebesar 262 ha dengan produksi sebesar 1054 ton.

Sedangkan untuk ubi kayu luas lahan panen sebesar 144 ha dengan hasil produksi sebesar 215 ton.

Tabel 7 Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan

Kecamatan <i>Districts</i>	Jagung/ <i>Maize</i>		Ubi Kayu/ <i>Cassava</i>		Ubi Jalar/ <i>Sweet Potatoes</i>	
	Luas Panen (ha) <i>Harvest Area</i>	Produksi (ton) <i>Produc- tion</i>	Luas Panen (ha) <i>Harvest Area</i>	Produksi (ton) <i>Produc- tion</i>	Luas Panen (ha) <i>Harvest Area</i>	Produksi (ton) <i>Produc- tion</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010. Kedungkandang	262	1054	144	215	0	0
020. Sukun	15	59	13	19	0	0
030. Klojen	0	0	0	0	0	0
040. Blimbing	2	8	1	1	0	0
050. Lowokwaru	13	53	5	8	3	29
<b>Jumlah/Total</b>	<b>292</b>	<b>1174</b>	<b>163</b>	<b>243</b>	<b>3</b>	<b>29</b>

Sumber: BPS, 2011

Pada tabel 8 mengenai produksi tanaman perkebunan, Kecamatan Kedungkandang meraih hasil produksi terbesar dibandingkan kecamatan lain. Dapat dilihat hasil produksi tanaman kelapa sebesar 332,70 ton dan tanaman kopi sebesar 1,80 ton. Hal itu semakin menetapkan kawasan Kecamatan Kedungkandang khususnya wilayah Buring sebagai penghasil utama pertanian di Kota Malang.

Tabel 8 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Kelapa <i>Coconut</i>		Kopi <i>Coffe</i>		Cengkeh <i>Clove</i>	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
	Panen	(ton)	Panen	(ton)	Panen	(ton)
	(ha)		(ha)		(ha)	
	<i>Harvest</i>	<i>Production</i>	<i>Harvest</i>	<i>Production</i>	<i>Harvest</i>	<i>Production</i>
	<i>Area</i>		<i>Area</i>		<i>Area</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010. Kedungkandang	-	332,70	-	1,80	-	-
020. Sukun	-	10,69	-	0,50	-	-
030. Klojen	-	0,83	-	-	-	-
040. Blimbing	-	0,94	-	-	-	-
050. Lowokwaru	-	50,82	-	-	-	-
<b>Jumlah/Total</b>	0	395.975	0	2,3	0	0

Sumber: BPS, 2011

Selain itu setelah peneliti terjun langsung ke lapangan, banyak lahan-lahan yang masih kosong dan tidak dipergunakan. Hal tersebut sangat berpotensi dijadikan untuk taman wisata.



### 3. Gambaran Umum Dinas

#### a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang

Dalam website resmi BAPPEDA (<http://bappeda.malangkota.go.id/>) Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada Visi dan Misi serta didasarkan pada isi dari analisis strategik, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun sebagaimana RENSTRA Bappeda Kota Malang Tahun Anggaran 2009-2013.

Badan ini mempunyai visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat“. Sedangkan misinya adalah:

- a. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya;
- c. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah;
- d. Mewujudkan pelayanan Publik yang prima.

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);
- d. Penyiapan dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangua Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pengurusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- k. Dll

**b. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang**

Dalam situs resmi Dinas-PU (<http://pu.malangkota.go.id/>) Dinas Pekerjaan Umum merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum.

Visi Dinas PU adalah “Terwujudnya sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan;
- e. Meningkatkan kualitas penataan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum penunjang peningkatan kinerja aparatur.



Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang adalah: Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang adalah:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusaha serta pengawasan jalan kota;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- f. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pekerjaan umum;
- h. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pekerjaan umum;
- i. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- k. Dll

### **c. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Kota Malang**

Dalam sites resmi dishub (<http://perhubungan.malangkota.go.id/>) Dinas Perhubungan merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang perhubungan. Dinas

Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

Visi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah: Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, bersih dan lancar. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana Jasa Perhubungan.
- b. Peningkatan Kinerja Aparatur sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan Jasa Perhubungan.
- c. Terciptanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait.
- d. Mendorong terciptanya peningkatan Pendapatan Retribusi

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;

- h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
- k. Dll.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan**

#### **hinterland**

#### **a. Pengenalan Wilayah Buring**

Tugas perencanaan pembangunan wilayah atau daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembangunan wilayah. Oleh karena itu mengenal dan memahami dengan baik tentang wilayah perencanaannya sudah menjadi keharusan. Mengenal potensi dan masalah, mengetahui profil wilayah, memahami berbagai kebijakan pembangunan yang ada, sampai dengan masalah kultur/ budaya masyarakat, sistem ekonomi, politik, dan sebagainya, dapat membantu daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan yang baik dan relevan. Bentuk pengenalan wilayah bisa dilakukan melalui metode Pemahaman Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal/ RDA*), Profil Wilayah, dan Kebijakan Pembangunan yang disiapkan dalam pengembangan wilayah Buring.



## 1. Pemahaman Wilayah Secara Cepat (*Rapid District Appraisal/ RDA*)

Sebagaimana diketahui dalam sistem pembangunan wilayah di Indonesia, fokus area (*area center*) ada didaerah kabupaten atau kota. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Perlu ditekankan RDA akan berjalan efektif jika digunakan untuk menghasilkan data-data dan informasi yang sifatnya jangka pendek. Untuk melakukan metode RDA, agar dapat menghasilkan hasil yang optimal, perlu digunakan alat-alat penting yang dapat menunjang pelaksanaannya. Menurut LAN-DSE, alat-alat tersebut antara lain meliputi:

### a. Peta wilayah

Pada gambar dibawah ini, wilayah Buring terletak pada Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Wilayah Buring terdiri dari lima kelurahan yangletaknya berada pada sepanjang Jalan Mayjend Sungkono. Kelurahan itu antara lain: sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun. Wilayah Buring sendiri berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kelurahan di wilayah Buring yang berada pada perbatasan adalah Kelurahan Arjowinangun.

Gambar 4 Peta Wilayah Buring



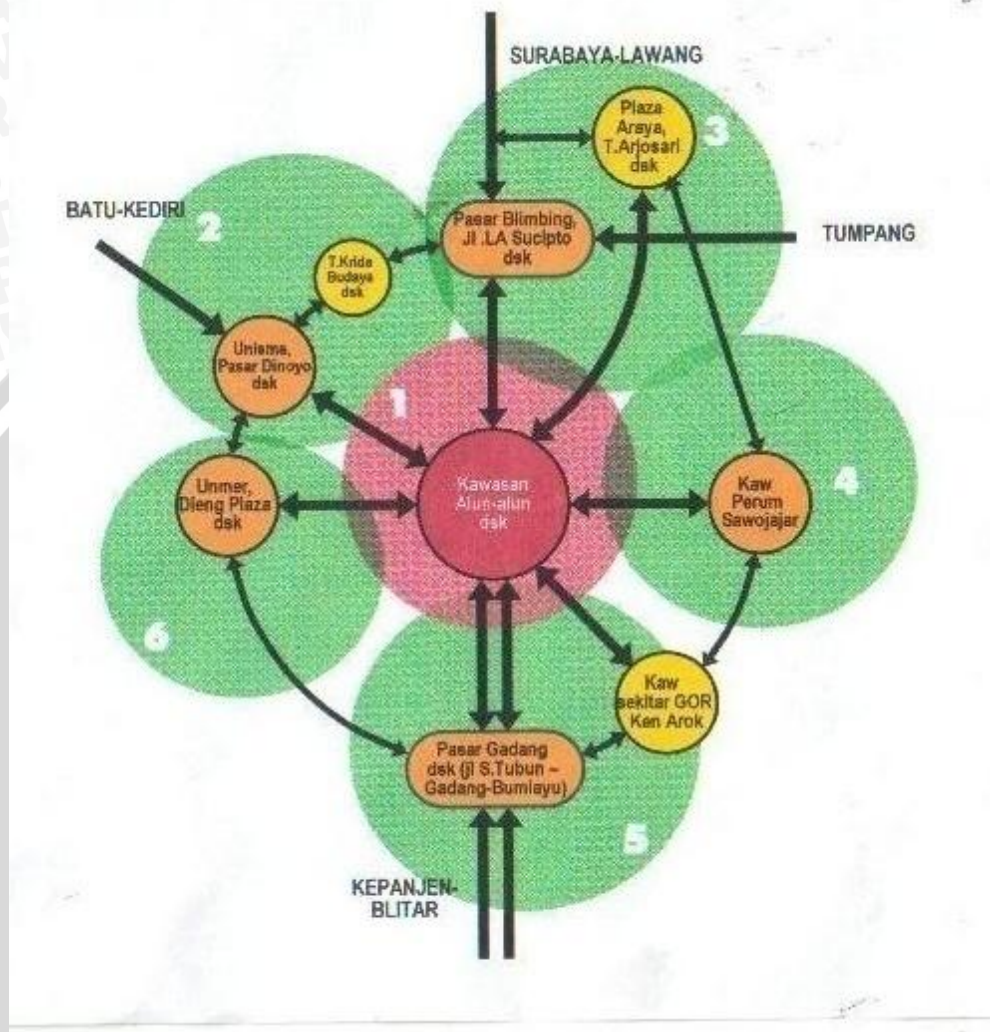
Sumber: BAPPEDA, 2013 (diolah oleh penulis)

Untuk dapat lebih memahami wilayah Buring, sebaiknya perlu dilihat antara hubungan wilayah Buring dengan wilayah lainnya. Hal tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini:





Gambar 5 Letak Wilayah Buring dengan Wilayah Lain



Sumber: BAPPEDA, 2013

Jika melihat pada gambar, wilayah Buring terdapat pada kawasan sekitar Gor Ken Arok. Hal itu menyebabkan wilayah Buring berdekatan dengan Sawojajar, dan Pasar Gadang. Menurut Ibu. Ratri selaku Kasubid Tata Ruang- BAPPEDA memaparkan bahwa:

“Masyarakat akan datang pada suatu wilayah yang terdekat dari wilayahnya. Contoh: wilayah yang berada pada pusat kota, yaitu Alun-Alun, masyarakat tentu akan lebih suka beralih kepada daerah yang jangkauannya lebih mudah



dan lebih lengkap, disitu terdapat pasar Gadang dan Sawojajar, dari segi kelengkapan fasilitas, kedua wilayah tersebut berada diatas wilayah Buring” (Wawancara, Rabu, 19/02/2014).

#### **b. Perjalanan eksploratif (perjalanan transek)**

Perjalanan transek adalah perjalanan sederhana melalui daerah pedesaan bersama dengan informan terpilih ke lokasi tertentu yang ditetapkan sebelumnya (Riyadi, 2003:33). Perjalanan ini akan membantu dalam menelusuri situasi wilayah dan menghindarkan dari pengertian tentang suatu wilayah hanya dari sudut pandang kantor kepala desa, informan yang sudah dikenal, pertemuan resmi dan sebagainya (Riyadi, 2003:33). Informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Buring sendiri, yaitu Arie Alaudin (27) yang merupakan lulusan D3 ITN, dan bekerja pada sektor swasta.

Wilayah Buring merupakan wilayah pengembang, dimana akan ada banyak pembangunan yang akan dilakukan. Baik itu pembangunan pada aspek transportasi sampai pada RTH. Menurut informan menuturkan pendapatnya bahwa:

“Apabila pengembangan wilayah Buring akan semakin mempersempit lahan hijau, saya kurang setuju, contohnya banyak dilakukan pembangunan perumahan. Hal itu akan menyebabkan semakin menurunnya keasrian wilayah Buring sendiri. Bisa dilihat di kawasan Sawojajar, dimana dulu banyak persawahan, kini semua itu hilang digantikan oleh perumahan masyarakat Kota Malang” (Wawancara, Senin, 17/03/14).

Selain itu untuk kelengkapan infrastruktur wilayah Buring sudah banyak mengalami perbaikan, dimana pelayanan publik sudah banyak yang dibangun, yang dampaknya akan semakin memudahkan masyarakat dalam kehidupannya. Hal itu juga ditegaskan oleh informan yang juga merupakan masyarakat Buring, bahwa:

“Infrastruktur pelayanan publik yang dibangun sudah banyak dibandingkan beberapa tahun yang lalu, hanya saja masalah sampah menurut saya masih kurang maksimal. Contohnya saja petugas pengambil sampah di wilayah Buring tidak sebanyak di wilayah lain dan tidak meratanya area yang dikerjakan oleh petugas sampah. Sehingga ada beberapa area yang tidak terlayani si petugas sampah ini” (Wawancara, Senin, 17/03/14).

Apabila membicarakan mengenai pengembangan suatu wilayah maka harus mencari tahu mengenai potensi atau sektor yang cocok untuk dikembangkan di wilayah Buring. Menurut informan sektor yang cocok dikembangkan adalah:

“Sektor pertanian, sektor agrowisata saya kira cocok untuk dikembangkan. Melihat banyak lahan yang masih kosong dan keadaan wilayah Buring yang asri dibandingkan wilayah lain di Kota Malang. Kalau untuk perdagangan cocoknya yang tradisional saja, karena untuk pasar modern atau mall, masyarakat disini kurang siap menerimanya” (Wawancara, Senin, 17/03/14).

Dari uraian diatas informan mengemukakan mengenai proses pembangunan yang telah dilakukan di wilayah Buring:

“Tinggal melanjutkan saja pembangunan yang sudah berjalan. Jangan sampai berhenti seperti beberapa proyek yang telah ada. Segera dirampungkan, agar fasilitasnya dapat dirasakan oleh masyarakat Malang, khususnya wilayah Buring. Kemudian kalau membangun harap memperhatikan keadaan lingkungan sekitar” (Wawancara, Senin, 17/03/14).

Sehingga dapat disimpulkan wilayah Buring sekarang dengan wilayah Buring dulu, lebih baik keadaan wilayah Buring yang sekarang, hal itu juga dikemukakan oleh informan, bahwa:

“Keadaan di wilayah Buring sudah semakin membaik, contohnya dari keamanan wilayah. Dulu di Buring sering terjadi kejahatan kriminal, seperti penjambret motor, bajing loncat dll. Dari segi ekonomi juga lebih maju. Banyak masyarakat yang berwirausaha. Intinya wilayah Buring semakin ramai pengujung” (Wawancara, Senin, 17/03/14).

### **c. Data potensi wilayah Buring**

Potensi yang unggul di wilayah Buring adalah potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan, bisa dilihat pada tabel dibawah, bahwa Kecamatan Kedungkandang memiliki peluang yang cukup besar dibanding Kecamatan lain di Kota Malang (lihat Tabel 5- Tabel 8). Di Kecamatan Kedungkandang sendiri, wilayah yang berpotensi adalah wilayah Buring, meliputi Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Arjowinangun. Wilayah Buring memiliki lahan sawah sebesar 619 ha sedangkan lahan bukan sawah sebesar 1284,31 ha untuk lahan kering dan lahan lainnya sebesar 21 ha. Lahan kering disini berarti tegal atau perkebunan, bangunan/ pekarangan, padang rumput, dan hutan rakyat (BPS, 2011).

### **a. Data mengenai program pembangunan di wilayah Buring**

Berikut akan dijabarkan mengenai data pembangunan di wilayah Buring mulai dari jenis program, kegiatan, lokasi pembangunan, penanggung jawab, rentang waktu/dimensi waktu yang diberikan dalam membangun, dan perkiraan pembiayaan kegiatan, serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunannya.



Tabel 9 Data Program Pembangunan wilayah Buring

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Penanggung jawab	Dimensi waktu																				Prakiraan biaya (Rp.000.000,-)	Sumber pembiayaan
					2010-2015					2016-2020					2021-2025					2026-2030						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Pembangunan infrastruktur transportasi	Studi kelayakan pembangunan jalan lingkaran	Pembangunan jalan lingkaran barat dan jalan lingkaran timur Kota Malang	BAPPEDA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	250	APBD
2		Pembangunan Jalan Lingkaran Timur	Jl. Kebon Sari, Jl S.Tubun, Jl Gadang, Mayjend Sungkono,dll	Dinas PU	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	174.750	APBD Kota, APBD Prov
3		Studi kelayakan penambahan rute angkutan umum	Kota Malang, khususnya di Kecamatan Kedungkandang	Dishub	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	175	APBD
4		Penambahan rute Angkutan umum	Pada wilayah-wilayah yang belum terlayani, seperti Kecamatan Kedungkandang	Dishub	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500	APBD

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Penanggung jawab	Dimensi waktu																				Prakiraan biaya (Rp.000.000,-)	Sumber pembiayaan
					2010-2015					2016-2020					2021-2025					2026-2030						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5		Studi kelayakan pengadaan bus kota	Jalan lingkar timur dan barat	Dishub																					175	APBD
6		Pengadaan bus pemaduan moda	Rute terminal arjosari sampai Terminal Tlogowaru yang nantinya menggantikan fungsi Terminal Gadang	Departemen Perhubungan dan DAMRI																					30.000	APBN
7		Pengadaan bus kota	Sepanjang jalan lingkar timur dan barat	Dishub																					5.000	APBD
8		Pengalihan fungsi terminal gadang menuju terminal tlogowaru	Kecamatan Sukun-Kecamatan Kedungkandang	Dishub																					500	APBD

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Penanggung jawab	Dimensi waktu																				Prakiraan biaya (Rp.000.000,-)	Sumber pembiayaan
					2010-2015					2016-2020					2021-2025					2026-2030						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
9		Studi kelayakan dan pengadaan terminal cargo	Sekitar terminal Tlogowaru	bappeda	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1175	APBD
10	Pengembangan prasarana utilitas	Pen Peningkatan volume resevoir/tandon PDAM	Tandon buring	PDAM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	225	APBD, Kemitraan
11		Pelayanan distribusi air bersih	Kel. Bumiayu, Kel. Arjowinangun, Kel. Tlogowaru, Kel. Wonokoyo, Kel. Buring, Kel. Kedungkandang		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		Kemitraan
12		Pengelolaan dan penambahan TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Bumiayu, Kedungkandang</li> <li>• Kel. Wonokoyo, Kedungkandang</li> <li>• Kel. Tlogowaru, Kedungkandang</li> </ul>	DKP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1000	APBD, Kemitraan
13	Pengembangan RTH	Penyediaan jalur hijau/jalur tengah	Kec. Buring, Kec. Kedungkandang, dan Jalan Lingkar	DKP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1500	APBD



No	Program	Kegiatan	Lokasi	Penanggung jawab	Dimensi waktu																				Prakiraan biaya (Rp.000.000,-)	Sumber pembiayaan
					2010-2015					2016-2020					2021-2025					2026-2030						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
14		Pngembangan RTH pada kawasan perbatasan wilayah Kota Malang	Kota Malang (wilayah Buring termasuk karena berada di wilayah perbatasan)	DKP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500	APBD
15		Pengembangan hutan kota dan kebun bibit	Kec.kedungkandang	DKP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1500	APBD
16	Pengembangan fungsi lapangan olahraga	Peningkatan GOR Ken Arok	GOR Ken Arok	DKP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1500	APBD
17	Pengembangan sektor informal	Pengembangan sentra industri kecil	Di daerah Arjo winangun	disperindag	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500	APBD

Sumber: BAPPEDA (2013)

Dari tabel diatas terdapat empat belas kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bersama jajaran dinasnya serta pihak ketiga sebagai mitra dalam membangun. Pada point pertama dan kedua terdapat program studi kelayakan pembangunan jalan lingkar serta pembangunannya. Jalan

Mayjend Sungkono di wilayah Buring termasuk dalam rute Jalan Lingkar Timur. Program tersebut dibawah arahan BAPPEDA dan Dinas Perhubungan. Perkiraan biaya untuk studi kelayakan sebesar 250.000.000 menggunakan biaya APBD sedangkan untuk pembangunannya sendiri sebesar 174.750.000.000 dibiayai APBD Kota dan APBD Provinsi.

Pada point ketiga terdapat studi kelayakan penambahan rute angkutan umum, yang diadakan di Kecamatan Kedungkandang dibawah tanggung jawab dishub. Perkiraan biaya sejumlah 175.000.000 dibiayai oleh dana APBD. Setelah studi kelayaan dilakukan, maka selanjtnya pada point keempat ditentukan program penambahan rute angkutan umum. Tempat kegiatan dilakukan pada wilayah-wilayah yang belum terlayani, seperti Kecamatan Kedungkandang, dengan rentang waktu 2010 sampai 2015 dengan perkiraan biaya 500.000 oleh APBD.

Point kelima berisi mengenai program studi kelayakan pengadaan bus kota. Selanjutnya pada point keenam terdapat peningkatan layanan pengadaan bus pepadu moda, dengan rute terminal arjosari sampai Terminal Tlogowaru yang nantinya menggantikan fungsi Terminal Gadang. Waktu yang diperkirakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Jumlah dana diperkirakan sebesar 30.000.000.000 dengan dana APBD. Di point ketujuh, mengenai pengadaan bus kotadi sepanjang jalan lingkar timur dan barat.tanggung jawab dan rentang waktu yang diberikan sama dengan pengadaan bus moda. Jumlah dana diperkirakan 5.000.000.000 dari APBD.

Point kedelapan, mengenai pengalihan fungsi terminal gadang menuju terminal tlogowaru yang dilakukan di Kecamatan Sukun-Kecamatan Kedungkandang diberikan rentang waktu mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Biaya yang diperkirakan sebesar 500.000.000 dari dana APBD. Lanjut pada point ke sembilan mengenai studi kelayakan dan pengadaan terminal cargo.

Program kesepuluh mengenai peningkatan volume tandon PDAM, letaknya pada tandon Buring dibawah tanggung jawab PDAM. Dimulai tahun 2021 saampai tahun 2030. Biaya dari APBD dan Kemitraan dengan perkiraan 225.000.000. Program kesebelas mengenai pelayanan distribusi air bersih di Kel.Bumiayu, Kel.Arjowinangun,Kel.Tlogowaru, Kel.Wonokoyo, Kel.Buring, Kel.Kedungkandang. dengan rentang waktu mulai tahun 2026 sampai tahun 2030. Program kedua belas mengenai pengelolaan dan penambahan TPS di wilayah Kel.Bumiayu-Kedungkandang, Kel.Wonokoyo-Kedungkandang, dan Kel.Tlogowaru-Kedungkandang. Rentang waktu dimulai pada tahun 2010 sampai tahun 2020. Dibawah tanggung jawab DKP dengan perkiraan biaya 1.000.000.000.

Dalam pengembangan RTH di point tiga belas terdapat program penyediaan jalur hijau/jalur tengah di Kec. Buring, Kec.Kedungkandang, dan Jalan Lingkar. Dinas yang bertanggung jawab adalah DKP. Watu yang diperkirakan mulai tahun 2010 sampai tahun 2020. Jumlah biaya diperkirakan sebesar 1.500.000.000 dngan dana dari APBD. Point keempat belas adanya program pengembangan RTH pada kawasan perbatasan wilayah Kota Malang dimulai pada tahun 2016-2030. Kemudian disusul dengan program



pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada point lima belas. Iaya diperkirakan sebesar 1.500.000.000. rentang waktu dari tahun 2010-2030.

Pada point enam belas mengenai peningkatan GOR Ken Arok mulai dari 2010 sampai tahun 2020 dibawah tanggung jawab DKP dengan dana dari APBD sebesar 1.500.000.000. Point terakhir berisi mengenai pengembangan sentra industri kecil di daerah Arjowinangun dibawah tanggung jawab disperinadag. Dana diperkirakan sebesar 500.000.000 dari dana APBD.

## **2. Profil Wilayah**

### **a. Keadaan alam lingkungan dan ciri-ciri fisik meliputi:**

#### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Kedungkandang terletak dibagian Timur wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 39,89 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 12 kelurahan. Wilayah Buring dalam penelitian ini mencakup enam kelurahan, yaitu:

- a. sebagian Kelurahan Kedungkandang,
- b. Kelurahan Buring,
- c. Kelurahan Bumiayu,
- d. Kelurahan Arjowinangun, dan
- e. Kelurahan Tlogowaru.

#### **2. Iklim dan curah hujan.**

Rata-rata wilayah Buring yang termasuk dalam Kecamatan Kedung Kandang memiliki kadar udara mencapai 24°08'C kelembaban 7,26% (udara sejuk dan kering). Penyebaran curah hujan sebagai berikut:

- a. Bulan basah selama enam bulan biasanya pada bulan November-April
- b. Bulan kering selama tiga bulan biasanya pada bulan Juli- September
- c. Bulan lembab selama 3 bulan biasanya pada bulan Mei, Juni, dan Oktober.

### 3. Pegunungan dan Sungai

Dalam wilayah Buring terdapat adanya pegunungan, yaitu Pegunungan Buring yang terbentang di beberapa kelurahan yaitu: Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Madyopuro, dan Kelurahan Cemorokandang. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah Sungai Bango, Sungai Brantas, Sungai Amprong, dan beberapa sungai kecil lainnya.

#### b. Keadaan ekonomi meliputi:

Menurut penulis, keadaan ekonomi suatu wilayah, bisa dilihat dari mata pencaharian masyarakat. Dari mata pencaharian tersebut dapat terlihat bagaimana tingkat kesejahteraan ekonominya. Hal itu secara tidak langsung dibutuhkan dalam pengembangan wilayah. Tabel mata pencaharian masyarakat Buring adalah sebagai berikut:

**Tabel 10 Mata Pencaharian Masyarakat Wilayah Buring**

Pekerjaan atau mata pencaharian	Bumiayu	Buring	Kedungkandang	Arjowinangun	Tlogowaru	Jumlah
a. Pegawai Negeri Sipil	294	102	132	454	8	1028
b. Tentara	59	29	42	423	4	565

c. Swasta		939	674	2293	256	4311
Pekerjaan atau mata pencaharian	Bumiayu	Buring	Kedungkandang	Arjowinangun	Tlogowaru	Jumlah
d. Wiraswasta atau pedagang	199	285	336	199	433	1715
e. Tani	508	370	243	255	748	2588
f. Pertukangan	93	258	193	73	380	1203
g. Buruh Tani	533	2386	62	234	1599	5396
h. Pensiunan	206	80	66	106	7	465
i. Nelayan		0	0	0		0
j. Pemulung		0	11	12		23
k. Jasa	26	16	28	0	50	133

Sumber: Kedungkandang (2013)

Dari tabel diatas, mata pencaharian terbanyak masyarakat Buring adalah buruh tani, kemudian swasta, dan ketiga tani, selanjutnya wiraswasta. Buruh tani dan petani sangat sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah Buring dibidang pertanian. Buruh tani merupakan pekerja dibidang pertanian tetapi tugas mereka hanya menggarap sawah orang lain, mereka sendiri tidak mempunyai lahan sawah. Bisa dilihat bagaimana kondisi ekonomi mereka yang rendah. Beda dengan petani, mereka memiliki lahan pertanian, yang dari sana mereka memiliki hasil sawah yang nantinya bisa dipergunakan untuk kebutuhan mereka atau dijual kembali. Hasil pertanian di Kecamatan Kedungkandang khususnya wilayah Buring termasuk yang paling besar (bisa dilihat pada tabel 7 dan tabel 8). Jumlah



pekerjaan pada urutan selanjutnya adalah pertukangan kemudian pegawai negeri sipil, tentara, pekerjaan dibidang jasa, selanjutnya adalah pensiunan, dan pemulung.

Selain pekerjaan, hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan wilayah adalah kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat banyak yang bertumpu pada pertanian, wilayah lain dan perdagangan (wiraswasta). Dalam hal perdagangan, di wilayah Buring terdapat fasilitas berupa pasar. Selain itu juga disana terdapat kegiatan ekonomi pada sektor industri (contoh: pabrik rokok). Untuk data jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 11 Data Fasilitas Perekonomian di Wilayah Buring

No	Data Monografi	Bumiayu	Buring	Kedungkandang	Arjowinangun	Tlogowaru	Jumlah
a.	Pasar	-	1	1	-	1	3
b.	Industri	1	5	5	1	0	13

Sumber: Kecamatan Kedung-Kandang, 2013 dan 2009

Pasar di wilayah Buring terdapat 3 unit. Kelurahan yang memiliki pasar adalah Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, dan Kelurahan Arjowinangun. Masing-masing memiliki satu unit.

### 1. Komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh wilayah Buring

Di kecamatan Kedungkandang yang terdiri dari 12 kelurahan yang dimana enam kelurahan menjadi tempat obyek peneliti memiliki lahan pertanian yang luas. Komoditi yang dihasilkan antara lain: padi, jagung, dan tebu. Selama tahun

2008 luas tanam dan panen tanaman padi sawah adalah 612 hektar dengan rata-rata produksi 6,2 ton per hektar. Sedangkan untuk jagung seluas 370 dengan rata-rata produksi 3,8 ton (Kecamatan Kedungkandang, 2009).

### c. Keadaan sosial dan budaya wilayah Buring

Di wilayah Buring keadaan sosial masyarakat khususnya tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Tingkat Pendidikan Masyarakat Wilayah Buring

NO	DATA MONORAFI	BUMIA YU	BURING	KEDUNGKANDANG	ARJOWINANGUN	TLOGOWARU	
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
a	Lulusan Pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak		1.561	162	64	7	4.157
	2) Sekolah Dasar	5.376	4.576	320	2.139	9	34.870
	3) SMP	3.759	1.284	210	1.514	2	22.767
	4) SMA / SMU	3.982	1.494	89	3.999	1	27.167
	5) Akademi / D1-D3	231	84	16	289	1	4.944
	6) Sarjana	399	172	8	572		5.689
	7) Pascasarjana	104		4	78		1.153
b	Lulusan Pendidikan Khusus						
	1) Pondok Pesantren			9	103		805
	2) Pendidikan Keagamaan			0	114		336
	3) Sekolah Luar Biasa			15			28
	4) Kursus Ketrampilan			30			191

Sumber: Kecamatan Kedungkandang, 2013

Dari tabel diatas, lulusan terbanyak masyarakat Buring adalah SD, kemudian SMS, SMP, Sarjana, TK, Pasca Sarjana, dan lainnya berupa lulusan Pendidikan khusus.

#### d. Keadaan administrasi atau kelembagaan meliputi

##### 1. Lembaga-lembaga s wadaya masyarakat.

Tabel 13 Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat

No	Data Monografi	Bumiayu	Buring	Kedungkandang	Arjowinangun	Tlogowaru	Jumlah
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						
	Jumlah pengurus	21	14	8			43
	Jumlah anggota		9	7			16
	Jumlah kegiatan/bln		1	1			2
2	Pkk						
	Jumlah pengurus (orang)	9	24	10	24	24	91
	Jumlah anggota		10	20	33	192	255
	Jumlah kegiatan/bln		1	1	1	1	4
	Jumlah buku administrasi		16		10	12	38
3	Karang Taruna						
	Jumlah karang taruna	1	1	8	1	1	12
	Jumlah pengurus (rata-rata)	20	5	5	4	8	42
4	RT/RW						
	Jumlah RW	6	9	7	9	8	39



Jumlah RT	56	38	49	53	37	233
-----------	----	----	----	----	----	-----

Sumber: Kecamatan Kedungkandang, 2013

Jika dilihat pada tabel 13, wilayah Buring memiliki empat lembaga swadaya masyarakat, antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, PKK, Karang Taruna, dan RT/RW. Selain lembaga swadaya, disana juga terdapat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono No.55 dan Pusat Layanan Autis yang terletak di Kelurahan Tlogowaru.

### 3. Identifikasi Kebijakan Pembangunan

Berikut akan dijelaskan mengenai kebijakan pembangunan pemerintah yang akan dilaksanakan pada wilayah Buring (sepanjang koridor jalan Mayjend Sungkono, dimana terdapat sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Buimiayu, Kelurahan Ajowinangun, Kelurahan Tlogowaru) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang diikuti dengan hasil wawancara bersama beberapa pihak yang secara langsung berkaitan dengan program pembangunan di wilayah Buring.

Pada Paragraf 1 mengenai Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota Pasal 14 pada point 3a adanya pengembangan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan raya di wilayah Buring. Hal itu sangat berguna untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat kota yaitu: membangun jaringan jalan lingkaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Jalan lingkaran di kota Malang ada dua, yaitu: jalan lingkaran barat dan jalan lingkaran timur, dimana keduanya masih dalam rencana, tetapi jalan lingkaran

timur sudah mulai dibangun. Jalan lingkar timur pada Pasal 22 mengenai Rencana Sistem Prasarana Utama merupakan wilayah Buring karena berada pada Jalan Mayjend Sungkono. Selain itu pada Pasal 45, adanya penyediaan jalur hijau di setiap jalan lingkar.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Arti Mudji selaku Sekertaris Camat Kecamatan Kedungkandang mengenai banyaknya pembangunan yang di lakukan di wilayah Buring terutama pembangunan, beliau berujar “Sangat penting, karena di wilayah kedungkandang nantinya akan menjadi daerah pengembang. Pada tahun 2014-2016 itu terdapat pembangunan jalan tol pandaan-surabaya di wilayah madyopuro dan cemorokandang. Untuk tahun ini akan diadakan pematokan tanah wilayah yang dipergunakan untuk pembangunan jalan yang setelah itu melakukan pembayaran kepada pihak tanah”, Selasa (04/03/2014).. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap wilayah Buring, apalagi Jalan Mayjend Sungkono merupakan bagian dari jalan lingkar timur.

Pada pasal 23 pemerintah Kota Malang merencanakan peningkatan fungsi jalan di wilayah Buring, yaitu koridor Jalan Mayjend Sungkono. Jalan tersebut meningkat menjadi jalan arteri sekunder. Selain peningkatan fungsi jalan pada pasal 24 pemerintah Kota Malang merencanakan peningkatan sarana transportasi di sepanjang Jalan Lingkar Timur (Jalan Mayjend Sungkono).

Alasan utama mengapa banyak dibangunnya jalan (pembangunan jembatan, pelebaran jalan Mayjend Sungkono, serta peningkatan fungsi jalan mayjend Sungkono menjadi jalur lingkar timur) menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Jalan pada bidang binamarga –PU adalah sebagai berikut:



“Alasan dikembangkannya jalan di wilayah Buring karena semakin banyaknya volume kendaraan. Karena di Indonesia sistem penerimaan mobil tidak seperti di negara Australia. Di Indonesia semua jenis mobil ada. Entah itu dari tahun lama tetap ada, tidak dimusnahkan. Lain dengan negara Singapura, disana setiap ada mobil model baru, mobil model yang lama tidak dipakai kembali. Karena hal itu banyak mobil yang didistribusikan ke Indonesia.” (Wawancara:Rabu, 12/02/2014)

Selain pembangunan jalan lingkaran timur, ada pembangunan jembatan layang. Jembatan itu berfungsi untuk menampung kendaraan yang tiap harinya semakin banyak melalui wilayah Buring selain itu juga berfungsi dalam menanggulangi kemacetan. Untuk masalah pembangunan jembatan, Ibu Sekertaris Camat menegaskan bahwa:

“Untuk masalah jembatan kedungkandang ini masih berhenti, tapi diusulkan untuk tahun 2014. Nanti bisa koordinasi dengan PU atau BAPPEDA yang membidangi masalah pembangunan ini, kalau kecamatan kita hanya memfasilitasi. Jadi antara rencana dan penganggaran itu harus koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut. Memfasilitasi itu maksudnya yang mengadakan tempat dan lokasi” (Wawancara, Selasa 04/03/2014).

Pasal 14 pada point 3c adanya pengembangan prasarana transportasi yaitu mengalih fungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi. Terminal Hamid Rusdi sendiri terletak pada Kelurahan Tlogowaru, yang mana termasuk kedalam wilayah Buring. Menurut beliau selaku sekertaris camat Kecamatan Kedungkandang mengenai permasalahan terminal Hamid Rusdi mengatakan bahwa

“Untuk masalah terminal Hamid Rusdi yang merupakan sarana transportasi, yang berfungsi mengurangi kemacetan itu juga sepertinya belum digunakan dengan baik, hanya sebagai transit saja. Hal itu tidak tau permasalahannya apa, entah dari sulitnya lalu lintasnya atau dari yang lain” (Wawancara, Selasa (04/03/2014) .

Tetapi menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Wahyu Setianto, mengakui bahwa:



“.....tidak semua angkutan umum masuk ke Terminal Hamid Rusdi. Hal itu yang menyebabkan kondisi terminal sepi. Menurutnya, banyak angkutan yang tidak masuk ke terminal, karena jalan di Pasar Induk Gadang (PIG), belum bisa dilewati. Sehingga, banyak angkutan umum yang memilih mangkal di perempatan Gadang. Akhirnya, perempatan Gadang itu seperti menjadi terminal bayangan. Banyak angkutan yang mangkal di lokasi. Rencananya, kami juga akan berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang, agar bus dan angkutan yang menuju Kabupaten bisa lewat di terminal,” (Wawancara, Selasa 04/032014) .

Pada pasal 20 mengenai Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota, Jalan Mayjend Sungkono (yang termasuk ke dalam wilayah Buring) termasuk kedalam Sub wilayah Kota Malang Tenggara. Memiliki fungsi pelayanan primer: perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olah raga, gedung pertemuan, industri, dan perumahan. Sedangkan fungsi pelayanan sekundernya adalah perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta RTH.

Untuk rencana sistem penyediaan air minum kota pada Pasal 34, pemerintah Kota Malang mengembangkan wilayah pelayanan yang akan diarahkan ke kelurahan yang sebagian dan atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Wilayah Buring termasuk kedalam wilayah yang belum terlayani, yaitu: Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang. Mengenai rencana sistem persampahan kota pada Pasal 36, wilayah Buring termasuk daerah yang nantinya akan ada penambahan lokasi TPS, yaitu : Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru.

Untuk masalah penyediaan air, wilayah Buring sebenarnya sudah tidak ada masalah karena telah bekerjasama dengan pihak PDAM, tetapi disayangkan

karena masyarakat setempat masih saja mandi di sungai, menanggapi pernyataan tersebut Sekretaris Camat Kecamatan Kedungkandang berkomentar

“Untuk masalah masyarakat yang sering mandi di sungai itu memang sudah menjadi budaya masyarakat, jadi sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Padahal sudah disiapkan toilet umum yang keadaannya cukup bagus. Tapi nanti secara pelan-pelan akan diadakan sosialisasi untuk merubah kebiasaan tersebut.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Pasal 45 mengenai kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota, di wilayah Buring diupayakan adanya peningkatan GOR Ken Arok sebagai taman olahraga. GOR Ken Arok terletak pada Kelurahan Buring. Selain itu penyediaan jalur hijau dan taman kota di Sub Wilayah Malang Timur dan Tenggara. Pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada sub wilayah Malang Timur dan Tenggara. Banyak lahan di wilayah Buring masih belum termanfaatkan dengan maksimal. “Kondisi lahan di wilayah Buring sendiri masih terbuka untuk pengembangan kota” (Malang Post, 2013). Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kedungkandang Ibu Arti Mudji mengatakan

“Terdapatnya GOR Ken Arok terhadap wilayah Buring sangat penting, karena tiap ada kegiatan, khususnya dalam hal perdagangan bisa menambah penghasilan ekonomi warga. Sekarang GOR Ken Arok juga dipakai untuk wisuda, lomba-lomba di bidang olahraga. Jadi Gor Ken Arok sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Buring.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Pasal 48 Rencana Kawasan Perumahan melakukan penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong. Hal itu dilakukan secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara. Di wilayah Buring sendiri banyak pembangunan permukiman, salah satunya dengan didirikannya rusunawa yang



telah selesai pada awal tahun 2012 lalu (Pemkot Malang, 2013). “Kawasan permukiman banyak dibangun di wilayah Buring. Salah satunya, dan yang juga cukup massive adalah PT. Bulan Terang Utama yang sudah membangun ribuan rumah di beberapa wilayah Buring. Pilihan pengembang ini tentu linier dengan program pengembangan kota” (Malang Post, 2013). Lain halnya dengan keterangan ibu Arti Mudji selaku Sekcam Kecamatan Kedungkandang mengatakan bahwa:

“Untuk permasalahan perumahan memang tidak bisa dihindari. Hal itu juga tidak terlepas dari perkembangan suatu wilayah. Jika memang diharuskan dijual maka ya memang harus dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah. Memang ada yang dikorbankan, yang tidak lain adalah mata pencaharian masyarakat. Tetapi tetap masyarakat mempunyai hak untuk tidak menjual tanahnya kepada pihak lain. Kadang memang masyarakat tertarik karena uang yang dihasilkan dari penjualan lahan itu banyak. Saya lebih setuju jika rumah masyarakat dapat dijadikan lapangan kerja, contohnya home industri” (Wawancara Selasa, 04/03/2014).

Semakin banyaknya rumah yang dibangun, maka pemerintah harus menyediakan bantuan kepada masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah yang mengakibatkan perawatan terhadap rumahnya rendah, sehingga mengakibatkan kerusakan. Ibu Arti Mudji selaku Sekertaris Camat Kecamatan Kedungkandang menanggapi hal itu dengan menegaskan bahwa:

“Untuk pengembangan wilayah dalam hal melayani masyarakat dalam hal perumahan cukup bagus, karena ada pembedahan rumah. Sehingga rumah masyarakat yang tidak layak huni bisa diperbaiki melalui dana BKM atau PNPM. Untuk pembangunan secara keseluruhan masih belum tepat sasaran, karena masih banyak yang harus dibenahi. Dan pembangunan yang dilaksanakan juga masih belum terselesaikan dengan baik.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa pada Pasal 50 dilakukannya pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan,



mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir, supermarket yaitu : pusat perdagangan di Gunung Buring, Mulyorejo, dan Sawojajar. Gunung Buring terletak di Kelurahan Buring. Wilayah Buring sendiri, di koridor Jalan Mayjend Sungkono banyak warga yang membuka usaha rumah, berupa toko atau warung makanan.

Rencana Kawasan Perkantoran Pasal 51 Perkantoran Pemerintah dengan skala pusat pelayanan kota diarahkan di Kelurahan Arjowinangun. Fasilitas publik di kelurahan tersebut berupa *Block Office* atau kantor terpadu juga sudah digunakan. Kantor terpadu sudah diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2009 (Malang Raya, 2009). Adapun dinas yang berada didalamnya, yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos)
- Dinas Perumahan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil)
- Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar)
- Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)
- Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)
- Badan Pelayanan Pusat Terpadu (BP2T).

Rencana Kawasan peruntukan Lainnya. Pasal 56. Pengembangan fasilitas umum pendidikan tinggi diarahkan pada: sub wilayah Kota Malang Timur, yakni di sekitar wilayah Gunung Buring, Kelurahan Kedungkandang dan Lesanpuro, sekaligus untuk memacu perkembangan wilayah dan pertumbuhan permukiman di kawasan Gunung Buring dan sekitarnya. Pasal 59 Rencana pemenuhan fasilitas umum rekreasi dan olahraga, meliputi : pembangunan taman olahraga (*sport centre*) di Kedungkandang, yang dilengkapi dengan sirkuit, gokart, pacuan kuda, golf, kolam pancing, *motorcross*, dan olahraga air.

Banyaknya kebijakan yang dilakukan di wilayah Buring menurut Ibu Arti Mudji selaku sekretaris camat Kedungkandang melanjutkan bahwa

”Memang daerah Kedungkandang ini merupakan daerah pengembang. Nanti semua kantor-kantor akan masuk ke wilayah ini, karena ketersediaan lahan atau tanah aset yang masih banyak untuk fasilitas publik.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014) sehingga banyak fasilitas publik yang akan bergeser ke wilayah Buring. “Untuk masalah pendidikan, di wilayah Buring fasilitasnya sudah cukup banyak, tetapi masyarakatnya yang kurang minat untuk bersekolah. Bahkan mandi saja itu sulit. Hal itu memang sudah menjadi budaya masyarakat. Sumber daya manusia disini memang dapat dikatakan pinggiran.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Selain masalah pendidikan, fasilitas kesehatan pun amat penting bagi berkembangnya suatu wilayah beliau melanjutkan

“Untuk masalah fasilitas kesehatan, sudah baik. Karena terdapat fasilitas-fasilitas berupa jamkesmas. Apalagi diadakannya pengobatan gratis. Walikota juga mengadakan blusukan terhadap masyarakat miskin agar pengobatan mereka dapat terlayani (gratis). Tiap kecamatan itu dijadwal tiap dua minggu sekali, sehingga semuanya terlayani. Tiap satu kegiatan satu kelurahan. Untuk masalah puskesmas di wilayah Buring belum ada, masih gabung pada puskesmas kedungkandang. Sedangkan pembangunan RSUD itu sudah sangat bagus untuk masyarakat Keungkandang, tetapi masih terdapat masalah pada dana”.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

## **b. Analisis Situasi**

Menurut LAN-DSE, yang dimaksudkan dengan analisis situasi adalah analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelum proses perencanaan dimulai, dan merupakan bentuk *scanning* serta *skimming* situasi masalah pembangunan disuatu wilayah. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan analisis masalah, analisis potensi/ tujuan, analisis partisipatif” (Riyadi:2003:35). Analisis situasi dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada data-data sekunder dan data-data primer. Ada beberapa tahap dalam menganalisis situasi yaitu:



## 1. Penetapan lokasi wilayah konsentrasi pengembangan

Dalam penelitian ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEDA) Kota Malang memabagi wilayah pengembangan hingga tahun 2029 diarahkan menjadi 6 (enam) BWP dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan menjadi 10 kecamatan. Masing-masing BWP yang dikelompokkan berdasarkan pada kedekatan dan persamaan fungsi kegiatan. Pembagian Kota ke dalam 6 BWP (Bagian Wilayah Perencanaan) adalah sebagai berikut:

- a. BWP Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen. Fungsi utama yaitu pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan dan peribadatan.
- b. BWP Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru. Fungsi utama yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya.
- c. BWP Malang Timur Laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Blimbing. Fungsi utama yaitu terminal, industri, perdagangan dan jasa, pendidikan dan sarana olah raga.
- d. BWP Malang Timur, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perkantoran, terminal, industri dan sarana olahraga.
- e. BWP Malang Tenggara, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa, Sport Centre (GOR Ken Arok), Gedung Convention Center, industri, dan perumahan.
- f. BWP Malang Barat, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa dan pendidikan. ([http://www.malangkota.go.id/pdf/Bahan\\_Web\\_rtrw.pdf](http://www.malangkota.go.id/pdf/Bahan_Web_rtrw.pdf))

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan BWP Malang Tenggara dan sedikit di BWP Malang Timur pada Kecamatan Kedung Kandang sebagai wilayah yang akan diteliti. Kecamatan Kedungkandang sendiri dikerucutkan pada wilayah Buring. Sehingga wilayah konsentrasi pengembangan dalam penelitian ini adalah wilayah Buring yaitu wilayah yang berada pada koridor Jalan Mayjend Sungkono yang disepanjang jalan terdapat sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan



Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun. Wilayah ini disebut *hinterland*.

## 2. Penetapan Kelompok Sasaran

Setelah lokasi penelitian sudah ditetapkan, maka selanjutnya ditentukan kelompok-kelompok sasaran (*target group*) yang akan menerima manfaat langsung hasil-hasil pembangunan. Dalam penelitian ini kelompok-kelompok sasarannya adalah masyarakat wilayah Buring itu sendiri. Serta masyarakat lain yang secara wilayah berdekatan dengan wilayah Buring dan masyarakat luar wilayah Buring yang bergantung pada wilayah ini. Hal itu untuk memudahkan akses dan pemenuhan fasilitas publik bagi masyarakat. Sudah diketahui bahwa Malang Tenggara nantinya akan ada banyak pembangunan fasilitas pelayanan dari transportasi, perumahan, perdagangan dan jasa, dan masih banyak lagi.

Menurut hasil wawancara dengan Kasubid Tata Ruang BAPPEDA Ibu A. Ratri perihal sasaran pengembangan wilayah Buring adalah sebagai berikut:

“Dilakukannya pengembangan di wilayah Buring dikarenakan agar wilayah di Kota Malang lebih merata. Selain itu pengembangan ini sasarannya adalah bagi masyarakat luas agar mau tinggal di wilayah Buring” (Wawancara, Rabu, 19/02/2014).

Wilayah Buring merupakan wilayah yang masih memiliki lahan yang cukup luas. Dengan luas lahan itu, menurut BAPPEDA fungsi utama wilayah Buring adalah perumahan, karena itu pemerintah mengembangkan infrastruktur agar wilayah Buring semakin strategis dan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Lanjut menurut Kasubid Tata Ruang BAPPEDA Ibu A.

Ratri:

“Kelompok sasaran pengembangan wilayah Buring adalah masyarakat Malang, dimana wilayah Buring memiliki fungsi utama sebagai perumahan,

karena dipusat kota sudah penuh dengan aktifitas perdagangan dan jasa. Untuk pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan Kota Malang tidak diperuntukkan untuk menyediakan lahan pertanian, karena aktifitas Kota Malang sudah menunjukkan aktivitas perkotaan” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Luas lahan sawah di Kecamatan Kedungkandang terbesar di Kota Malang (lihat tabel 5). Wilayah Buring banyak menyumbangkan lahannya dalam sektor pertanian. Selain itu wilayah Buring banyak menghasilkan panen pada produksi palawija (lihat tabel 7). Menurut Kasubid Tata Ruang BAPPEDA Ibu A. Ratri:

“Lahan pertanian masyarakat wilayah Buring bisa dikatakan akan aman jika masyarakat memiliki lahan atas nama pribadi dan bekerjasama mengikuti program Dinas Pertanian yaitu sawah abadi. Sedangkan untuk aset pemkot yang digunakan sawah tidak akan dialihkan fungsi ke yang lain” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Solusi yang digunakan apabila lahan akan dijadikan perumahan, masyarakat yang bermata pencaharian petani atau buruh tani menurut Ibu A. Ratri adalah

“ Akan terjadinya pergeseran mata pencaharian. Jika masyarakat terdesak yang tadinya bekerja pada sektor pertanian akan beralih pada sektor lain.” Selasa (04/03/2014).

Sehingga dapat disimpulkan pemerintah masih belum memikirkan apa solusi yang cocok apabila lahan wilayah Buring banyak dialihkan sebagai perumahan. Masyarakat diharuskan memiliki solusi tersendiri apabila lahan yang digunakan sudah tidak dapat dijadikan sebagai lahan pertanian yang tak lain merupakan lahan untuk mereka mencari nafkah..

### **3. Penetapan Kebutuhan Program**

Untuk memecahkan masalah dan menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, ditetapkanlah kebutuhan program proyek. Program proyek pengembangan wilayah ini akan ditentukan dan dirancang oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)



Kota. RTRW Kota Malang merupakan hasil dari kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Dari hasil penelitian, kebutuhan program yang paling utama di wilayah Buring adalah pengadaan layanan transportasi, layanan kesehatan, dan pengembangan potensi berupa pertanian, dan ruang terbuka hijau.

Pada layanan transportasi semakin banyaknya volume kendaraan yang datang, hal itu tidak diimbangi dengan fasilitas yang ada (lebar jalan, ketersediaan angkutan umum, penerangan jalan) sehingga menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan yang berdampak pada tata kota wilayah Buring. Selain itu pada fasilitas kesehatan, sedikitnya posyandu, dan puskesma di wilayah Buring tidak ada. Ada rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bumiayu, tetapi belum digunakan secara maksimal. Saat ini RSUD hanya melayani pasien dari poliklinik saja. Pembangunan RSUD akan selesai pada tahun 2014 ini, tetapi masih terdapat kendala dan masalah. "Pembangunan RSUD Kota Malang dimulai sejak 2011 dengan anggaran multiyears. Pada tahun 2011, dana yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp10 miliar dan 2012 sebesar Rp11 miliar" (Fn-online, 2013). RSUD Kota Malang ini diagendakan bahwa tahun 2014 ini sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sukarelawati:2012). Tetapi pada pelaksanaannya diduga ada *mark-up* lahan. Menurut Malang Corruption Watch (MCW) pembangunan rumah sakit dilakukan di atas lahan 12.300 meter persegi. Pemerintah Kota Malang hanya memiliki lahan seluas 8.000 meter persegi. Sedangkan kekurangannya, 4.300 meter persegi, itulah yang dibeli dengan cara manipulasi dan penggelembungan harga. MCW



memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar dari total anggaran pembangunan Rp 35 miliar (Purnomo, 2013).

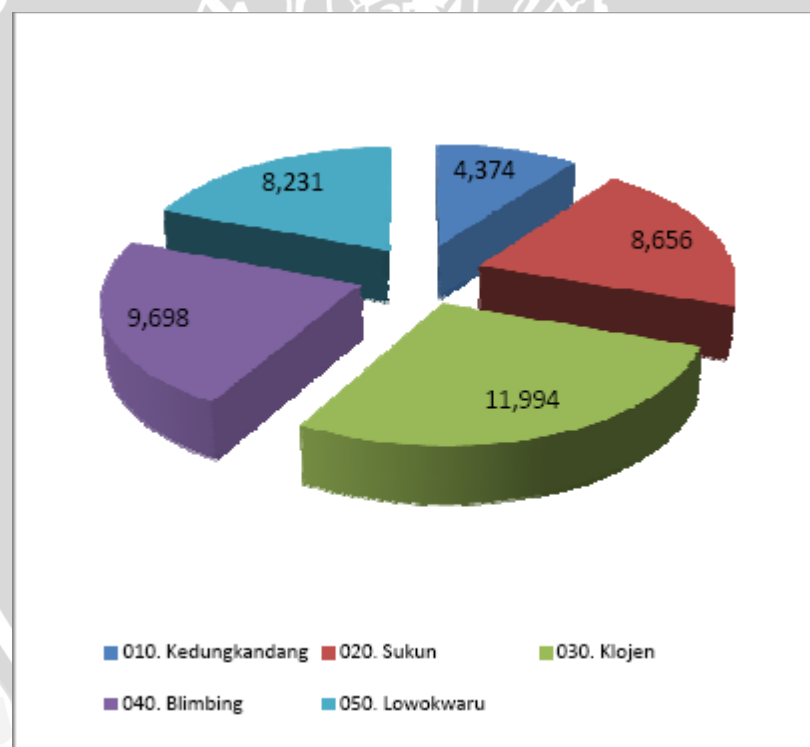
## 2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik

### a. Strategi pembangunan wilayah Buring

#### 1. Pendekatan Kompleks Wilayah (Regional Complex Approach)

Nama lain pendekatan ini adalah pendekatan horisontal, karena pendekatan ini berisi mengenai atau menekankan pada sebaran, pola, struktur, organisasi.

Gambar 6 Kepadatan Penduduk Kota Malang 2010 Menurut Kecamatan



Sumber: BPS, 2011

Menurut gambar diatas Kecamatan Kedungkandang mendapatkan prosentase jumlah penduduk terendah yaitu 10%, dimana kepadatan penduduknya

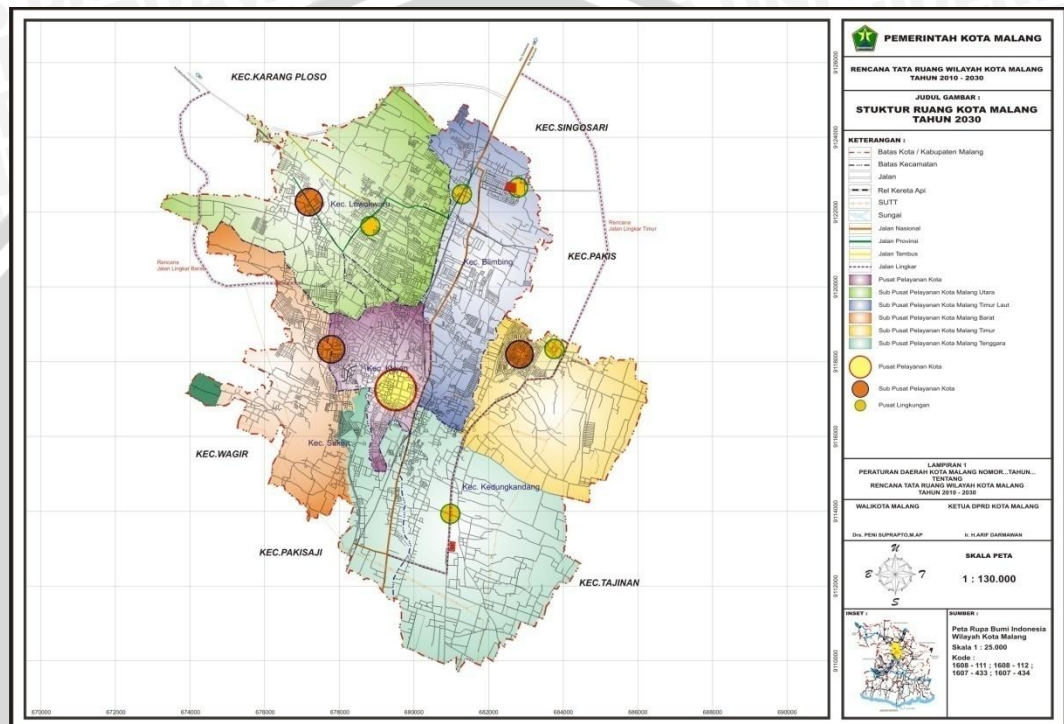
sebesar 4,374 jiwa. Wilayah Buring itu sendiri terletak pada Kecamatan Kedungkandang. Pada Kecamatan Sukun sebanyak 8,656 jiwa. Kecamatan Klojen mendapatkan sebaran penduduk paling tinggi yaitu 28% dimana jumlah penduduknya sebesar 11,994 jiwa, untuk wilayah Blimbing yang mendapatkan 23% jumlah penduduknya sebanyak 9,698 jiwa. Terakhir, pada Kecamatan Lowokwaru dengan prosentase 19% dengan jumlah penduduk 8,231 jiwa (BPS, 2011).

Untuk pola ruang, definisinya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Masih dalam Undang-Undang yang sama, pada Pasal 16 disebutkan kebijakan penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Sedangkan dalam Pasal 17 mengenai kawasan budaya, menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan dan keamanan.

Untuk rencana struktur ruang wilayah Kota Malang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 19 diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota melayani sub wilayah kota, dan pusat lingkungan yang

melayani skala lingkungan wilayah kota. Berikut akan digambarkan pada peta mengenai rencana struktur ruang Kota Malang:

Gambar 7 Peta Struktur Ruang Kota Malang



Sumber: Bappeda, 2013

Untuk organisasi, dalam mengembangkan wilayah pastinya dibutuhkan jaringan organisasi dan lembaga pemerintah, mulai dari dinas-dinas, sampai pada kecamatan dan kelurahan yang jadi sasaran pengembangan. Selain itu juga dibutuhkannya organisasi luar, bisa dari universitas atau lembaga sosial lainnya. Biasanya dalam mengembangkan wilayah, khususnya dalam mendirikan infrastruktur biasanya ada pihak swasta yang tergabung melalui sistem lelang.



## 2. Sinergisme Fungsional (*Functional Sinergism*)

Dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya. Sinergisme fungsional dapat dilakukan dengan wilayah yang sama. Berarti penggabungan institusi dalam mengembangkan wilayah. Di wilayah Buring banyak yang akan dikembangkan, hal itu tentunya tidak terlepas dari kerjasama antar institusi, yaitu institusi pemerintah, institusi swasta. Dari institusi pemerintah sudah tentu tidak lepas dari peran BAPPEDA dan dinas lainnya yang terkait pada pembangunan infrastruktur wilayah.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu A. Ratri Hendro selaku kasubid Tata Ruang bidang Tata Kota menyatakan bahwa:

“Dalam merumuskan RTRW/RDTRK/Masterplan dimana jangka waktu dari ketiganya adalah 20 tahun, dari masing-masing program terdapat indikasi program yang akan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Salah satunya dengan dinas-dinas yang bersangkutan” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Kerjasama antar pihak sangat dibutuhkan guna mencapai keberhasilan proyek pembangunan. Lanjut Ibu Kasubid Tata Ruang mengatakan bahwa:

“Terdapat konsultasi publik dalam menyusun program, karena memang hal itu disyaratkan dalam peraturan. Prosedur kerjasama apabila ada program yang ingin dibuat biasanya datang ke kecamatan terlebih dahulu, di kecamatan mengundang lurah/ RT RW/ tokoh masyarakat/ LPMK/ BKM/dunia usaha/akademisi. Akademisi biasanya diperuntukkan untuk persetujuan substansiyang dari situ terdapat tinjauan dari akademi, biasanya diwakilkan dari Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Nasional, dll.” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Kerjasama antar pihak memang harus dilakukan, karena tidak mungkin apabila terdapat proyek, semua pengerjaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri, karena hal itu dapat mengakibatkan korupsi. Salah satu wujud kerjasama adalah

dalam melajani pelayanan utilitas berupa: air, telepon, listrik. Menurut Ibu A.

Ratri Hendro selaku Kasubid Tata Ruang bidang Tata Kota:

“Penyediaan air, telepon, dan listrik disediakan bukan dari pemda, tetapi dari PDAM, Telkom, dan PLN. Ketiga BUMD tersebut merupakan badan usaha bukan pemerintah daerah” (Wawancara, Selasa, 04/03/2014).

Contoh lain adalah pada pengerjaan jembatan di wilayah Buring pemerintah bekerjasama dengan PT Taruna Adi Nugraha, selaku kontraktor Jembatan Kedungkandang (Malang Post, 2013). Contoh lain pada pembangunan balai uji KIR di wilayah Buring selain pemerintah juga dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi (Malang Post, 2013). Paparan diatas, menggambarkan adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak ataupun swasta) untuk mengembangkan wilayah Buring. Contoh lain dalam pengadaan titik lampu disepanjang koridor Jalan Mayjend Sungkono, pihak lain yang ikut terlibat selain Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) adalah PT. Sarana Dwi Makmur selaku pihak ketiga yang terlibat melalui sistem lelang. Dana Alokasi juga dari APBD sebesar Rp 2.032.516.000 (DKP-PJU, 2014).

## **b. Bentuk pelayanan publik di wilayah Buring**

### **1. Pelayanan Transportasi wilayah Buring**

#### **a) Jembatan Kedung Kandang**

Langkah pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring cukup serius. Hal itu dibuktikan dengan susunan detail desain bentuk jembatan Kedungkandang. Nantinya ukuran jembatan itu akan sebesar 113 meter untuk panjang jembatan, dengan tinggi tiang pancang 50 meter. Total Anggaran sebesar



Rp 79 miliar (Skyscrapercity, 2013). Dengan fungsi utama memperlancar akses Malang Timur. Berikut rancangan jembatan Kedungkandang di Wilayah Buring tepatnya di Jalan Mayjend Sungkono:

**Gambar 8 Rancangan Jembatan Kedungkandang**



**Sumber: Skyscrapercity, 2013**

Jembatan Kedungkandang merupakan bagian utama penunjang Jalur Lingkar Timur (Jalitim) dan bagian dari jalan arteri menuju jalan tol Malang – Pandaan. Jika jembatan ini nantinya sudah terbangun, maka secara otomatis akan banyak menguntungkan Kota Malang dari berbagai aspek kehidupan, terutama sektor perekonomian dan pariwisata.

#### **b) Terminal Hamid Rusdi**

Terminal yang diresmikan tahun (2009) ini terletak pada Kelurahan Tlogowaru dan terdapat di Jalan Mayjend Sungkono. Menurut Ibu Rusminingsih yang menjabat sebagai Kepala KUPT (Kelapa Unit Pelaksana Teknis) Terminal



Hamid Rusdi menjelaskan mengenai fasilitas di Terminal Hamid Rusdi sebagai berikut:

“Di Terminal Hamid Rusdi terdapat fasilitas Kios sebanyak 72 bedak, kios itu berfungsi sebagai sarana tempat berdagang. Fasilitas lainnya berupa 6 MCK (Mandi Cuci Kakus) dan 4 Mushola. Pada lantai atas terdapat kantor administrasi” (Wawancara, Rabu, 22/01/2014)

Dari jumlah total angkutan Kota Malang yaitu sebanyak 25 jalur (Dishub, 2013), yang memasuki terminal Hamid Rusdi hanya enam jalur saja. Keenam jalur itu antara lain:

Tabel 14 Jarak Tempuh Angkutan Kota Malang

No	Nama Jalur	Jarak Tempuh (km)	Rute
1	AMH	15,7	Arjosari-Mergosono-Hamid Rusdi
2	AH	14	Arjosari -Hamid Rusdi
3	HML	17,8	Hamid Rusdi-Mulyorejo-Landungsari
4	HST	15,7	Hamid Rusdi-Sarangan-Tasikmadu
5	LH	16,5	Landungsari- Hamid Rusdi
6	MH	8.00	Mulyorejo- Hamid Rusdi

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Selain itu, angkutan umum yang melintas jalan Mayjend Sungkono sangatlah minim. Dari 25 jumlah angkutan kota yang ada, yang melewati wilayah Buring hanya ada dua saja, yaitu: TST (Tlogowaru – Arjowinangun – Tirtosari ) dan MT (Madyopuro – Tawangmangu (MT). Berikut data mengenai angkutan umum di Kota Malang.

Tabel 15 Jumlah Angkutan Kota Malang (Mikrolet)

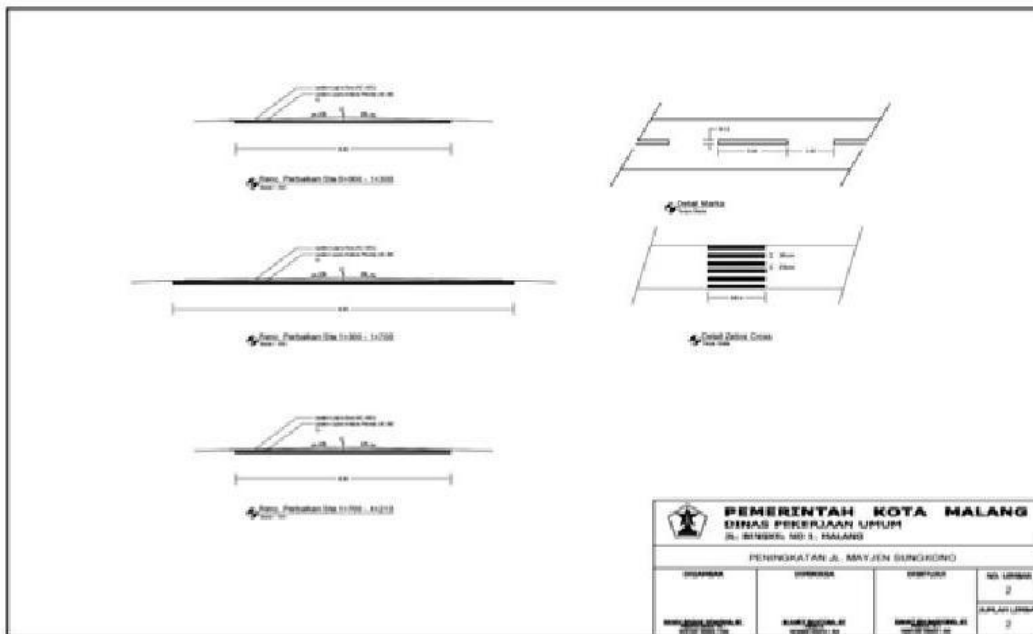
No	Nama Jalur	Jumlah	No	Nama Jalur	Jumlah
1	AH	300	14	HM	62
2	ADL	118	15	TSG	10
3	LDH	170	16	ASD	45
4	HA	160	17	AT	53
5	MM	68	18	TGT	6
6	AJH	81	19	MK	62
7	ABH	84	20	ABB	65
8	AMH	217	21	JPK	60
9	CKL	89	22	TST	86
10	LH	118	23	MT	17
11	AL	106	24	JDM	51
12	HML	45	25	MKS	11
13	HL	108			
	Jumlah	1664		Jumlah	552

Sumber: (Dishub, 2013)

### c) Pelebaran Jalan Mayjend Sungkono

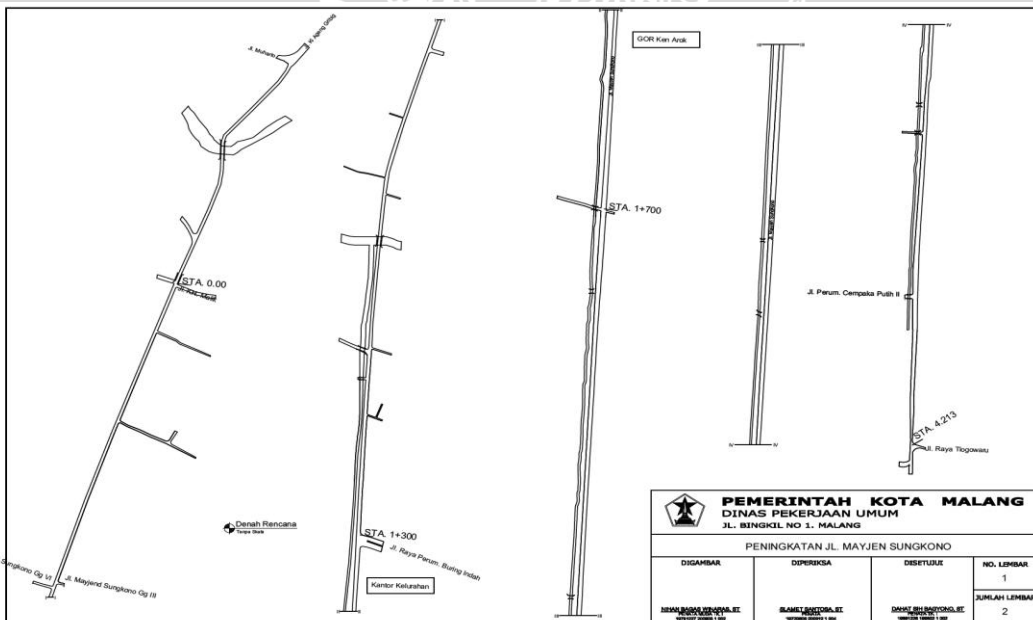
Pelebaran jalan Mayjend Sungkono masih berupa rencana, tetapi anggaran sudah ditetapkan dan akan dimulai dikerjakan pada tahun 2014 ini (Dinas PU, 2013). Berikut gambar rancangan jalan:

Gambar 9 Rancangan 1 Pelebaran Jalan Mayjend Sungkono



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2013

Gambar 10 Rancangan 2 Pelebaran Jalan Mayjend Sungkono



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2013



## 2. Pelayanan ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 45 mengenai kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota, di wilayah Buring adalah GOR Ken Arok sebagai taman olahraga. GOR Ken Arok terletak pada Kelurahan Buring. Selain itu penyediaan jalur hijau dan taman kota di Sub Wilayah Malang Timur dan Tenggara. Jalur hijau yaitu lahan disepanjang jalan Mayjend Sungkono. Selain itu juga RTH berupa hutan kota dan kebun bibit pada sub wilayah Malang Timur dan Tenggara. Berikut akan dijelaskan mengenai jenis RTH yang ada di kota:

Tabel 16 Jenis RTH

Jenis RTH	Luas (Ha)	Prosentase
Hutan Kota	33,56	0,35 %
Taman	175,49	1,82 %
Lapangan	59,19	0,61 %
Makam	94,73	0,98 %
Jalur Hijau Jalan (Median dan Boulevard)	218,64	2,26 %
sempadan SUTT	25	0,26%
Sempadan Sungai	1102,43	11,41%
Sempadang Rel KA	43,11	0,45%
Jumlah	1752,15	18,14 %

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Untuk data RTH berupa hutan kota yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Data Hutan Kota yang Dikelola Pemerintah Kota Malang

No	Nama Hutan Kota	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Kelurahan	Tahun	Kondisi
1	Ht. Kota Malabar	16.812	Jl. Malabar	Oro-oro Dowo	2000	Terpelihara
2	Ht. Kota Jakarta	11.896	Jl. Jakarta	Gading Kasri	2002	Terpelihara
3	Ht. Kota Kediri	5.479	Jl. Kediri	Gading Kasri	2002	Terpelihara
4	Ht. Kota Vellodrom	12.500	Jl. Simp D Sentani	Madyouro	2003	Terpelihara
5	Ht. Kota Pandanwangi	1.400	LA Sucipto	Pandanwangi	2004	Terpelihara
6	Ht. Kota Buper Hamid Rusdi	18.000	Kel Wonokoyo	Wonokoyo	2004	Terpelihara
7	Ht. Kota Indragiri	2.500	Jl. Indragiri	Purwantoro	2006	Terpelihara
8	Ht. Kota Eks Pasar Madyopuro	1.200	Jl. Raya Madyopuro	Madyopuro	2006	Terpelihara
9	Ht. Kota Sulfat Agung	300	Jl. Sulfat Agung	Purwantoro	2007	Terpelihara
10	Ht. Kota TPS Sulfat	700	Pertigaan Sulfat	Purwantoro	2007	Terpelihara

11	Ht. Kota Lemdikcap Pramuka	1000	Jl. Ters D. Sentani	Madyopuro	2007	Terpelihara
12	Ht. Kota Buring	80.000	Jl. Raya M. Sungkono	Buring	2010	Terpelihara
13	Ht. Kota Polehan	20.000	Polehan	Polehan	2012	Terpelihara
14	Ht. Kota Tunggul Wulung	3.500	Jl. Saxovon	Tunggul Wulung	2012	Terpelihara
15	Ht. Kota Mulyorejo	5000	mulyorejo	Mulyorejo	2012	Terpelihara
	Total luas	186.287				

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hutan kota Buring dari segi luas lahan merupakan yang terbesar, yaitu sebesar 80.000 m<sup>2</sup> atau 8 hektar. Hutan ini mulai dibangun sejak akhir tahun 2010. Menurut Bapak Slamet Husnan selaku Kepala Bidang Pertamanan-DKP hutan kota Buring ditanami berbagai macam jenis pohon, antara lain:

- a. Pohon Sengon Laut
- b. Pohon Kenari
- c. Pohon Sukun
- d. Pohon Sepau Dea



- e. Pohon Kecrutan
- f. Pohon Saman
- g. Pohon Trembesi

Hutan kota Buring beralamat di Jalan Mayjend Sungkono, Kecamatan Kedungkandang. Rancang bangun hutan kota Buring pernah meraih juara III pada sayembara yang diselenggarakan oleh Kementrian PU. Hutan Kota Buring diharapkan dapat mengemban misi hutan pendidikan dan rekreasi bagi masyarakat Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014).

Aktivitas yang ditujukan untuk hutan Kota Buring meliputi aktivitas olahraga, ekowisata, *rest area*, dan cadangan konservasi keanekaragaman hayati. Apabila masyarakat ingin menuju Hutan Kota Buring transportasi umum yang melawati adalah:

- a. MT (Mulyorejo-Tlogowaru),
- b. GML (Gadang-Mergan-Landungsari),
- c. MM (Madyopuro-Mulyorejo),
- d. JDM (Joyogrand-Dinoyo-Mergan)

### **3. Pelayanan utilitas (air, sampah, dan penerangan jalan Mayjend Sungkono)**

Bila dilihat di sepanjang jalan Mayjend Sungkono penerangan jalan yang sudah berfungsi belum menyeluruh, walaupun tiang-tiang listrik sudah terpasang. Untuk dapat langsung berfungsi memang masih harus menunggu proses. Berikut hasil wawancara dengan Agus selaku staff Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Malang:

“...masih diperlukan waktu kembali. Pembangunan ini dimulai pada tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 lalu” (Wawancara, Rabu, 22/01/2014).

Jumlah titik lampu disepanjang korior Jalan Mayjend Sungkono adalah sebanyak 35 titik.

Titik itu bermula pada PR Suketeki sampai pada perbatasan Kota Malang. Pihak lain yang ikut

terlibat selain Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) adalah PT. Sarana Dwi Makmur selaku pihak ketiga yang terlibat melalui sistem lelang. Dana Alokasi juga dari APBD sebesar Rp 2.032.516.000 (DKP-PJU, 2014).

Untuk sistem persampahan, wilayah Buring masih memiliki tempat pembuangan sampah (TPS) yang jumlahnya sedikit. Hal itu dikarenakan lahan pemerintah kota (pemkot) terbatas. Permasalahan lain karena keterbatasan kontainer sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis selaku Kepala Bidang bagian kebersihan menyebutkan bahwa:

“TPS hanya berada di Arjowinangun dan di belakang *tellecenter* Daragati. Untuk sistem pengangkutan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pada jam 08.00 WIB dengan menggunakan kontainer. Pengangkutan sampai dilakukan sampai dengan jam 12.00, sehingga pada jam 16.00 sudah tidak ada aktivitas pembuangan sampah lagi. Ada penambahan TPS tetapi masih berupa wacana. TPS itu nantinya akan dibangun di belakang Indomarco yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono. Pastinya dibutuhkan dana dan survei terlebih dahulu” (Wawancara, Rabu, 22/01/2014).



#### 4. Pelayanan infrastruktur kota

##### a) Kesehatan:

Tabel 18 Fasilitas Kesehatan Wilayah Buring-Kedungkandang

No	Data Monografi	Bumiayu	Buring	Kedungkandang	Arjowinangun	Tlogowaru	Jumlah
	Jumlah Penduduk	15067	9476	10.047	9626	6226	55960
1	Prasarana Kesehatan						
	a. Puskesmas (unit)						
	b. Posyandu (unit)	10	9	7			27
	c. Poliklinik (unit)	1		1			2

Sumber: Kecamatan Kedungkandang, 2013

Dari data diatas dapat diketahui bahwa prasarana kesehatan di wilayah Buring hanya berupa pelayanan dalam skala kecil, yaitu posyandu dan poliklinik. Fasilitas puskesmas ada tetapi berada diluar wilayah Buring, walaupun memang jaraknya tidak terlalu jauh. Jumlah posyandu di wilayah Buring sebanyak dua puluh tujuh unit, sepuluh unit di Kelurahan Bumiayu, sembilan unit di Kelurahan Buring, dan tujuh di Kelurahan Kedungkandang. Sedangkan poliklinik hanya berjumlah dua unit, letaknya masing-masing berada di Kelurahan Bumiayu dan Kelurahan Kedungkandang. Sebaiknya, wilayah Buring dalam fasilitas kesehatan memang masih sangat kurang, karena dengan jumlah penduduk 55960 jiwa (Sumber: Kecamatan Kedungkandang, 2013) sebaiknya fasilitas kesehatan juga ditambah.

##### b) Pendidikan:



Tabel 19 Fasilitas Pendidikan Buring Kedungkandang

No	Data Monografi	Bumiayu	Buring	Kedungkandang	Ajowinangun	Tlogowaru	Jumlah
1	Prasarana Pendidikan						
	a. Gedung Sekolah PAUD (unit)						
	b. Gedung Sekolah TK (unit)	5	4	5		7	24
	c. Gedung Sekolah SD (unit)	6	4	9	2	9	36
	d. Gedung Sekolah SMP (unit)	4	4	5		2	15
	e. Gedung Sekolah SMA (unit)	1	1	1			3
	f. Gedung Perguruan tinggi (unit)	1				1	2

Sumber: Kecamatan Kedungkandang, 2013

Prasarana pendidikan di wilayah Buring cukup banyak, bisa dilihat pada tabel diatas, terdapat 24 unit sekolah TK, 36 unit SD, 15 unit SMP, 3 unit SMA, dan 2 unit perguruan tinggi. Sedangkan prasarana ekonomi terdapat pasar dan industri. Pasar terletak pada Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, dan Kelurahan Tlogowaru. Masing-masing memiliki 1 unit pasar. Untuk industri terdapat 13 industri yang terletak di seluruh kelurahan di wilayah Buring.

#### c) Pelayanan lain-lain

Dari hasil penelitian di lapangan, sepanjang jalan Mayjend Sungkono terdapat beberapa fasilitas publik seperti GOR Ken Arok, Kantor Badan Narkotika Nasional, Bank BRI, Terminal Hamid Rusdi, *Block Office*, Balai Uji KIR (proses pembangunan), dan dua SPBU.

## C. Pembahasan

### 1. Perencanaan dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai kawasan hinterland

#### a. Pengenalan Wilayah Buring

Mengenal karakteristik dan profil wilayah merupakan langkah awal dalam melakukan pengembangan wilayah. Apabila mau mengembangkan suatu wilayah maka harus terlebih dahulu mengenali bagaimana karakteristik dan profilnya. Hal itu membantu untuk merencanakan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karakteristik dan profil itu dapat berupa data-data mengenai keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Penjelasan mengenai karakteristik dan profil wilayah, merupakan salah satu aspek dalam perencanaan wilayah. Pengembangan wilayah dibutuhkannya suatu perencanaan yang matang, dalam proses perencanaan ini terdapat beberapa strategi. Strategi dalam melakukan perencanaan daerah terdiri dari beberapa tahap, tahap pertama untuk melakukan pembangunan daerah dibutuhkannya pengenalan wilayah perencanaan, setelah mengenali wilayah yang akan dibangun maka tahap kedua adalah menganalisis situasi wilayah.

Pengenalan wilayah dalam tulisan ini menggunakan konsep RDA. Dalam konsep RDA ada beberapa alat yang dibutuhkan, antara lain: yaitu peta wilayah, perjalanan eksploratif, dan kalender musim (letak geografis, iklim dan curah hujan, pegunungan dan sungai). Selain ketiga alat tersebut ada juga alat tambahan yang diperlukan yaitu: data potensi wilayah atau desa, laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan disuatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu, dll. Apabila peneliti tidak memenuhi semua alat diatas, maka tahap pengenalan wilayah akan digabungkan dengan cara lain, yaitu dengan cara Identifikasi Kebijakan Pembangunan atau Profil Wilayah.

Hasil dari perjalan eksploratif peneliti dengan informan yang juga tinggal di wilayah buring adalah menetapkan dan membatasi wilayah buring pada koridor Jalan Mayjend Sungkono (Malang Tenggara-Malang Timur), yang disekelilingnya terdapat beberapa kelurahan, peneliti tidak mengambil semua kelurahan yang ada,tetapi hanya lima kelurahan, yaitu: sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun. Untuk koridor jalan Mayjend Sungkono menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pasal 22 mengenai Rencana Sistem Prasarana Utama merupakan Jalan Lingkar Timur Kota Malang.

Untuk melakukan RDA diperlukannya sumber-sumber data sekunder (dokumen resmi) dan data primer (hasil kunjungan lapangan), dari gabungan antara kedua sumber data tersebut dapat dirumuskan suatu hasil RDA yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (Riyadi, 2003:34):

1. *Service Centers* (Pusat-Pusat Pelayanan)

Berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan yang ada disuatu wilayah, dapat dikemukakan data-data penting yang diperlukan sebagai bahan untuk merumuskan perencanaan pembangunan wilayah.adapun data tersebut dapat berupa gambaran tentang lokasi pusat-pusat pelayanan, baik yang bersifat *publik sector*, seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan sebagainya. Kemudian juga dapat digambarkan ratio pusat-pusat pelayanan dengan jumlah penduduk, sehingga dapat diperkirakan tingkat aksesibilitasnya.

Gambaran potensi

dan masalah-maslah yang dihadapi oleh suatu wilayah juga dapat menjadi bahan yang diperlukan dalam rangka merumuskan PPD dan sebagainya.



## 2. *Market Town* (Pusat-Pusat Pasar)

Dalam konteks ini, akan diketahui sistem perekonomian penduduk dengan berbagi aktivitas perekonomiannya, tingkat aksesibilitas pusat-pusat perekonomian penduduk suatu wilayah atau sebaliknya. Sarana pasarana penunjang aktivitas perekonomian, seperti transportasi, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern dapat juga digambarkan disini.

## 3. *Regional Centers*

Dalam hal ini dikemukakan tentang data-data dan informasi yang menyangkut hubungan suatu daerah dengan daerah lainnya, yang dimungkinkan dengan pemanfaatan sarana prasarana yang menunjang hubungan perdagangan yang lebih luas, dan sebagainya. Pusat-pusat pelayanan yang ada didaerah-daerah lain dan memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi dan aktivitas masyarakat perlu diperhitungkan. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki data-data dari wilayah-wilayah disekitarnya.

Untuk *service centers*, menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pasal 20 mengenai Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota sistem pusat pelayanan kegiatan Kota Malang, meliputi: Pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yakni pada Kawasan Alun-alun dan sekitarnya, dengan fungsi:

- a) Pelayanan primer : pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, dan peribadatan;
- b) Pelayanan sekunder : pendidikan, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, perumahan serta ruang terbuka hijau.

Masih menurut Peraturan Daerah yang sama, koridor jalan Mayjend Sungkono merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota. Penjabarannya adalah sebagai berikut: dimulai pada Pasar Gadang dan sekitarnya, kawasan Jalan Mayjen Sungkono dan sekitarnya, serta Jalan Satsuit Tubun – Gadang – Bumiayu dan sekitarnya, melayani Sub wilayah kota Malang Tenggara, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi :

- a) Pelayanan primer : perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olah raga, gedung pertemuan, industri, dan perumahan;
- b) Pelayanan sekunder : perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta RTH;

Untuk *Market Town* (Pusat-Pusat Pasar), sistem perekonomian penduduk wilayah Buring dengan berbagi aktivitas perekonomiannya, sarana pasarana penunjang aktivitas perekonomian, seperti transportasi, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern adalah sebagai berikut: di wilayah Buring, sistem perekonomian penduduknya paling banyak adalah buruh tani, swasta, dan tani. Untuk fasilitas perekonomian di wilayah Buring terdapat Pasar dan industri (lihat tabel 11).

Potensi yang dapat diandalkan di wilayah Buring, terutama pada sepanjang koridor Jalan Mayjend Sungkono adalah pertanian dan perdagangan. Lahan pertanian di wilayah Buring merupakan terbesar di Kota Malang. Selama tahun 2008 luas tanam dan panen tanaman padi sawah di wilayah Buring sebesar 612 hektar dengan rata-rata produksi 6,2 ton per hektar. Sedangkan untuk jagung seluas 370 dengan rata-rata produksi 3,8 ton ( Kecamatan Kedungkandang, 2009). Untuk perdagangan, masyarakat di sepanjang Jalan Mayjend Sungkono banyak yang membuka usaha secara mandiri. Masyarakat sudah mampu membuka usaha rumahan yang dimana hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat. Pekerjaan sebagai

pedagang di wilayah Buring sebanyak 1715 (lihat tabel 10), yang mana merupakan pekerjaan tertinggi keempat setelah buruh tani, swasta, dan petani.

Di bagian *Regional Centers*, wilayah Buring berdekatan dengan wilayah Gadang, Sawojajar, dan Alun-Alun Kota Malang (lihat gambar 5). Sesuai dengan teori milik Myrdal (era 1950-an). Myrdal menjelaskan bahwa adanya hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya (*hinterland*) dan menggambarkan keduanya dengan istilah *backwash and spread effect*. Wilayah Buring berkedudukan sebagai wilayah *hinterland* dan wilayah Gadang, Sawojajar, dan Alun-Alun Kota Malang sebagai wilayah maju. Maju disini dalam arti pelayanan fasilitasnya (perdagangan jasa, pemerintahan, ekonomi, dll) lebih lengkap daripada wilayah Buring. Diperjelas lagi oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah salah satunya adalah sebagai *growth center*. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah (Buring saja), namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

Wilayah Gadang terdapat pasar induk, yakni Pasar Gadang, dan banyak angkutan kota dan bus yang berhenti disana. Sehingga akses menuju Gadang sangatlah tinggi. Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pasal 50 mengenai Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa ada rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa Pasar Tradisional, yaitu kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya (pasar basah) tetap menggunakan Pasar Induk Gadang dan dikembangkan ke arah areal eks Terminal Gadang dan pasar induk Gadang juga melayani perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan



menengah. Hal ini tentu akan mempengaruhi masyarakat Buring dalam memenuhi kebutuhannya. Walaupun di wilayah Buring terdapat pasar, tetapi dari kelengkapan jaug dibawah Pasar Gadang.

Sedangkan wilayah Sawojajar terdapat berbagai sektor perdagangan mulai dari makanan sampai pada busana, karena memang pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pasal 50 mengenai Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa akan di rencanakan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa Pusat Perbelanjaan, yang salah satunya pengembangan perdagangan barang campuran, antara lain *garment*, elektronik dan jasa mulai dari Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Jaksa Agung Suprpto, sepanjang Jalan Letjend. Sutoyo, Jalan Letjend. S. Parman, Jalan Jend. Ahmad Yani, dan Jalan Raya Sawojajar.

Masih pada pasal yang sama di wilayah Sawojajar juga di rencanakan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa toko modern, berupa pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar. Selain itu juga pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan, mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir, supermarket yaitu pada pusat perdagangan di Gunung Buring, Mulyorejo, dan Sawojajar. Pada Pasal 55 mengenai Rencana Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal, di Sawojajar juga ada pengembangan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Disana banyak sektor yang sangat memengaruhi masyarakat untuk datang.

Untuk wilayah alun-alun, disana banyak sekali komoditas yang menarik, karena memang alun-alun kota menjadi pusat pertumbuhan Kota Malang. Pelayanan utama yang terdapat di Alun-Alun Kota adalah pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, dan peribadatan. Untuk pelayanan sekunder meliputi pendidikan, fasilitas umum dan sosial,

perdagangan dan jasa, perumahan serta ruang terbuka hijau. Alun-alun Kota atau Alun-Alun merdeka juga dikembangkan sebagai obyek pariwisata. Di wilayah ini terdapat banyak tempat belanja, dari Matahari, Ramayana, Mitra, Gajah Mada, dan masih banyak lagi. Selain itu juga terdapat kantor-kantor, antara lain: kantor pajak, kantor Bank Indonesia, kantor pos. selain itu juga terdapat tempat beribadah dalam skala besar, yaitu masjid Jami' dan Gereja.

Mnurut Riyadi (2003:32) selain RDA ada juga metode lain yang ruang lingkupnya lebih sempit yaitu *Rapid Rural Appraisal/ RRA* dan *Rapid Settlement Analysis/ RSA*. Dua metode itu tidak jauh berbeda dengan konsep RDA. RRA merupakan metode yang digunakan untuk mengenal ruang, situasi dan kondisi, sosio-ekonomi, karakteristik dan sebagainya di wilayah pedesaan.

Selain RDA, pengenalan wilayah lain dapat digunakan dengan cara mengetahui profil wilayah yang akan dikembangkan. Profil wilayah memuat mengenai gambaran umum kondisi yang didalamnya menggambarkan keadaan alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, kelembagaan, dll, yang ditungkan melalui data sekunder maupun primer.

Selain kedua cara di atas, penulis juga menggunakan cara lain yaitu dengan identifikasi kebijakan pembangunan yang ada di wilayah Buring. Di dalamnya memuat mengenai serangkaian rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah Buring. Perlu diingat pula bahwa tugas seorang perencana pembangunan tidak berhenti sampai dengan merumuskan kebijakan pembangunan saja, melainkan harus secara konsisten dan terus menerus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasinya di lapangan.

Dari serangkaian kebijakan yang ada, terdapat kebijakan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan. Kebijakan yang belum berjalan diantaranya membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, hal itu menunda penyediaan jalur hijau yang



nantinya akan dibangun di jalan lingkaran timur tersebut. Kebijakan lain yang belum terealisasi adalah peningkatan fungsi jalan Mayjend Sungkono (pelbaran jalan dan pembangunan jembatan Kedungkandang).

Untuk pengalihan fungsi terminal Gadang menuju Terminal Hamid Rusdi/Tlogowaru sudah dilaksanakan, hanya saja belum optimal, karena fungsi terminal Tlogowaru kurang maksimal. Masih banyak yang tetap menggunakan terminal Gadang sebagai tempat pemberhentiannya. Selain itu, dalam masalah persampahan, DKP belum menambah jumlah TPS yang ada di wilayah Buring. Disana jumlah TPS masih sangat terbatas.

Dalam penyediaan RTH pemerintah sudah menyediakan berupa hutan kota dan kebun bibit. Selain itu juga terdapat GOR Ken Arok yang menjadi taman olahraga. Untuk rencana kawasan perumahan, sudah banyak pembangunan yang dilakukan. Selain perumahan, terdapat pula rusunawa, tetapi penggunaannya belum maksimal. Untuk rencana kawasan perdagangan dan jasa berupa kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan, mulai dari toko atau warung, pertokoan, pasar, grosir, supermarket belum dilakukan.

Dalam hal membangun kawasan perkantoran berupa *Block Office* sudah dilakukan. Pembangunan tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan wilayah Buring, karena pembangunan itu menyebabkan banyaknya masyarakat dari wilayah lain yang memasuki Buring. Sedangkan untuk rencana kawasan peruntukan lainnya berupa pengembangan fasilitas umum pendidikan tinggi sudah dilakukan. Pendidikan tinggi yang terdapat di wilayah Buring adalah Universitas terbuka, dan Politeknik Kota Malang.

Sedangkan perencanaan wilayah lainnya adalah tahap zonasi lahan, dimana dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang penggunaan utamanya yang diperbolehkan adalah penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan untuk mendukung maksud-maksud penggunaannya



secara berkelanjutan dan sejalan dengan praktek pengelolaan lahan yang benar serta sesuai dengan rumusan kebijakan penggunaannya, untuk memenuhi pembangunan dan pelestariannya (Riyadi, 2003:36).

Adapun tujuan dari zonasi lahan adalah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan karakter yang dimiliki oleh suatu wilayah. Sehingga tidak adanya pemaksaan pembangunan yang terjadi. Wilayah Buring disini menjadi wilayah pengembang, dimana banyak sekali pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, pemerintah perlu mengingat bahwa dalam menetapkan kebijakan pembangunan tidak boleh melanggar karakteristik wilayah Buring, karena apabila pemerintah sampai memaksakan akan terjadi bencana alam atau bencana sosial yang terjadi. Hal itu dikarenakan pembangunan yang tidak tepat sasaran, baik fungsi atau letak infrastrukturnya.

Dalam RTRW sudah ditentukan model pembangunan sesuai dengan fungsi lahan wilayahnya. Selain itu, dengan adanya zonasi lahan diharapkan lahan yang digunakan dapat terus terkendali dan terjamin kelestariannya. Sehingga zonasi lahan bertujuan untuk mengelompokkan lahan yang mempunyai kemampuan yang sama (kesamaan dalam persyaratan pengelolaannya) dalam rangka menyusun pedoman penggunaan lahan tersebut (Riyadi, 2003 :38).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah dikelompokkan bahwa wilayah Buring sebagai fungsi utama perkantoran, perdagangan dan jasa, gedung pertemuan, industri, perumahan, dan sarana olahraga. Dari keenam fungsi diatas harus sesuai dengan kondisi wilayah Buring. Apabila ada fungsi yang merusak alam wilayah Buring atau mengancam keadaan masyarakat maka pemerintah masih belum bisa memanfaatkan wilayah Buring secara benar dan tepat guna.

## B. Analisis Situasi

Setelah mengenal wilayah Buring, maka strategi kedua adalah dengan menganalisis situasi. Dengan adanya analisis situasi wilayah perencanaan diharapkan mampu menganalisis masalah dan potensi yang nantinya akan tergambarkan dalam “*frame condition*” (gambaran mengenai kondisi wilayah). Dalam *frame condition* terdapat gambaran wilayah mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi alasan wilayah tersebut harus dikembangkan, potensi yang ada sesuai dengan keadaan wilayahnya, gambaran penduduk yang nantinya merupakan sasaran dari proses pembangunan wilayah, dan yang terakhir adalah target yang ingin dicapai dari proses pembangunan tersebut.

Pada penelitian ini meliputi koridor jalan Mayjend Sungkono, dimana disepanjang jalan terdapat sebagian Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun. Wilayah itu merupakan wilayah *hinterland*. Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Orde IIA Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tidak lepas dari kemajuan antar kecamatan di Kota Malang. Wilayah Buring sendiri termasuk dalam Kecamatan Kedungkandang. Wilayah Buring memiliki variabel-variabel yang dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde perkotaan, antara lain: (1) Jumlah penduduk, (2) banyaknya fasilitas yang dimiliki, dan (3) tingkat aksesibilitas dari wilayah tersebut terhadap wilayah lain.

Di wilayah Buring tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota. Wilayah Buring mempunyai fasilitas ekonomi berupa pasar dan kompleks industri (contoh: industri rokok). Kegiatan ekonomi lainnya banyak dilakukan oleh aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat melalui toko-toko atau warung. Fasilitas lain yang dimiliki Buring adalah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit bersalin dan adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bumiayu. Sedangkan pendidikan banyaknya sekolah negeri mulai dari



sekolah dasar sampai pada universitas. Fasilitas kota lainnya di wilayah Buring ada unit Bank BRI, Terminal Hamid Rusdi, bengkel, pom bensin, dll. Fasilitas-fasilitas tersebut tidak diragukan lagi akan menciptakan daya tarik bagi wilayah Buring.

Secara ekonomi wilayah *hinterland* bisa menjalankan perekonomian secara mandiri, walaupun ada beberapa barang dan jasa yang dalam pendistribusiannya masih tergantung pada kota besar, tetapi secara garis besar kawasan *hinterland* atau kota satelit dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya atau penduduk sub-urban.

Berikut akan menerangkan bagaimana Wilayah Buring dapat membuka lapangan pekerjaan. Pada aspek mata pencaharian, dapat dilihat begitu banyak pegawai dan non pegawai (lihat tabel 10) dimana hal tersebut memengaruhi daerah lain terhadap wilayah buring, demikian juga sebaliknya masyarakat Buring juga tergantung pada wilayah lain karena ada yang berprofesi pada sektor swasta, dimana dia bekerja pada orang lain yang tentu saja ada yang berada diluar wilayah Buring. Sedangkan ada profesi pedagang, dimana ia membutuhkan pembeli yang tentu saja tidak hanya berada pada wilayah Buring saja, dan orang luar wilayah Buring termudahkan karena adanya pedagang. Pada aspek pekerjaan lain ada tukang, petani, buruh tani, dan jasa yang juga menyumbangkan kegiatan perekonomian terhadap wilayah Buring.

Dari tabel 10 data monografi wilayah Buring, dapat dilihat bahwa untuk menetapkan sasaran pengembangan wilayah cenderung pada masyarakat yang bekerja dibidang pertanian. Selain itu apabila melihat luasnya kedungkandang yaitu sebesar 39.89 km<sup>2</sup> (BPS, 2011) maka pengembangan diperuntukkan agar banyak masyarakat yang datang untuk bermukim. Dari data BPS (2011) kepadatan penduduk Kecamatan Buring paling terendah (lihat gambar 11), yaitu sebesar 4,374/km<sup>2</sup>. Padahal luas wilayahnya merupakan yang terbesar yaitu sebesar 39,89 km<sup>2</sup>.



Sehingga bentuk pengembangan yang dilakukan berupa pembangunan infrastruktur agar masyarakat tertarik untuk tinggal di wilayah Buring. Kesimpulannya, pengembangan dilakukan agar wilayah di kota Malang merata, tidak ada kesenjangan antara wilayah satu dengan yang lainnya.

Untuk tahun kedepan wilayah Buring akan dijadikan wilayah dengan basis utama diperuntukkan bagi perumahan. Karena hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa pengembangan wilayah Buring lebih kepada pembangunan fisik. Perencanaan fisik sendiri merupakan tipe perencanaan pembangunan, yang berarti perencanaan yang memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah, misalnya dalam hal tata guna lahan, perencanaan jalur transportasi, dan penyediaan fasilitas umum lainnya (Tarigan:14). Sehingga sasaran lain adalah bagi masyarakat luar Buring agar mau tinggal di sana. Wilayah Buring merupakan wilayah yang masih memiliki lahan yang cukup luas. Dengan luas lahan itu, menurut BAPPEDA fungsi utama wilayah Buring adalah perumahan, karena itu pemerintah mengembangkan infrastruktur agar wilayah Buring semakin strategis dan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan masyarakat.

Aspek strategis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, sarana prasarana yang nantinya dapat menjadi potensi wilayah dan dari situ pengembangan wilayah akan dilakukan dan menghasilkan sinergisme yang bisa dan saling berkaitan antar kesemuanya. Untuk sumber daya alam wilayah Buring masih memiliki potensi yang cukup besar. Selama tahun 2008 luas tanam dan panen tanaman padi sawah adalah 612 hektar dengan rata-rata produksi 6,2 ton per hektar. Sedangkan untuk jagung seluas 370 dengan rata-rata produksi 3,8 ton (Kecamatan Kedungkandang, 2009). Kecamatan Kedungkandang sendiri merupakan kecamatan dengan hasil panen tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Malang. Selain itu

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 wilayah Buring terdapat Ruang Terbuka Hijau yang akan dikembangkan berupa hutan kota dan kebun bibit.

Dari uraian diatas potensi yang bisa diandalkan pada wilayah Buring adalah pada sektor pertanian, dimana lahan yang digunakan mempunyai kriteria subur, resapan tanah, dan jenis tanah yang cocok. Hal ini berhubungan dengan pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi didalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor (Tarigan, 2012:36). Menurut Tarigan (2012:38) dalam pendekatan sektoral untuk setiap sektor atau komoditi dibuat analisis sehingga dapat memberi jawaban tentang:

- a) Sektor/komoditi apa yang memiliki *competitive advantage* di wilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat bersaing di pasar global;
- b) Sektor/komoditi apa yang basis dan non basis;
- c) Sektor/komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi;
- d) Sektor/komoditi apa yang memiliki *forward linkage* dan *backward linkage* yang tinggi;
- e) Sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut;
- f) Sektor/komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja per satuan modal per satu hektar lahan.

Atas dasar berbagai kegiatan tersebut diatas, dapat ditetapkan skala prioritas tentang sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan diwilayah tersebut berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Kecamatan Kedungkandang sendiri memiliki luas lahan sawah sebesar 619 Ha, dan lahan bukan sawahnya dibedakan menjadi lahan kering sebesar 1284,31 Ha dan lainnya sebesar 21 Ha (BPS,2011). Antar kecamatan luas tersebut terbesar kedua, setelah pada urutan pertama ditempati oleh Kecamatan Sukun. Pada lahan bukan sawah terdiri atas bangunan atau pekarangan dengan luas 1874,73 ha, kemudian tegal, kebun, ladang, dan huma sebesar 1118,38 ha (BPS, 2011). Lahan kering di wilayah Buring merupakan yang terbesar diantara kecamatan-kecamatan lainnya.lahan tersebut kebanyan berasal dari wilayah Buring.

Luas panen dan produksi palawija di Kecamatan Kedungkandang untuk jagung sebesar 1054 ton dengan luas panen 262 ha. Sedangkan luas panen ubi kayu sebesar 144 ha dengan



produksi 215 ton (BPS, 2011). Total panen tersebut merupakan yang terbesar antara kecamatan lainnya di Kota Malang. Mengenai produksi tanaman perkebunan, Kecamatan Kedungkandang meraih hasil produksi terbesar dibandingkan kecamatan lain. Dapat dilihat hasil produksi tanaman kelapa sebesar 332,70 ton dan tanaman kopi sebesar 1,80 ton. Hal itu semakin menetapkan kawasan Kecamatan Kedungkandang khususnya wilayah Buring sebagai penghasil utama pertanian di Kota Malang.

Selain potensi sumber daya alam, dalam mengembangkan wilayah harus memperhitungkan kualitas sumber daya masyarakat Buring, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui jumlah penduduk, pendidikan, dan pekerjaan. Sumber daya manusia di wilayah Buring juga cukup besar dalam jumlah yaitu sebesar 55960 jiwa. Dengan jumlah itu mata pencaharian masyarakat lebih banyak sebagai buruh tani sebesar 5396 jiwa, kemudian diurutkan kedua bekerja sebagai pegawai swasta sebesar 4311 jiwa, setelah itu masyarakat Buring banyak yang bekerja sebagai tani sebesar 2588 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat wilayah Buring yang terbanyak adalah lulusan Sekolah Dasar sebanyak 34.870 jiwa. Setelah itu pada urutan kedua ditempati oleh lulusan SMA sebanyak 27.167 jiwa, dan pada urutan ketiga masyarakat lulusan SMP dengan jumlah 22,767 jiwa (Kecamatan Kedungkandang, 2013).

Dari uraian diatas mengenai aspek strategis dalam perencanaan wilayah, apabila pembangunan ditujukan untuk perumahan maka akan terjadi ancaman bagi masyarakat wilayah Buring. Ancaman tersebut akan menghasilkan pengalihan pekerjaan bahkan pengangguran, karena SDM di wilayah Buring yang paling banyak adalah buruh tani dan tani pada posisi ketiga, ditambah lagi SDM tersebut tingkat pendidikan terbanyak adalah lulusan SD dan SMP (posisi ketiga). Hal itu merupakan permasalahan makro dalam perencanaan wilayah. Perencanaan makro berarti murni permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah



secara keseluruhan (makro) (Tarigan, 2012:25). Proyek itu sendiri adalah menjadikan wilayah Buring sebagai kawasan perumahan. Permasalahan itu timbul dari dampak sikap sosial masyarakat. Menindaklanjuti dari permasalahan makro, ketidaksesuaian lokasi merupakan hal yang pas dari permasalahan diatas.

Mengingat wilayah Buring akan digunakan untuk perumahan, banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali, karena dalam melakukan perencanaan wilayah, perlu memperhatikan keadaan masyarakat. Dalam pembangunan pada umumnya dikenal ada dua macam paradigma pembangunan yang kebanyakan dianut, yaitu: (1) paradigma keteknikan (*technical paradigm*) dan (2) paradigma kemasyarakatan (*community paradigm*). Paradigma keteknikan mengambil penekanan pada metode ilmiah sebagai cara yang paling objektif dan rasional untuk menampilkan informasi bagi para pemegang keputusan dalam upaya pengembangan wilayah dimana harus ada parameter yang jelas dan terukur. Informasi yang dijadikan dasar dalam pengembangan haruslah bersifat ilmiah, dan kuantitatif, dan bersifat bebas nilai.

Wujud paradigma keteknikan, menurut penulis adalah program kebijakan yang akan dilakukan, dimana dari program-program pembangunan tersebut direncanakan oleh orang yang ahli dengan perencanaan yang objektif dan rasional, guna menghasilkan pembangunan (infrastruktur pelayanan) yang mampu bertahan kokoh. Contohnya dalam penyelenggaraan perumahan. Dimana pemerintah membangun rusunawa agar mampu menampung masyarakat dalam jumlah tertentu, sudah pasti pemerintah memiliki alasan yang rasional dan terukur.

Sedangkan dalam paradigma kemasyarakatan (*community paradigm*) menekankan pada kondisi masyarakat yang diantaranta termasuk keinginan, kebutuhan, nilai-nilai yang ada, dan kebiasaan masyarakat yang nantinya akan berpotensi mengalami dampak dari hasil pengembangan wilayah itu sendiri. Jika perumahan terus dilakukan tanpa melihat kondisi sosial

masyarakat maka masyarakat Buring sendirilah yang akan kehilangan pekerjaan, karena pemerintah belum menemukan solusi dalam mengatasi pengalihan mata pencaharian yang akan terjadi nanti. Perlu diingat dalam mempelajari manusia tidak hanya terbatas dalam memahami mengenai kondisi fisiknya saja tetapi juga memahami bagaimana manusia sebagai sosok yang memiliki sentuhan daya cipta, daya rasa, daya karsa yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Setiap perbuatan tidak hanya mengandalkan naluri dan insting saja tetapi juga terdapat *intellectual intelligence*, *emosional intelligence*, dan *spiritual intelligence*.

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kegiatan dan proses pengembangan. Peran masyarakat disini sebagai perencana yang menentukan arah pengembangan wilayah, implementasi dari perencanaan itu, dan sebagai pengawas pengembangan yang dilakukan. Sehingga pengembangan itu akan terkonsep sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tujuan pengembangan itu sendiri dilakukan agar menciptakan kemudahan bagi para warga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam hal penetapan kebutuhan program, hal itu dilakukan untuk memecahkan masalah dan menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, ditetapkanlah kebutuhan program/ proyek. Kebutuhan program/ proyek ini bersifat menyeluruh yang didasarkan pada hasil analisis yang mendalam, sehingga program-program yang akan diimplementasikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai *target group* dari program-program tersebut. Permasalahan yang ingin diselesaikan di wilayah Buring adalah dengan menggeser kegiatan yang terlalu kompleks di wilayah lain di Kota Malang ke wilayah Buring, agar kegunaan wilayah Buring semakin berdaya.

Agar wilayah Buring semakin maju, maka diadakannya proyek, antara lain proyek jembatan kedungkandang, yang nantinya menjadi rute jalan lingkar timur. Jika proyek ini telah



selesai maka, pengguna jalan akan semakin tertarik untuk melewati wilayah Buring, apalagi di Kabupaten Malang (daerah Gondanglegi dan sekitarnya), karena Jalan Mayjend Sungkono merupakan salah satu jalan tercepat untuk memasuki kawasan Kota Malang. Jembatan Kedungkandang juga merupakan salah satu rute jalan lingkar timur Kota Malang.

Dalam bidang kesehatan sudah didirikannya RSUD di Kelurahan Bumiayu. RSUD ini merupakan fasilitas pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang, karena di Kota Malang memang terdapat RSUD Saiful Anwar tetapi kepemilikannya merupakan milik Pemerintah Provinsi. Pembangunan RSUD di Kelurahan Bumiayu sudah dapat digunakan tetapi belum maksimal, baru dapat digunakan dibagian polikliniknya saja.

## **2. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sebagai upaya peningkatan pelayanan publik**

### **a. Strategi pembangunan wilayah Buring**

Seperti yang diketahui bahwa pengembangan wilayah dan pelayanan publik adalah salah satu tugas penting dari pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat tanpa terkecuali. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan kemudahan fasilitas yang sama, untuk itu perlu diadakan pengembangan wilayah. Pengertian pengembangan wilayah menurut Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil (2003:2) dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI”.

Konsep pengembangan merupakan penggabungan dari tinjauan teoritis dan praktis yang terus berkembang yang kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan wilayah. Komponen-



komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. “Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu” (Sulistiono, 2010:14).

Jenis atau sektor layanan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang adalah ([http://www.malangkota.go.id/pdf/Bahan\\_Web\\_rtrw.pdf](http://www.malangkota.go.id/pdf/Bahan_Web_rtrw.pdf)):

**1. Rencana Pengembangan Fasilitas Perkotaan**

Fasilitas perkotaan yang akan direncanakan di Kota Malang meliputi fasilitas perdagangan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan fasilitas rekreasi dan olahraga serta perkantoran.

**2. Rencana Sistem Transportasi Kota Malang**

Sistem transportasi merupakan salah satu hal terpenting dalam perencanaan kota. Rencana sistem transportasi di Kota Malang meliputi rencana jaringan jalan dan sarana transportasi. Di Kota Malang direncanakan pembangunan jalan lingkaran yang akan mempengaruhi struktur tata ruang kota dimana aksesibilitas yang tinggi akan memacu perkembangan wilayah di sepanjang jalan lingkaran sehingga muncul pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi bangkitan dan tarikan pergerakan menuju pusat kota. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, antara lain pengembangan Jalan Lingkaran Barat dan Jalan Lingkaran Timur.

**3. Rencana Sistem Prasarana Kota Malang**

Rencana sistem prasarana di Kota Malang meliputi peningkatan kualitas akses internet terutama di daerah dengan guna lahan seperti perkantoran, pendidikan, perdagangan jasa, pariwisata, dan kesehatan. Untuk rencana pengembangan air bersih meliputi pengembangan wilayah pelayanan diarahkan ke kelurahan/desa yang sebagian dan/atau belum dilayani oleh sistem perpipaan PDAM, pengembangan jaringan air bersih juga diarahkan pada permukiman baru yang akan direncanakan dengan pendistribusian mengikuti jaringan jalan; dan pembatasan penyediaan air bersih non PDAM yang memanfaatkan sumur dan pompa mengingat pengeboran sumber air bawah tanah yang dapat mengakibatkan penurunan tanah. Untuk rencana sistem persampahan meliputi penambahan lokasi TPS pada daerah yang tidak memiliki TPS atau jarak pencapaian sumber sampah ke TPS terdekat > 1 km, penambahan luas lahan TPA Supit Urang dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, dan pembangunan Laboratorium Gas Metan di lokasi TPA Supit Urang. Sedangkan rencana sistem drainase meliputi pembangunan inlet di kanan-kiri jalan pada kawasan genangan dan pada jalan-jalan yang belum ada inlet drainasenya, pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat, pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase dengan mengangkat sedimen dan sampah yang ada di saluran untuk semua saluran drainase.

**4. Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**

Sesuai kondisi geografisnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang direncanakan dengan memperhatikan ruang terbuka hijau yang menyatu dengan alam pegunungan disekitar kota, perencanaan ruang terbuka hijau ini didukung oleh aneka ragam tumbuhan yang tumbuh subur serta udara yang sejuk sepanjang tahun.

Dari keempat point yang akan dikembangkan diatas, pemahaman terhadap pola wilayah juga dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan keputusan-keputusan pembangunan melalui proses pengembangan wilayah *hinterland* yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dengan mempertimbangkan tingkat distribusi dan kontribusi penduduk dalam suatu wilayah, khususnya yang terkait dengan masalah fungsi-fungsi pelayanan (fasilitas perkotaan, sistem transportasi, sistem prasarana, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau).

Jika melihat pelayanan publik diatas, maka mencakup sarana prasarana pada daerah perkotaan. Sudah diketahui bahwa daya tarik wilayah Buring pada masa yang akan datang sangat tinggi, karena didalamnya menyediakan kesempatan kerja yang luas, pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan, dan menyajikan kemudahan aktifitas yang beragam.

Pemerintah Kota Malang, khususnya BAPPEDA membangun wilayah Buring cenderung pada infrastruktur fisiknya. Hal itu tidak lain untuk menarik minat masyarakat pada wilayah Buring agar masyarakat mau datang dan dapat menarik investor. Pembangunan Buring itu sendiri sudah dilakukan semenjak tahun 1990-1995an. Pada tahun itu Buring biasa disebut sebagai Buring Satelit. Tetapi baru terlihat kemajuan beberapa tahun yang lalu, karena banyak infrastruktur yang mulai dibangun, mulai dari GOR Ken Arok sampai pada *Block Office*. Kendala pengembangan wilayah Buring adalah wilayahnya kurang diminati, angka kriminalitas tinggi, dan untuk mendapatkan akses air bersih sulit, karena wilayah Buring sendiri merupakan daerah pegunungan, dimana kontur tanah tinggi yang menyebabkan air sulit untuk naik keatas.



Pada tahun 2006, pemerintah Kota Malang mulai merencanakan kawasan Malang Timur-Kecamatan Kedungkandang, dimana wilayah Buring sebagai pusatnya. Hal itu mulai memindahkan fokus pembangunan yang tadinya berpusat pada wilayah Malang Tengah (pusat Kota Malang). Pada wilayah Malang Utara sudah banyak terdapat pembangunan, antara lain: Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Politeknik, dan berbagai Universitas lainnya, selain itu juga ada pembangunan Malang Town Square (MATOS). Di wilayah Malang barat sudah ada pembangunan Universitas Merdeka, Plaza Dieng, dll

Strategi pengembangan wilayah Buring, cenderung pada pendekatan kompleks wilayah (*Regional Complex Approach*). Pendekatan ini berisi mengenai pada sebaran penduduk, pola, struktur, organisasi. Sebaran penduduk di Kecamatan Kedungkandang (letak wilayah Buring) paling rendah. Hal ini disebabkan perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Kecamatan Buring merupakan kecamatan terbesar di Kota Malang. Tetapi dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan luas lahan, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk yang kurang. Lihat Kecamatan Klojen yang mempunyai luas lahan sebesar 8,83 km<sup>2</sup> (luas terkecil dibandingkan kecamatan lain) dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 105,907 jiwa. Mengakibatkan Kecamatan Klojen menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi (lihat gambar 11). Hal itu dikarenakan penduduk tersebar secara merata dengan kondisi luas lahan yang ada. Sehingga kebanyakan lahan terpakai dan berfungsi.

Senada dengan teori lokasi model Vonthunen yang berasumsi bahwa tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. Wilayah Buring merupakan wilayah *hinterland* yang keberadaannya berada diperbatasan Kota Malang. Hal itu berarti tingkat kepadatan wilayah (dengan kegiatan perdagangan, jasa, pemerintahan, dll) kurang dibandingkan di pusat kota (Malang Tengah). Hal itu juga berimbas



pada tingkat sewa tanah. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa tanah maka makin besar pula kemungkinan bahwa kegiatan tersebut berada pada pusat kota. Sehingga wilayah Buring secara letak wilayah berada dipinggiran Kota Malang, yang menyebabkan tingkat kepadatan wilayah kurang dan sewa tanah menjadi murah.

Berbeda dengan kondisi wilayah Kedungkandang (letak wilayah Buring) dimana masih banyak lahan yang kosong dan tidak terpakai, jumlah penduduknya pun (pada tahun 2010) tidak kalah dibandingkan kecamatan lain (Klojen dan Blimbing), hanya saja hal itu tidak membuat kepadatan penduduk tinggi. Kecamatan Kedungkandang mendapatkan prosentase jumlah penduduk terendah yaitu 10%, dimana kepadatan penduduknya sebesar 4,374 jiwa. Hal itu dikarenakan luas wilayah Buring sebesar 39,89 km<sup>2</sup> dengan populasi 150,262 pada tahun 2000 dan 1174,477 pada tahun 2010. Sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 2,72 penduduk per tahun, laju itu merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Tetapi walaupun begitu kepadatan penduduk di Kecamatan Kedungkandang terendah, yaitu sebesar 4,374 penduduk/km<sup>2</sup>. Pengembangan wilayah biasanya menuju pada wilayah yang berada di perbatasan dan perlu memperhatikan apakah berkembang meluas secara horizontal atau vertikal (Adisasmita, 2005:79).

Sebaran penduduk disini sangat penting dalam memperkirakan tingkat aksesibilitas wilayah Buring dan pengaruh perkembangan terhadap ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi pasti juga berhubungan erat dengan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk di dalam wilayah Buring. Apakah dengan dikembangkannya wilayah itu dapat menambah pemasukan dan menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Apalagi akses transportasi terhadap wilayah Buring sudah banyak yang dilakukan walaupun memang belum selesai secara sempurna

(jembatan kedungkandang, pemanfaatan jalan Mayjend Sungkono sebagai jalan lingkaran timur, dan pelebaran jalan).

Jumlah penduduk juga sangat memengaruhi perkembangan suatu wilayah, apabila wilayah tersebut banyak dihuni atau didatangi oleh masyarakat lain, maka wilayah tersebut bisa dipastikan akan cepat berkembang. Apalagi fungsi utama wilayah Buring sebagai perumahan. Sehingga dapat disimpulkan apabila suatu wilayah sudah memiliki infrastruktur dan akses yang baik maka akan banyak pendatang yang menghampiri wilayah itu bahkan menetap untuk seterusnya.

Untuk pola ruang, yang dikembangkan oleh gagasan dari Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang melahirkan konsep pola dan struktur ruang yang menjadi inspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Pola ruang di Kota Malang terbagi atas pola ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budaya. Fungsi lindung di wilayah Buring berada pada RTH, lahan sepanjang sungai, kawasan lindung. Wilayah Buring memiliki RTH berupa GOR Ken Arok sebagai taman olahraga, jalur hijau yaitu lahan disepanjang jalan Mayjend Sungkono, hutan kota dan kebun bibit. Kawasan lindung ini merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kawasan lindung mempunyai fungsi utama sebagai penyimpanan cadangan air, penstabilan debit air, penyedia oksigen, dll (Tarigan 2012:60).

Sedangkan fungsi budaya di wilayah Buring berupa perumahan, kompleks perkantoran, dan fasilitas umum yang dibangun dilahan yang semestinya (tidak mengganggu kawasan lindung). Di wilayah Buring banyak perumahan yang dibangun, yaitu Perumahan Griya *Buring Permai*, Rusunawa, dll. Selain itu juga ada kompleks perkantoran *Block Office*, kantor kelurahan/kecamatan, unit kantor Bank BRI, dll. Untuk fasilitas umum banyak sekolah negeri yang terdapat disana, sekolah swasta juga menjamur di wilayah Buring. Wilayah Buring juga



mempunya Rumah sakit Bersalin Refa Husada, BNN, Pusat layanan autis, dll. Kawasan budidaya merupakan kawasan dimana mausia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau beraktifias untuk memperoleh pendapatan/ kemakmuran (Tarigan, 2012: 61).

Apabila pengembangan fungsi budidaya ini tidak mengikuti pola konsentris, maka akan membentuk pusat-pusat kota (yang baru) yang berada di sekitar pusat kota utama. Kota utama dan kota-kota baru tersebut membentuk semacam kerucut kepadatan kegiatan yang tidak sama tingkat intensitasnya satu sama lainnya” (Adisasmita, 2005:79). Sehingga apabila nantinya di wilayah Buring kepadatannya bertambah tinggi maka mungkin sekali wilayah ini menjadi pusat kota yang baru karena kompleksitas kegiatan dan penduduk disana.

Struktur ruang wilayah Kota Malang, wilayah Buring dijadikan pusat pelayanan kota Malang Tenggara (Kasubid Tata Ruang-BAPPEDA). Lahan di wilayah Buring nantinya akan sebagian besar akan digunakan sebagai perumahan. Hal itu didukung dengan ditingkatkannya infrastruktur pelayanan, agar masyarakat mau pindah atau menetap di wilayah Buring.

Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam mengelola kota dan pengembangan wilayah adalah faktor pengaruh terhadap variasi spasial sentrifugal yang didalamnya terdapatnya enam faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah secara sentrifugal. Faktor-faktor tersebut menurut Yunus (2005:60) mengutip dari (Lee,1979) adalah:

...(a) faktor aksesibilitas (*accessibility*), (b) faktor pelayanan umum (*public service*), (c) karakteristik lahan (*land characteristics*), (d) karakteristik pemilik lahan (*land ownerscharacteristics*), (e) keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur tata guna lahan(*regulatory measures*), dan (f) prakarsa pengembang (*developers initiatives*).



Dari faktor diatas terdapat faktor layanan umum yang mampu mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah secara sentrifugal. Di wilayah Buring sudah mulai ditingkatkan faktor pelayanan umumnya. Hal itu sudah tertulis dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota, dan dalam penelitian ini sudah dijelaskan pada bagian penyajian data mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah Buring sesuai RTRW Kota Malang. Dalam uraian pembangunan itu semuanya merupakan layanan publik, mulai dari pembangunan jalan lingkar timur, pembangan infrastruktur sosial masyarakat, penyediaan infrastruktur utilitas, sampai pada pemenuhan ruang terbuka hijau.

Dalam mengembangkan wilayah terdapat campur tangan pemerintah. Hal itu termasuk dalam sinergisme fungsional (Functional Sinergism). Dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya.

Institusi atau lembaga bertugas *me-manage* kota dan wilayah itu sendiri. Intervensi pemerintah pada wilayah Buring khususnya, berupa Pemerintah Kota Malang beserta institusi atau badan yang terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga diatas merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah. BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh BAPPEDA. Selain kedua lembaga itu, ada lembaga lain yang ikut campur, tetapi harus melihat sektor apa yang ingin dibangun. Misalnya ingin membangun transportasi, maka hubungannya dengan Dinas Perhubungan, atau ingin menata RTH wilayah maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota yang dilibatkan.

Selain dari lembaga pemerintah, ada juga pihak swasta yang dilibatkan. Biasanya pemerintah mengeluarkan tender apabila ada proyek yang ingin dibangun. Contoh pada pengerjaan jembatan di wilayah Buring pemerintah bekerjasama dengan PT Taruna Adi Nugraha, selaku kontraktor Jembatan Kedungkandang (Malang Post, 2013). Contoh lain pada pembangunan balai uji KIR di wilayah Buring selain pemerintah juga dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi (Malang Post, 2013). Paparan diatas, menggambarkan adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak ataupun swasta) untuk mengembangkan wilayah Buring.

Selain sinergisme fungsional, terdapat pula sinergisme spasial (*Spatial Sinergism*). Konsep ini bukan merupakan konsep baru dalam pengembangan wilayah, konsep ini sudah banyak dikenal dan dipakai. Ide dalam konsep ini adalah melihat potensi yang di miliki oleh suatu wilayah (Potensi wilayah Buring dapat dilihat pada tabel:5-8) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kemudahan fasilitas bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan wilayah lain.

Sinergisme spasial diharapkan mampu menciptakan sinergitas yang baik di antara beberapa wilayah yang saling bekerjasama, sehingga dapat menciptakan hasil yang baik dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing. Diharapkan dalam kerjasama itu tidak terjadi *conflict interest* yang dapat merugikan wilayah yang bersangkutan. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih belum bisa melakukan cara ini, karena dalam memanfaatkan potensi wilayah Buring pemerintah masih mengelolanya sendiri, dan belum bekerjasama dengan wilayah lain. Sama halnya dengan membangun infrastruktur pelayanan publik, pemkot masih mengerjakan sendiri tanpa keterlibatan dengan pemerintah wilayah lain.

Selain cara-cara diatas, terdapat pula tujuan dan sasaran pemerintah dalam melakukan campur tangan pengelolaan kota dan pengembangan wilayah menurut Sadyohutomo (2008:18) adalah sebagai berikut:



- a) Penyedia barang publik dan pelayanan publik.
- b) Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
- c) Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah (khususnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik).
- d) Kelestarian lingkungan
- e) Menjaga keutuhan bangsa dan negara

Dari tujuan dan sasaran diatas, faktor pelayanan publik selalu termuat, dan hal itu berarti antara keduanya tidak dapat dipisahkan, atau bisa disimpulkan adanya keterkaitan hubungan antara pelayanan publik dengan manajemen wilayah dan kota. Untuk lebih menguatkan lagi bentuk campur tangan dari pemerintah adalah pembuatan dokumen kebijakan berupa RTRW, yang didalamnya tertuang pengaturan mengenai pemanfaatan ruang, yang terdiri dari: perumahan, industri, jasa, wilayah konservasi dan lindung, pertanian, prasarana umum, selanjutnya terkait dengan penyediaan pelayanan publik (ketertiban dan keamanan, penyediaan prasarana umum, penyediaan utilitas seperti listrik, air, telekomunikasi, dll, dan pelayanan administrasi pemerintahan), dan yang terakhir adalah redistribusi sumber daya.

Setelah diuraikan mengenai bentuk intervensi pemerintah, maka hasil akhir dari semua itu bisa menimbulkan dua dampak, yang pertama adalah, apabila pemerintah berhasil menata ruang kota dan wilayah dengan baik dengan mengikuti peran, tujuan, dan bentuk campur tangan yang telah dijelaskan diparagraf sebelumnya, maka hasil yang didapatkan adalah rasa nyaman dan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan wilayah Buring. Apalagi sekarang wilayah Buring menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Dampak yang kedua adalah, apabila pemerintah tidak berhasil menata kota dan wilayah tersebut maka efek buruk bagi masyarakat dan daerah sekitarnya akan timbul.

Untuk kelengkapan infrastruktur yang dapat dijadikan sebagai potensi, menurut Kustiawan (2009:139) mengutip dari B.Tjahjati S. Soegijoko (2005) peranan suatu wilayah meliputi penyediaan publik, yang disalah satunya adalah pelayanan produksi yang menyediakan input



atau terkait dengan aktivitas ekonomi lain sebagai bagian dari suatu proses produksi. Contohnya: transportasi, komunikasi, utilitas (listrik, air, gas). Di wilayah Buring pelayanan utilitas berupa listrik dan air sudah ada, hanya saja menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 34, pemerintah Kota Malang mengembangkan wilayah pelayanan yang akan diarahkan ke kelurahan yang sebagian dan atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Wilayah Buring termasuk kedalam wilayah yang belum terlayani, yaitu: Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang.

## **b. Bentuk pelayanan publik di wilayah Buring**

### **1. Pelayanan Transportasi Wilayah Buring**

Dalam perkembangan kota dan wilayah sistem prasarana utama, khususnya transportasi sangat penting untuk dipelajari. Gagasan dari Sutami juga menjelaskan bahwa dalam pengembangan wilayah perlu diadakannya pembangunan infrastruktur yang intensif. Kemudian gagasan milik Poernomosidhi yang memunculkan konsep hierarki kota dan hierarki prasarana jalan.

Transportasi merupakan fasilitas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Di wilayah Buring yaitu pada koridor jalan Mayjend Sungkono ada beberapa permasalahan yang timbul terkait sektor transportasi. Antara lain: kemacetan, minimnya angkutan kota, ruas jalan yang sempit, penerangan yang kurang, dan tidak efektifnya terminal Hamid Rusdi.

Fasilitas transportasi di wilayah Buring yaitu di sepanjang koridor Jalan Mayjend Sungkono masih sangat memprihatinkan. Banyak agenda yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki layanan di bidang perhubungan ini. Dalam RTRW Kota Malang juga banyak rencana yang dibuat untuk memperbaiki sistem transportasi, mulai dari Pasal 14 pada point 3a

mengenai membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, pada pasal 23 pemerintah Kota Malang merencanakan peningkatan fungsi jalan di wilayah Buring, yaitu koridor Jalan Mayjend Sungkono, Pasal 14 pada point 3c adanya pengembangan prasarana transportasi yaitu mengalih fungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi.

Untuk pembangunan jalan lingkar yang dibawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum masih belum terimplementasikan. Karena menurut lampiran pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang baru akan dikerjakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. Tetapi untuk studi kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Timur sudah dilakukan oleh BAPPEDA. Untuk perkiraan biaya sampai pada Rp 174.750.000.000 dengan sumber dana dari APBD Kota dan APBD Provinsi (BAPPEDA, 2013).

Dari rencana-rencana tersebut, belum ada yang sepenuhnya dilakukan. Untuk membangun jaringan jalan lingkar pun sulit karena jembatan Kedungkandang pun belum siap, peningkatan ruas jalan pun belum dilakukan. Jalan di Mayjend Sungkono masih cukup sempit untuk menampung volume kendaraan. Karena disana sangat sering terjadinya kemacetan apalagi pada hari-hari efektif. Pembangunan jembatan Kedungkandang juga tersandung masalah karena ada dana yang dibawa lari oleh kontraktor, sehingga pembangunan jembatan berhenti total. “DPRD Kota Malang berencana mengalihkan sisa dana pembangunan jembatan Kedungkandang untuk pendidikan gratis SD dan SMP. Sisa dana jembatan bermasalah itu diketahui mencapai Rp 47 miliar” (Malang Post:2013). Saat ini jembatan masih belum dirampungkan, karena memang ada masalah mengenai dana dari pembangunan jembatan itu, dan masyarakat setempat juga tidak tahu sampai kapan akan dilanjutkan lagi pembangunan tersebut. Dari peristiwa tersebut

pemeintah belum mencapai pelayanan prima karena pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kurang.





Gambar 11 Keadaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang



Sumber: Malangraya, 2013

Jalan lingkar merupakan aspek yang penting dalam mengurangi kemacetan dan mengefektifkan Terminal Hamid Rusdi yang terdapat di wilayah Buring. Untuk sekarang memang terminal Hamid Rusdi masih belum dapat digunakan secara maksimal. Banyak faktor yang melatar belakangi, salah satunya aktifitas masyarakat masih banyak di pasar Gadang, sehingga banyak yang membutuhkan tenaga angkutan umum atau bus. Di Pasar Gadang pergerakannya sangat tinggi. Selain itu juga karena faktor jalan, dimana angkutan kota dan bus tidak dimudahkan. Baru nanti akan efektif apabila Jalan Lingkar Timur sudah dibangun, karena otomatis memudahkan sopir dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan aksesibilitas yang tinggi sehingga memacu perkembangan wilayah disepanjang jalan lingkar dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kemudian pada Pasal 24 mengenai Rencana Sistem Prasarana Utama direncanakan adanya pengadaan bus kota, dengan wilayah pelayanan di sepanjang Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Timur. Semakin lama pada wilayah Buring akan semakin padat akan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Sehingga dibutuhkannya bus kota untuk mengantisipasi kebutuhan perangkutan masyarakat.

Mengenai pengadaan bus yang nanti mempunyai rute ke Terminal Hamid Rusdi dan Jalan Lingkar Timur yang nantinya dibutuhkan dalam mengantisipasi kepadatan penduduk di wilayah

Buring, karena nantinya wilayah itu akan semakin padat dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Dalam lampiran RTRW Kota Malang Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 pengadaan bus kota mulai di realisasi karena sudah dilakukan pada tahun 2012, tetapi memang saat ini, bus yang melewati wilayah Buring belum ada, karena jalan masih belum memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan besar.

Untuk peningkatan ruas jalan masih belum dilakukan, karena menurut Kasi bagian jalan di dinas PU bagian Bina Marga memang baru tahun ini akan dilaksanakan, hal itu juga perlu menunggu proses yang panjang, karena persiapan dan penghitungan pelebaran ruas jalan belum diputuskan. Wilayah buring semakin padat, seyogiaya pemerintah tidak menunda-nunda pembangunan yang sudah ditetapkan dan sudah direncanakan dalam RTRW Kota Malang.

Untuk pengalihan fungsi, dari terminal Gadang ke terminal Hamid Rusdi sudah dilakukan, tetapi ada masalah yang terjadi, para sopir angkutan tidak berhenti dan memulai rute dari sana. Mereka tetap menggunakan terminal bayangan (terminal gadang) sebagai tempat berhenti tujuan. Sehingga fungsi dari terminal Hamid Rusdi tidak digunakan dan terbengkalai. Fasilitas-fasilitas yang ada juga tidak terpakai dan sangat mubazir, karena biaya perawatan terminal tetap harus dilakukan tiap waktunya tetapi terminalnya saja tidak berfungsi.

Menurut Sadyohutomo (2008:65) masalah lanjutan yang disebabkan oleh buruknya penyediaan prasarana, khususnya prasarana jalan adalah terjadinya kondisi transportasi yang buruk. Kondisi tersebut meliputi sebagai berikut:

- 1) Kemacetan lalu lintas (*traffic jams*) dan lalu lintas merambat (*traffic congestion*).
- 2) Kesemrawutan lalu lintas, campur aduk antara:
  - a) Transporasi lokal dan transporasi antar regional
  - b) Kendaraan lambat dengan kendaraan cepat



- c) Kendaraan tradisional/ kendaraan tidak bermesin dengan kendaraan bermesin, dan
  - d) Pedagang kaki lima di trotoar dengan pejalan kaki, dimana terjadi perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki lima.
- 3) Polusi udara dari knalpot mobil-mobil tua.
  - 4) Kendaraan umum (bus, angkot, angdes, dan kereta api) yang tidak aman, nyaman, dan tepat waktu.
  - 5) Kebijakan pemerintah yang memanjakan penggunaan kendaraan pribadi dan mengabaikan pembinaan pada transportasi umum massal.
  - 6) Prasarana jalan yang cepat rusak walau diperbaiki setiap tahun. Hal ini disebabkan beban kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan nasional untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang terpadu antarmoda transportasi.

Di wilayah Buring, hasil dari peneliti melakukan riset mengemukakan bahwa pada jalan Mayjend Sungkono kerap terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu. Biasanya pagi dan sore. Hal itu disebabkan karena volume kendaraan terlalu tinggi dan alasan lain adalah sering terjadinya bus mogok karena muatan terlalu banyak. Di jalan Mayjend Sungkono terdapat tanjakan yang cukup tinggi, sehingga untuk mobil berukuran besar (truk, bus, dll) tidak disarankan melintas.

Hal yang menyebabkan masalah diatas juga dikarenakan ruas jalan yang sempit. Memang ada upaya pembangunan *fly over*, bahkan masyarakat setempat yang tinggal disana sudah digusur dan sudah mendapatkan ganti rugi tetapi proyek pembangunan *fly over* tidak dilanjutkan. Bisa dilihat pembangunan itu mangkrak dan semakin membuat wilayah Buring terlihat berantakan.



Selain itu, angkutan umum yang melintas jalan Mayjend Sungkono sangatlah minim. Dari 25 jumlah angkutan kota yang ada, yang melewati wilayah Buring hanya ada dua saja, yaitu: TST (Tlogowaru – Arjowinangun – Tirtosari ) dan MT (Madyopuro – Tawangmangu (MT). Berikut data mengenai angkutan umum di Kota Malang.

Mengenai Rencana Sistem Prasarana Utama terdapat rencana peningkatan terminal dan sub terminal di wilayah Buring, yaitu pengalihan fungsi Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi; dan pembangunan terminal barang di sekitar Terminal Hamid Rusdi yang merupakan jalur Jalan Lingkar Timur. Untuk pengalihan fungsi Terminal Gadang menuju Terminal Hamid Rusdi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan tetapi masih belum maksimal. Jika melihat keadaan terminal masih sangat sepi dan peminatnya pun sedikit, tetapi untuk sarana dan fasilitas terminal sudah lengkap. Memang perlu upaya bersama dari Pemerintah dan masyarakat agar terminal Hamid Rusdi dapat berfungsi dengan baik.

## **2. Pelayanan ruang terbuka hijau**

Dalam penyediaan layanan ruang terbuka hijau, pemerintah semakin sadar akan pentingnya kondisi lingkungan terhadap pembangunan. Berbeda dengan tujuan pembangunan pada era orde baru dengan dibentuknya PELITA I dan II pada saat itu pembangunan wilayah masih berorientasi pada pembangunan sektor pertanian. Hal itu juga diperkuat oleh Marbun (1979:117-118), yang mengatakan bahwa semakin disadari bahwa sasaran kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh negara yang sedang berkembang dewasa ini bukanlah lagi semata-mata sasaran tradisional pembangunan seperti: pertumbuhan pendapatan nasional yang maksimal, kesempatan kerja penuh, dan stabilitas.

Pelayanan akan ruang hijau sudah semakin digalakkan dan menjadi tujuan pembangunan, seperti yang dikutip oleh Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil (2003:2) mengenai arti pengembangan wilayah, yaitu:

Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Dalam kalimat tersebut tertulis meningkatkan keserasian antar wilayah dan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan keserasian antar wilayah dapat diartikan sebagai pembangunan yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja melainkan juga harus diseimbangkan dengan adanya ruang terbuka hijau, sedangkan pembangunan yang berkelanjutan juga diartikan sebagai pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan.

RTH di perkotaan terdiri atas RTH privat dan RTH publik. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Identifikasi jenis-jenis RTH yang telah tersedia yang akan dibangun dalam sebuah wilayah menjadi pertimbangan dalam menentukan RTH jenis apa yang akan dibangun. Hal itu berfungsi agar penyebaran RTH lebih variatif dan komplementer. Contohnya apabila dalam suatu wilayah banyak dibangun RTH yang berfungsi sosial seperti taman, maka pemilihan jenis RTH lain dapat dipertimbangkan, misalnya RTH yang berfungsi ekologis seperti hutan kota.

Jika dilihat dari ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh wilayah Buring, maka peneliti akan fokus pada lahan yang difungsikan sebagai ruang hijau. Ruang hijau berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Di wilayah Buring RTH itu meliputi GOR Ken Arok, Jalur Hijau (fokus pada sepanjang Jalan Mayjend Sungkono), hutan



kota (lihat tabel 17), dan kebun bibit. Lahan tersebut banyak yang ditumbuhi oleh tanaman atau pohon-pohon.

“Dalam pengembangan hutan kota dan kebun bibit, yang dimana lahan kosong di wilayah Buring masih sangat banyak dan belum termanfaatkan sudah mulai dilakukan. Rentang waktu yang diberikan mulai dari tahun 2010-2020. Anggaran yang digunakan dari APBD Kota Malang. Perkiraan biaya sekitar 1.500.000.000” (Lampiran 4 RTRW Kota Malang). Penanggung jawab diberikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Selain DKP, RTH juga menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dispora bertanggung jawab dalam peningkatan Gor Ken Arok sebagai Taman Olahraga, dengan rentang waktu mulai tahun 2010 sampai tahun 2020. Selain ke dua dinas dinas tersebut RTH diwilayah Buring berupa sawah dan perkebunan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian.

Untuk data RTH berupa hutan kota yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di wilayah Buring adalah hutan kota Buring. Dari segi luas lahan hutan, hutan Buring merupakan yang terbesar, yaitu sebesar 80.000 m<sup>2</sup> atau 8 hektar. Hutan ini mulai dibangun sejak akhir tahun 2010. Hutan kota Buring beralamat di Jalan Mayjend Sungkono, Kecamatan Kedungkandang. Rancang bangun hutan kota Buring pernah meraih juara III pada sayembara yang diselenggarakan oleh Kementerian PU. Hutan Kota Buring diharapkan dapat mengemban misi hutan pendidikan dan rekreasi bagi masyarakat Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014).

Jika dilihat dari data tersebut sangat dimungkinkannya wilayah Buring menjadi kota yang potensinya adalah berupa taman. Kota taman adalah kota yang dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan kota industri yang dirasakan semakin memburuk dimana kota taman merupakan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar itu dikelilingi oleh jalur hijau



(daerah pertanian). Kota taman mengandung di dalamnya jalur dan kantong-kantong fasilitas taman umum, pekarangan hijau, selain terdapat fasilitas-fasilitas lengkap untuk kehidupan sosial beserta kemudahan-kemudahan lainnya.

Aktivitas yang ditujukan untuk hutan Kota Buring meliputi aktivitas olahraga, ekowisata, *rest area*, dan cadangan konservasi keanekaragaman hayati. Pemahaman terhadap pola wilayah juga dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan keputusan-keputusan pembangunan melalui proses pengembangan wilayah *hinterland* yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan mempertimbangkan tingkat distribusi dan kontribusi penduduk dalam suatu wilayah, khususnya yang terkait dengan masalah fungsi-fungsi pelayanan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

### 3. Pelayanan utilitas wilayah Buring

Jika melihat pelayanan publik dalam suatu wilayah, maka mencakup sarana prasarana pada daerah perkotaan. Untuk itu dalam buku Adisasmita (2005:110) menyatakan sebagai berikut:

Prasarana perkotaan meliputi jalan/jembatan, air bersih, persampahan, sanitasi, ruang parkir, taman kota, dan sebagainya. Yang termasuk sarana perkotaan adalah terminal, pasar, pemadam kebakaran dan sebagainya. Sedangkan fasilitas pelayanan ekonomi terdiri dari bank, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Dan fasilitas pelayanan sosial misalnya meliputi perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, olah raga, rekreasi, dan sebagainya.

Dalam hal Sistem Penyediaan Air Minum Kota yang termasuk dalam prasaran perkotaan, pada wilayah Buring ( koridor Jalan Mayjend Sungkono yang disepanjang jalan itu ada sebagian Kelurahan Kedung Kandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Arjowinangun) perlu melakukan pengembangan karena dari kelurahan itu belum semuanya terlayani oleh PDAM. Hasil penelitian mengatakan bahwa beberapa masyarakat Buring ada yang mandi dan mencuci kebutuhan di sepanjang sungai. Padahal sungai itu memiliki kebersihan yang tidak terjamin.

Gambar 12 Kondisi Masyarakat Buring



Sumber: Penulis (2013)

Dalam memberikan pelayanan publik, khususnya kebutuhan air harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Selain itu mutu, proses, dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi kenyamanan. Jika dilihat dari gambar diatas patut dipertanyakan apakah jika masyarakat masih mandi di sungai biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan PDAM terasa mahal. Apalagi pekerjaan utama masyarakat wilayah Buring adalah di sektor pertanian. Mandi di sungai merupakan hal yang tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusi yang diberikan bisa dengan dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut (Sadyohutomo, 2009:144):

1. Pendekatan institusional untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam pengadaan air baku, yaitu dengan masalah pembagian hak dan tanggung jawab antar daerah mengenai penyediaan, penyaluran, penggunaan, dan konservasi sumber air baku.
2. Efisiensi manajemen untuk mengatasi kebocoran teknis dan keuangan.



3. Penetapan tarif yang yang ditempuh melalui keterbukaan informasi dengan para pelanggan.
4. Bagi PDAM baru yang ukuran pelanggannya dibawah 10.000 unit perlu mengevaluasi kembali mengenai hitungan efisiensi berkaitan dengan skala pelayanan.

Kondisi sampah di wilayah Buring memang bukan permasalahan yang utama, tetapi sampah juga perlu diperhatikan untuk kehidupan yang nyaman. Untuk sistem persampahan di wilayah Buring baru akan ada rencana penambahan sejumlah TPS, karena pada lampiran RTRW Kota Malang rentang waktu yang diberikan mulai tahun 2010-2020. Penanggung jawab masalah TPS diberikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, yaitu :

1. Kelurahan Tasikmadu;
2. Kelurahan Bumiayu;
3. Kelurahan Wonokoyo;
4. Kelurahan Tlogowaru;
5. Kelurahan Tulusrejo;

Permasalahan terkait sampah di wilayah Buring dikarenakan lahan pemerintah kota (pemkot) terbatas. Lahan banyak yang dimiliki oleh masyarakat sekitar, sehingga pemerintah Kota tidak bisa secara mudah mendirikan TPS. Selain itu permasalahan lain yang timbul karena keterbatasan kontainer sampah. Untuk mengangkut sampah, selain mengangkut dengan kontainer juga menggunakan truk penggerobak sampah.

Dalam meminimalisir jumlah sampah di TPS, masyarakat membuang sampah dilakukan di rumahnya masing-masing. Jumlah sampah banyak dari perumahan-perumahan masyarakat. Selain dari perumahan, sampah di sepanjang sungai juga menjadi masalah yang tidak dapat dikendalikan jumlahnya.



Dalam menanggulangi sampah di wilayah Buring, direncanakan akan dibangunnya TPS di tanah aset pemkot yang terletak di belakang Indomarko (gudang barang Indomaret yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono). Untuk menanggulangi sampah di sungai sebaiknya diadakan pelatihan budidaya cacing. Budidaya cacing disini fungsi utamanya bukan untuk beternak cacing, tetapi memanfaatkan cacing untuk mengolah sampah organik. Sampah organik tersebut dijadikan sebagai bahan makanan bagi cacing. Sedangkan sampah organik yang tidak dapat diuraikan oleh cacing diberikan kepada Bank Sampah.

Dalam memberikan pelayanan publik, menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Apabila melihat dari ketersediaan sumber daya air, wilayah Buring sudah lebih maju dibandingkan wilayah Buring yang dahulu, karena dulu akses air bersih sangat sulit didapatkan. Hal itu berarti pemerintah sudah menjalankan kewajibannya, karena sumber daya air adalah hak dari seluruh lapisan masyarakat. Kekurangannya adalah masyarakat kurang mengetahui hak-haknya, karena masih ada beberapa masyarakat yang mandi disungai karena sudah keterbiasaan.

Dalam penyediaan sampah, pemkot (khususnya DKP) masih belum bisa menyediakan dengan maksimal, dikarenakan adanya keterbatasan lahan dan dana untuk menyediakan dan membangun fasilitas. Padahal di wilayah Buring semakin hari semakin padat dengan aktivitas, baik aktivitas rumahan atau aktivitas kerja, yang mana membutuhkan fasilitas sampah yang memadai, dan tidak kekurangan. Di wilayah Buring masih memiliki tempat pembuangan sampah (TPS) yang jumlahnya sedikit dibanding wilayah lain. TPS hanya berada di Arjo winangun dan di belakang *tellecenter* Daragati. Untuk Terminal Hamid Rusdi mempunyai TPS tersendiri.

Kedua, Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Dalam penyediaan air dan sampah biaya yang harus dikeluarkan masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Biaya penyediaan air bukan berarti membeli airnya, melainkan membayar sejumlah uang untuk perawatan, karena PDAM harus merawat mesin dan perpipaan yang ada. Sedangkan untuk membayar sampah, harganya juga tidak memberatkan karena biasa dibayar lewat pertemuan warga di wilayah Buring.

Ketiga, mutu, proses, dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penyediaan air sudah tersedia dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam membantu kebutuhan sehari-hari hanya saja kondisi masyarakat Buring yang masih ada beberapa yang bercirikan masyarakat pinggiran dengan mandi di sungai. Untuk TPS memang harus terus dibenahi mengingat infrastruktur yang ada jumlahnya masih sedikit dan terbatas.

#### **4. Pelayanan Sosial Kesehatan dan Pendidikan di Wilayah Buring**

Dalam pengembangan wilayah perlu diadakannya pembangunan infrastruktur yang intensif. “Selain itu juga pemenuhan terhadap pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan” (Kustiwan 2009:139). Di wilayah Buring infrastruktur yang telah berjalan secara intensif adalah infrastuktur pelayanan di bidang pendidikan (lihat tabel 19).

Fasilitas pelayanan dibidang kesehatan masih belum maksimal. Karena sepanjang koridor jalan Mayjend Sungkono hanya ada Rumah sakit ibu dan anak “Refa Husada” yang mempunyai fasilitas yang layak untuk dikatakan sebagai rumah sakit.



Gambar 13 Rumah Sakit Bersalin Refa Husada



Sumber: Penulis (2013)

Dari hasil penelitian, memang ada masyarakat yang bekerja sebagai bidan tetapi hal tersebut tidak cukup karena di wilayah Buring yang terdiri dari 5 kelurahan yang mempunyai jumlah 55960 jiwa (Kecamatan Kedungkandang:2013), dimana fasilitas kesehatan sangat penting untuk diadakan. Memang di wilayah Buring rencananya akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kelurahan Bumiayu.

Gambar 14 Pembangunan RSUD Kota Malang di Kelurahan Bumiayu Wilayah Buring



Sumber: Syaiful Afandi, 2014 (Media Center Kendedes)



“Pembangunan RSUD Kota Malang dimulai sejak 2011 dengan anggaran multiyears. Pada tahun 2011, dana yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp10 miliar dan 2012 sebesar Rp11 miliar” (Fn-online, 2013). RSUD Kota Malang ini diagendakan bahwa tahun 2014 ini sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sukarelati:2012).

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas servis yang diberikan pemerintah. Menurut Poltak Sinambela (2011:6) untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan kualitas pelayanan prima yang bercirikan:

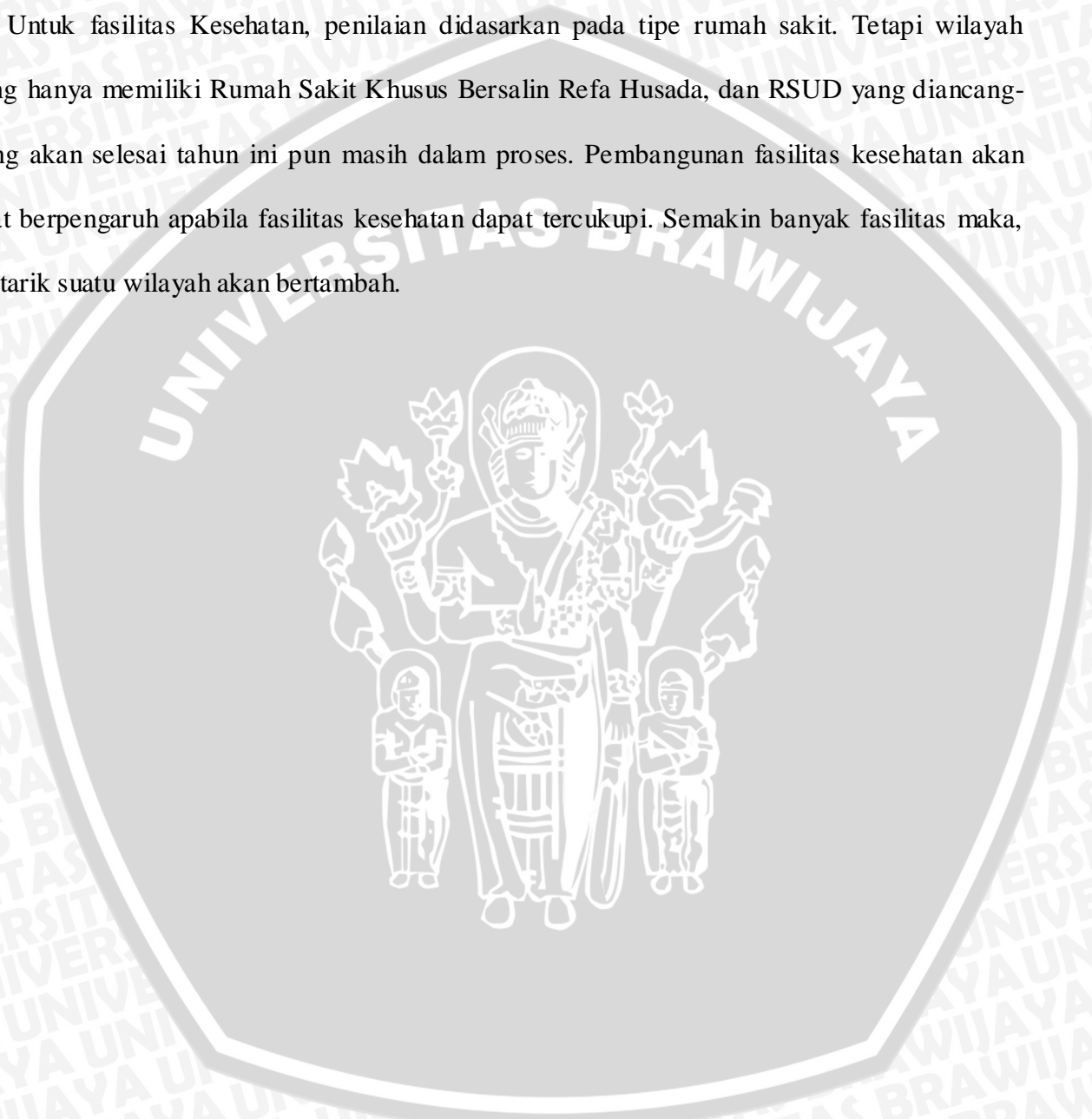
- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti,
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas,
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat,
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya, suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain,
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dalam pembanguna RSUD di Bumiayu dalam hal akuntabilitas nampaknya masih kurang, karena dalam pelaksanaannya diduga ada *mark-up* lahan. Menurut Malang Corruption Watch (MCW) pembangunan rumah sakit dilakukan di atas lahan 12.300 meter persegi. Pemerintah Kota Malang hanya memiliki lahan seluas 8.000 meter persegi. Sedangkan kekurangannya, 4.300 meter persegi, itulah yang dibeli dengan cara manipulasi dan penggelembungan harga. MCW memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar dari total anggaran pembangunan Rp 35 miliar (Purnomo, 2013).

Fasilitas pendidikan dan kesehatan mempunyai bobot tersendiri dalam mengukur daya tarik. Untuk fasilitas pendidikan. Dari sudut jenjang dapat dinilai sebagai berikut: satu murid

SMA lebih tinggi dari murid SMP, SD, dan TK. Tetapi SMA lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan siswa program S1. Wilayah Buring memiliki fasilitas pendidikan itu semua. Jumlahnya pun sangat banyak.

Untuk fasilitas Kesehatan, penilaian didasarkan pada tipe rumah sakit. Tetapi wilayah Buring hanya memiliki Rumah Sakit Khusus Bersalin Refa Husada, dan RSUD yang diancang-ancang akan selesai tahun ini pun masih dalam proses. Pembangunan fasilitas kesehatan akan sangat berpengaruh apabila fasilitas kesehatan dapat tercukupi. Semakin banyak fasilitas maka, daya tarik suatu wilayah akan bertambah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan pada rumusan masalah pertama adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sudah mengarah pada pandangan dimana wilayah Buring nantinya akan dijadikan sebagai wilayah yang kompleksitasnya tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah Buring, mulai dari sarana perhubungan, sarana perkotaan, sampai sarana penyediaan RTH..

Meskipun banyak rencana yang sudah ditetapkan dan dijalankan, tetapi ada rencana yang kurang tepat sasaran, yaitu dimana wilayah Buring dalam waktu 20 tahun kedepan akan dijadikan wilayah dengan fungsi utama berupa perumahan. Hal tersebut tidak cocok dengan kondisi sosial masyarakat wilayah Buring.

Kesimpulan pada rumusan masalah kedua adalah upaya pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan wilayah Buring sudah baik, karena sudah melihat pada sebaran penduduk, pola, struktur, dan organisasi yang dimana sangat dibutuhkan dalam mengembangkan suatu wilayah. Yang harus dibenahi adalah pada sebaran pola penduduk, karena di Kecamatan Kedungkandang belum merata. Hal itu mengingat luas wilayah Kecamatan Kedungkandang khususnya wilayah Buring yang besar.

Dalam aspek lain masih terdapat kekurangan, dengan masih terlihat dengan banyaknya infrastruktur yang akan dibangun tetapi hal itu masih belum terlaksana



secara maksimal, ada yang sudah berjalan tetapi tidak dilanjutkan, bahkan ada yang masih berupa wacana. Hal itu terjadi karena mitra kerjasama pemerintah kurang bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur terganggu.

## **B. Saran**

Saran untuk rumusan masalah pertama adalah perihal masalah fungsi utama wilayah Buring sebagai perumahan, sebaiknya dipertimbangkan lagi. Sebaiknya untuk kedepan wilayah Buring difungsikan sebagai kota pertanian atau agropolitan dimana terdapat kegiatan pelayanan pemasaran komoditas hasil pertanian (agrobisnis) dan terdapat pula kegiatan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah (agroindustri). Selain kota pertanian disarankan pula menjadi kota taman, dimana kota taman merupakan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar itu dikelilingi oleh jalur hijau (daerah pertanian).

Selain itu dalam menganalisis situasi sebaiknya penetapan kelompok sasaran lebih dikhususkan lagi. Tidak hanya masyarakat Kota Malang atau masyarakat wilayah Buring saja. Tetapi juga diperinci seperti masyarakat yang seperti apa yang akan merasakan dampak langsung dari pengembangan wilayah Buring, entah itu dilihat dari mata pencahariannya atau yang lain. Contoh: pengembangan wilayah ini akan cocok untuk masyarakat yang pekerjaannya wiraswasta, karena dengan makin banyaknya masyarakat yang datang, maka melakukan perdagangan atau menyediakan jasa sangat menjanjikan. Beda dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor pertanian, karena semakin lahan pertanian akan semakin sempit dan tidak menguntungkan lagi.

Saran untuk rumusan masalah kedua adalah sebaiknya rencana-rencana yang sudah ditetapkan segera diselesaikan dan dilaksanakan. Upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah Buring harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, *tangibel*, *reliable*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*.

Dalam menjalankan strategi khususnya pada pendekatan sinergisme fungsional yang membahas mengenai kerjasama antara pihak harus terus ditingkatkan. Jika dilihat dari pembangunan yang sudah berjalan, kerjasama pemerintah Kota Malang dengan wilayah lain masih kurang. Kerjasama yang dilakukan hanya sebatas dengan pihak swasta, dinas, dan perusahaan daerah. Seharusnya kerjasama dengan Kabupaten juga diadakan, mengingat wilayah Buring merupakan wilayah perbatasan Kota Malang. Hal itu tentu saja akan memudahkan pemerintah Kota Malang dalam menyelenggarakan pembangunan,



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Chambers, R. 1981. *Rapid Rural Appraisal: Rationale and Repertoire in Public Administration and Development*.
- Dewantoro, Budi. 2001. *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*. Yogyakarta: Philosophy Press
- Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil. 2003. *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (online), ([http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirjenPR\\_STTNADYogya.pdf](http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirjenPR_STTNADYogya.pdf), diakses pada tanggal 27 September 2013)
- Fn-online. 2013. *Pembangunan RSUD Kota Malang di Kebut* (online), (<http://www.fn-online.com/2013/07/pembangunan-rsud-kota-malang-di-kebut.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2014)
- Hariyono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pembangunan dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE
- Julianta, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Pembaruan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Pembaruan
- Kustiwan, Irwan dan Kurniasih Pontoh, Nia. 2008. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN. Jakarta.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta:STIA LAN Press
- Marbun. 1979. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek* (Edisi Kedua). Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Moeloeng, J. Ixey. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurmandi, Achmad. 2006. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi Daerah*. PT: Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada





- Purnomo, Abdi. 2013. Dugaan Mark-up Lahan RSUD Kota Malang Dilaporkan (online), (<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529959/Dugaan-Mark-up-Lahan-RSUD-Kota-Malang-Dilaporkan>, diakses pada tanggal 1 Februari 2014)
- Yunus, Hadi. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sadyohutomo, Mulyo Nomor 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagaan, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudjarwo. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono Nomor 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarelawati. 2012. Pemkot Malang Kebut Pembangunan RSUD (online), (<http://antarajatim.com/lihat/berita/83145/pemkot-malang-kebut-pembangunan-rsud>, diakses pada tanggal 1 Februari 2014)
- Syaiful Afandi, Achmad. 2014. Ranperda Selesai, RSUD Kota Malang Segera Dibuka (online), ([http://mediacenter.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Pembangunan-RSUD-Kota-Malang-masih-memerlukan-beberapa-fasilitas\\_1501MC.jpg](http://mediacenter.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Pembangunan-RSUD-Kota-Malang-masih-memerlukan-beberapa-fasilitas_1501MC.jpg), diakses pada tanggal 1 Februari 2014)
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya
- Wiroatmojo, Iran, dkk. 2001. *Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional (Bahan Ajar Diklat PIM Tingkat III)*. \_\_\_\_\_.

#### **Sumber Undang-Undang, PP, Keputusan Menteri:**

- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah  
 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992  
 PP Nomor 25 Tahun 2000  
 PP Nomor 38 Tahun 2007  
 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003  
 Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003  
 Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993

#### **Sumber website dinas:**

- <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073#ixzz2rwavyoyk>  
<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>  
<http://kedungkandang.malangkota.go.id/profile.php>,  
<http://bappeda.malangkota.go.id/>, <http://pu.malangkota.go.id/>,  
<http://perhubungan.malangkota.go.id/>,